

# **PELAKSANAAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH DALAM PERSPEKTIF FUNGSI ADMINISTRASI**

(Studi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang dan di  
Kelurahan Gading Kasri Kota Malang)

## **SKRIPSI**

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana  
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**Anggiyaza Adha**  
**145030101111090**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**  
**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK**  
**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**  
**MALANG**  
**2018**

## MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٦) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ (٧) وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ (٨)

*“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”*

(Al-Insyirah: 6-8)

*Optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence.*

(Helen Keller)

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul : Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh dalam  
Perspektif Fungsi Administrasi (Studi di Dinas Perumahan  
dan Kawasan Permukiman Kota Malang dan di Kelurahan  
Gading Kasri Kota Malang)

Disusun oleh : Anggiyaza Adha

NIM : 145030101111090

Fakultas : Ilmu Administrasi

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Malang, 3 Mei 2018

Pembimbing

  
**Prof. Dr. Agus Suryono, MS.**  
**NIP. 19521229 197903 1 003**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu

Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 17 Mei 2018  
Waktu : 08.00 - 09.00 WIB  
Skripsi Atas Nama : Anggiyaza Adha  
Judul : Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh dalam Perspektif Fungsi Administrasi (Studi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang dan di Kelurahan Gading Kasri Kota Malang)

**Dan dinyatakan LULUS**

**MAJELIS PENGUJI**

Ketua

  
**Prof. Dr. Agus Suryono, MS**  
**NIP. 19521229 197903 1 003**

Anggota

Anggota

  
**Dr. Mohammad Nuh, S.IP., M.Si**  
**NIP. 19710828 200604 1 001**

  
**Rendra Eko Wismanu, S.AP., M.AP**  
**NIP. 20110785 1214 1 001**

### PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 5 Mei 2018  
Mahasiswa



Nama: Anggiyaza Adha  
NIM :145030101111090

## RINGKASAN

Anggiyaza Adha, 2018. **Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh dalam Perspektif Fungsi Administrasi (Studi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang dan di Kelurahan Gading Kasri Kota Malang).** Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Jurusan Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya Malang. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Agus Suryono, MS.

---

Penelitian tentang pelaksanaan program kota tanpa kumuh dalam perspektif fungsi administrasi pada dasarnya dilakukan berdasarkan adanya permasalahan permukiman kumuh di Kota Malang. Permasalahan tersebut didasarkan karena pertumbuhan penduduk di Kota Malang yang semakin meningkat, sehingga kebutuhan terhadap kawasan permukiman juga semakin meningkat. Meningkatnya pertumbuhan penduduk berpengaruh pada munculnya permukiman kumuh karena tidak tersedianya lahan untuk permukiman masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2016 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya membuat suatu program yang bernama Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program ini bertujuan untuk mengatasi kekumuhan di tingkat nasional, salah satunya adalah Kota Malang yang memiliki luasan permukiman kumuh. Maka dari itu dalam pelaksanaan program kota tanpa kumuh perlu didasarkan pada fungsi administrasi agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan program kota tanpa kumuh yang dilakukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Kelurahan Gading Kasri dalam perspektif fungsi administrasi yang terdiri dari *Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting*, dan *Budgeting* serta untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan program kota tanpa kumuh di Kelurahan Gading Kasri Kota Malang. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian terdiri dari peneliti sendiri, pedoman wawancara, dan perangkat penunjang. Dalam menganalisis data penelitian, peneliti mengacu pada metode yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan program kota tanpa kumuh di Kelurahan Gading Kasri yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman beserta pemangku kepentingan lainnya sudah cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan dilaksanakannya program kota tanpa kumuh berdasarkan fungsi administrasi yang diajukan pada fokus penelitian. Namun masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki untuk mendapatkan hasil yang lebih baik yaitu dalam *Planning, Organizing*, dan *Staffing*. Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan program kota tanpa kumuh di Kelurahan Gading Kasri ini



adalah 1) Adanya Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2016 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai payung hukum; 2) Peran pemerintah daerah; 3) Adanya partisipasi masyarakat; dan 4) Bantuan dana investasi. Sedangkan faktor penghambat dari pelaksanaan program kota tanpa kumuh di Kelurahan Gading Kasri ini antara lain 1) Kurangnya partisipasi dalam kepengurusan badan keswadayaan masyarakat; 2) Tuntutan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan bidangnya; 3) Perbedaan pendapat antar masyarakat; 4) Peran kelompok swadaya masyarakat.

*Kata Kunci: Pelaksanaan Program, Permukiman Kumuh, Fungsi Administrasi.*



## SUMMARY

Anggiyaza Adha, 2018. **Program Implementation of Kota Tanpa Kumuh in Perspective of Administration Function (Study in Department of Housing and Settlement Region of Malang City and in Kelurahan Gading Kasri Malang City)**. Major of Public Administrative Science. Administrative Science Faculty Brawijaya Malang University. Supervisor: Prof. Dr. Agus Suryono, MS.

---

Research on program implementation of kota tanpa kumuh in perspective of administrative functions is basically done based on the existence of slum settlement problems in Malang. The problem is based on the increasing population growth in Malang City, so the need for residential area is also increasing. Increased population growth has an impact on the emergence of slums due to unavailability of land for community settlements. Based on the Regulation of the Minister of PUPR Number 2 Year 2016 regarding the quality improvement of slum housing and slums, Directorate of Development of Settlement Region, Ditjen Cipta Karya made a program called Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). This program aims to overcome the slum at the national level, one of which is the city of Malang which has a slum area. Therefore, in the program implementation of kota tanpa kumuh need to be based on administrative functions in order to achieve the goals set.

This research uses descriptive research with qualitative approach and aims to describe the program implementation of kota tanpa kumuh done by Department of Housing and Settlement Region and Kelurahan Gading Kasri in perspective of administration function consist of Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, and Budgeting as well as to describe the supporting factors and obstacle factors in the program implementation of kota tanpa kumuh in Kelurahan Gading Kasri Malang. Sources of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The research instrument consists of the researcher himself, the interview guide, and the supporting device. In analyzing the research data, the researcher refers to the method proposed by Miles, Huberman, and Saldana.

Based on this research, the program implementation of kota tanpa kumuh in Kelurahan Gading Kasri conducted by the Department of Housing and Settlement Region along with other stakeholders is good enough. This is demonstrated by program implementation of kota tanpa kumuh based on administrative functions that are submitted to the research focus. But there are still some shortcomings that need to be improved to get better results that is in Planning, Organizing, and Staffing. The supporting factors in the program implementation of kota tanpa kumuh in Kelurahan Gading Kasri is 1) The existence of the Regulation of Minister of PUPR Number 2 Year 2016 about quality improvement to slum housing and slums as the legal umbrella; 2) The role of local government; 3) The existence of community participation; and 4)



Assistance of investment funds. While the inhibiting factors of the program implementation of kota tanpa kumuh in Kelurahan Gading Kasri are, 1) Lack of participation in the management of public self-help agencies; 2) The demand for the execution of work is not in accordance with the field; 3) Differences of opinion between communities; 4) The role of self-help groups.

*Keywords: Program Implementation, Slum Settlements, Administrative Functions.*



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh dalam Perspektif Fungsi Administrasi (Studi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang dan di Kelurahan Gading Kasri Kota Malang)”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Dr. Fadillah Amin, M.AP, Ph.D selaku Ketua Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
4. Bapak Prof. Dr. Agus Suryono, MS selaku Ketua Komisi Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta kesabarannya untuk terus memberikan masukan yang membangun agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan serta seluruh staff dan karyawan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya atas bantuan dan kerjasama yang telah diberikan.
6. Bapak Drs. Mochammad Jusuf selaku Kepala Seksi Perumahan dan Permukiman, Bidang Perumahan dan Pertanahan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang yang telah menjadi informan pertama penulis dan membuka wawasan mengenai pelaksanaan program kota tanpa kumuh di Kota Malang.
7. Ibu Dra. Dewi Nurjannah, MM, AFP selaku Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Gading Kasri Kota Malang yang telah membantu penulis dalam proses penelitian serta Ibu Agustin Tri Lestari, S.Pd dan Ibu Erna Sudarwati, S.E yang telah membantu penulis untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan.
8. Bapak Winardi, S.E selaku Koordinator Tim Koordinator Kota Program Kota Tanpa Kumuh Kota Malang yang telah membantu menjadi informan penulis.
9. Bapak Joko Santoso selaku perwakilan dari masyarakat Kelurahan Gading Kasri Kota Malang yang telah membantu penulis selama proses penelitian berlangsung dan bersedia menemani penulis melakukan kegiatan tinjauan lapangan.
10. Kedua orangtua tercinta Bapak Zaenal Arifin dan Mamah Yoyo Amelia, yang selalu memberikan dukungan moril maupun materi serta tiada hentinya memberikan doa untuk kesuksesan anaknya, serta adik-adik tercinta Fajar

- Oktayaza dan Fathia Naylayaza yang selalu memberikan canda tawa agar penulis selalu bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Penghuni Kosan Terusan Cikampek nomor 24 yang sudah seperti saudara sendiri telah menemani penulis selama di Malang dan menjadi tempat berkeluh kesah penulis, Hanida Nurulan, Olivia Erica, dan Safira Chaerani.
  12. Ukhti, sahabat sedari menjadi mahasiswa baru yang selalu memberikan semangat, saran, masukan, koreksi dan tentunya dukungan agar skripsi ini cepat terselesaikan, Adiba Jeyhan, Adinda Saraswati, Afifatuz Zakiyah, Farah Dhiba, Quntum Chanif, dan Reyna Lazuardi.
  13. Abdullah Fahmi, yang telah menemani dan meluangkan waktunya untuk penulis, memberikan banyak pengalaman berharga, semangat, dukungan dan menjadi tempat berkeluh kesah penulis ketika penulis senang maupun sedih.
  14. Sahabat seperjuangan yang selalu memberikan dukungan dan hiburan dikala penat sewaktu mengerjakan skripsi ini, Defita Rosa, Haidar Fakhri, Muhammad Aghni, Nabilah Zharfa, dan Septyan Eka.
  15. Six, sahabat tersayang yang tak hentinya memberikan semangat dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung walaupun jarak yang memisahkan, Cattleya Annisa, Cella Romadhiningrum, Chika Putri, Khalfia Anisa, dan Yuliani Khoirun Nisa.
  16. The Gibah, sahabat yang dipertemukan di bangku sekolah kelas XI yang selalu menyemangati dan memberikan lelucon kepada penulis ketika sedang berada di titik jenuh, Avriasditia Azizah, Helsa Griffani, Indriani Sara, dan Nadya Mulia.

17. Sahabat tercintaku dari jaman piyik sampai beranjak remaja hingga dewasa, Indriani Meiliala, Astried Puspa, Yuliana Yursaldi, Maftuhatur Fista, Syifa Aulia, Fera Syafitri, Hilza Amalia, Amalia Nurmala, dan Gadis Arivia.
18. Keluargaku di Kampus Abu-Abu, kakak-kakak dan adik-adik Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik (HUMANISTIK) atas dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis.
19. Teman-teman seperantauan dan seperjuangan penulis di Jurusan Administrasi Publik khususnya angkatan 2014 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang selalu memberikan hiburan dan canda tawa.
20. Serta semua pihak terkait yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT akan membalas budi baik semua pihak yang telah membantu pelaksanaan sampai dengan penyusunan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah berusaha memberikan hasil yang terbaik, tetapi penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan di hati. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Amiin.

Malang, 5 Mei 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>MOTTO .....</b>	<b>i</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SUMMARY .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxi</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	 <b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kontribusi Penelitian.....	13
E. Sistematika Pembahasan .....	14
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	 <b>17</b>
A. Administrasi Publik dan Fungsi Administrasi .....	17
1. Definisi Administrasi Publik.....	17
2. Fungsi Administrasi .....	19
a. <i>Planning</i> (Perencanaan) .....	20
b. <i>Organizing</i> (Pengorganisasian) .....	23
c. <i>Staffing</i> (Pengadaan Tenaga Kerja).....	25
d. <i>Directing</i> (Pemberian Bimbingan) .....	27
e. <i>Coordinating</i> (Pengkoordinasian) .....	28



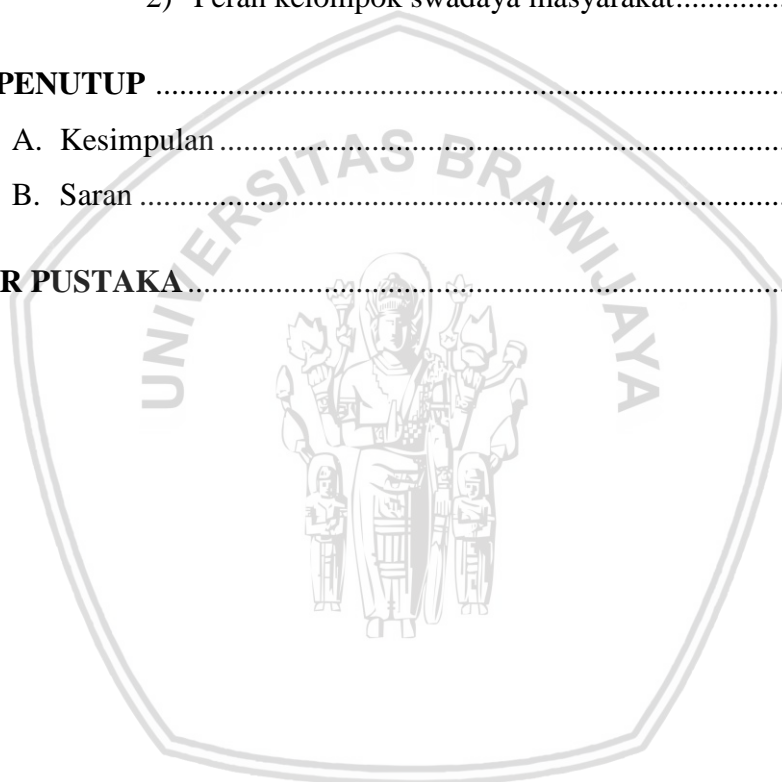
f. <i>Reporting</i> (Pelaporan) .....	29
g. <i>Budgeting</i> (Penganggaran) .....	30
B. Konsep Pembangunan Kawasan Permukiman Kumuh .....	32
1. Definisi Pembangunan .....	32
2. Pembangunan Kawasan Permukiman Kumuh .....	34
C. Konsep Program .....	36
1. Definisi Program .....	36
2. Pelaksanaan Program .....	37
3. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) .....	40
a. Pengertian Program Kota Tanpa Kumuh .....	40
b. Tujuan Program Kota Tanpa Kumuh .....	41
c. Strategi dan Prinsip Program Kota Tanpa Kumuh .....	43
d. Cakupan Program Kota Tanpa Kumuh .....	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	52
A. Jenis Penelitian .....	52
B. Fokus Penelitian .....	53
C. Lokasi dan Situs Penelitian .....	55
D. Sumber dan Jenis Data .....	56
E. Teknik Pengumpulan Data .....	59
F. Instrumen Penelitian .....	62
G. Analisis Data .....	63
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	67
A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian .....	67
1. Kota Malang .....	67
a. Sejarah Kota Malang .....	67
b. Keadaan Geografis Kota Malang .....	68
c. Makna Lambang Kota Malang .....	72
d. Visi Misi Kota Malang .....	72
2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang .....	76

a. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang.....	76
b. Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang .....	77
c. Visi dan Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang .....	77
d. Kepegawaian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang .....	81
3. Kelurahan Gading Kasri Kota Malang.....	83
a. Letak Geografis Kelurahan Gading Kasri Kota Malang.....	83
b. Visi Misi Kelurahan Gading Kasri Kota Malang.....	83
c. Struktur Organisasi Kelurahan Gading Kasri Kota Malang.....	85
d. Kelembagaan Masyarakat Kelurahan Gading Kasri Kota Malang.....	85
e. Kondisi Demografi.....	86
B. Penyajian Data Fokus .....	90
1. Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh dalam Perspektif Fungsi Administrasi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang dan di Kelurahan Gading Kasri Kota Malang.....	90
a. Perencanaan ( <i>Planning</i> ) Program Kota Tanpa Kumuh meliputi Aspek Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP).....	90
b. Pengorganisasian ( <i>Organizing</i> ) Program Kota Tanpa Kumuh meliputi Aspek Struktur Organisasi Pegawai .....	99
c. Pengadaan Tenaga Kerja ( <i>Staffing</i> ) Program Kota Tanpa Kumuh meliputi Aspek Manajemen Kepegawaian .....	104
d. Pemberian Bimbingan ( <i>Directing</i> ) Program Kota Tanpa Kumuh meliputi Aspek Aktor Pemberi Bimbingan dan Aktor Penerima Bimbingan .....	108

e. Pengkoordinasian ( <i>Coordinating</i> ) Program Kota Tanpa Kumuh meliputi Aspek Rapat Koordinasi Antar <i>Stakeholder</i> Terkait .....	114
f. Pelaporan ( <i>Reporting</i> ) Program Kota Tanpa Kumuh meliputi Aspek Laporan Pertanggung Jawaban .....	120
g. Penganggaran ( <i>Budgeting</i> ) Program Kota Tanpa Kumuh meliputi Aspek Penyusunan Anggaran Biaya.....	124
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh dalam Perspektif Fungsi Administrasi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang dan di Kelurahan Gading Kasri Kota Malang.....	127
a. Faktor Pendukung Internal .....	128
1) Adanya Peraturan Menteri PUPR Nomor 02/PRT/M/2016 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai payung hukum.....	128
2) Peran Pemerintah Daerah .....	129
b. Faktor Pendukung Eksternal .....	132
1) Adanya Partisipasi Masyarakat .....	132
2) Bantuan Dana Investasi.....	133
c. Faktor Penghambat Internal .....	135
1) Kurangnya partisipasi dalam kepengurusan badan keswadayaan masyarakat .....	135
2) Tuntutan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan bidangnya .....	136
d. Faktor Penghambat Eksternal .....	137
1) Perbedaan pendapat antar masyarakat .....	137
2) Peran kelompok swadaya masyarakat.....	139
C. Analisis Data.....	140
1. Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh dalam Perspektif Fungsi Administrasi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang dan di Kelurahan Gading Kasri	

Kota Malang.....	141
a. Perencanaan ( <i>Planning</i> ) Program Kota Tanpa Kumuh meliputi	
Aspek Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) ....	141
b. Pengorganisasian ( <i>Organizing</i> ) Program Kota Tanpa Kumuh meliputi Aspek Struktur Organisasi Pegawai .....	145
c. Pengadaan Tenaga Kerja ( <i>Staffing</i> ) Program Kota Tanpa Kumuh meliputi Aspek Manajemen Kepegawaian.....	149
d. Pemberian Bimbingan ( <i>Directing</i> ) Program Kota Tanpa Kumuh meliputi Aspek Aktor Pemberi Bimbingan dan Aktor Penerima Bimbingan.....	152
e. Pengkoordinasian ( <i>Coordinating</i> ) Program Kota Tanpa Kumuh meliputi Aspek Rapat Koordinasi Antar <i>Stakeholder</i> Terkait .....	154
f. Pelaporan ( <i>Reporting</i> ) Program Kota Tanpa Kumuh meliputi Aspek Laporan Pertanggung Jawaban .....	157
g. Penganggaran ( <i>Budgeting</i> ) Program Kota Tanpa Kumuh meliputi Aspek Penyusunan Anggaran Biaya.....	159
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh dalam Perspektif Fungsi Administrasi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang dan di Kelurahan Gading Kasri Kota Malang.....	161
a. Faktor Pendukung Internal .....	161
1) Adanya Peraturan Menteri PUPR Nomor 02/PRT/M/2016 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai payung hukum.....	161
2) Peran Pemerintah Daerah .....	162
b. Faktor Pendukung Eksternal .....	163
1) Adanya Partisipasi Masyarakat .....	163
2) Bantuan Dana Investasi.....	165

c. Faktor Penghambat Internal .....	166
1) Kurangnya partisipasi dalam kepengurusan badan keswadayaan masyarakat .....	166
2) Tuntutan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan bidangnya .....	167
d. Faktor Penghambat Eksternal .....	168
1) Perbedaan pendapat antar masyarakat .....	168
2) Peran kelompok swadaya masyarakat.....	169
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>171</b>
A. Kesimpulan .....	171
B. Saran .....	176
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>179</b>



## DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
Tabel 1	Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh .....	3
Tabel 2	Jumlah Penduduk dan Laku Pertumbuhan Penduduk menurut Kecamatan di Kota Malang .....	5
Tabel 3	Kepadatan Penduduk Kota Malang Menurut Kecamatan Tahun 2016 .....	6
Tabel 4	Daftar Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Malang .....	7
Tabel 5	Data Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang .....	81
Tabel 6	Kondisi Kependudukan di Kelurahan Gading Kasri Kota Malang .....	86
Tabel 7	Kepadatan Penduduk di Kawasan Perencanaan .....	87
Tabel 8	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dalam Pelaksanaan Program KOTAKU di Kelurahan Gading Kasri Tahun 2017 .....	119



## DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
Gambar 1	Komponen Analisis Data Model Interaktif .....	64
Gambar 2	Peta Administrasi Kota Malang.....	71
Gambar 3	Lambang Kota Malang .....	72
Gambar 4	Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang .....	77
Gambar 5	Peta Administrasi Kelurahan Gading Kasri Kota Malang .....	83
Gambar 6	Struktur Organisasi Kelurahan Gading Kasri Kota Malang.....	85
Gambar 7	Grafik Kepadatan Penduduk Kelurahan Gading Kasri Kota Malang.....	88
Gambar 8	Peta Kepadatan Penduduk Kelurahan Gading Kasri Kota Malang.....	89
Gambar 9	Peta Deliniasi SK Kumuh Walikota .....	90
Gambar 10	Kegiatan Pemetaan Swadaya di BKM .....	94
Gambar 11	Skema Penanganan Kawasan Kumuh .....	96
Gambar 12	Alur Penyusunan Konsep dan Strategi Penanganan Kawasan Kumuh .....	97
Gambar 13	Struktur Organisasi BKM Kelurahan Gading Kasri .....	101
Gambar 14	Struktur KSM .....	103
Gambar 15	Susunan Keanggotaan PK BKM Kelurahan Gading Kasri Periode Tahun 2017-2019 .....	106
Gambar 16	Pemberian Bimbingan dari Tim Korkot kepada Masyarakat Kelurahan Gading Kasri .....	110
Gambar 17	Pelatihan OJT KSM .....	111
Gambar 18	Rincian Dana Pelatihan Masyarakat Kelurahan Gading Kasri.....	112
Gambar 19	Hasil dari Pelaksanaan Program KOTAKU .....	113
Gambar 20	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program KOTAKU .....	116
Gambar 21	Hasil dari Pelaksanaan Program KOTAKU .....	122
Gambar 22	Contoh Laporan Keuangan dalam LPJ Program KOTAKU Kelurahan Gading Kasri Tahun 2017 .....	123
Gambar 23	Anggaran Pemasukan dan Pengeluaran BKM Kelurahan Gading Kasri .....	127
Gambar 24	Kegiatan Tinjauan Lapangan oleh Pemerintah Daerah di Kelurahan Gading Kasri .....	132
Gambar 25	Partisipasi Masyarakat Kelurahan Gading Kasri dalam Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Program .....	133

**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>No.</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
	Lampiran 1. Surat Izin Penelitian Bakesbangpol Kota Malang .....	181
	Lampiran 2. SK Walikota Malang No. 86 Tahun 2015.....	182
	Lampiran 3. Dokumentasi Peneliti .....	183
	Lampiran 4. Pedoman Wawancara .....	187



**CURRICULUM VITAE****A. Identitas Diri**

Nama : Anggiyaza Adha  
Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 27 April 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat di Malang : Jl. Terusan Cikampe No. 24 Malang  
Alamat Asal : Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo RT 01/02 No. 6 Peninggilan  
Utara, Ciledug, Kota Tangerang  
NIM : 145030101111090  
Fakultas / Jurusan : Fakultas Ilmu Administrasi / Administrasi Publik  
Universitas : Universitas Brawijaya  
Nomor Telepon : 081282526433  
Email : adhaanggiyaza@gmail.com

**B. Riwayat Pendidikan Formal**

No	Pendidikan Formal	Tahun
1	TK Tunas Harapan Tangerang	2001 – 2002
2	SDN Sudimara 07 Tangerang	2002 – 2008
3	SMPN 215 Jakarta	2008 – 2011
4	SMAN 63 Jakarta	2011 – 2014
5	S-1 Ilmu Administrasi Publik, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya	2014 - 2018

**C. Pengalaman Organisasi**

No	Posisi	Organisasi	Tahun
1	Staff Biru Muda	Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik (HUMANISTIK)	2014
2	Staff Divisi Sponsorship	Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik (HUMANISTIK)	2015
3	Ketua Divisi Sponsorship	Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik (HUMANISTIK)	2016

**D. Pengalaman Kepanitiaan**

No	Posisi	Kepanitiaan	Tahun
1	Staff Divisi Dana Usaha	Gebyar Festival Tari (GFT) Universitas Brawijaya	2014
2	Coodinator Divisi Sponsorship	Lentera Ilmu Humanistik	2015
3	Staff Divisi Konsumsi	Southeast Asia Governance Forum	2015
4	Steering Committee	Education Fair	2016

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kawasan permukiman di daerah perkotaan merupakan suatu fenomena yang saat ini menjadi sorotan bagi pemerintah. Semakin pesatnya pembangunan permukiman di perkotaan diakibatkan salah satunya dari derasnya laju urbanisasi yang menjadikan permintaan kawasan permukiman di daerah perkotaan meningkat. Keadaan tersebut menjadi masalah jika tingginya kepadatan penduduk di daerah perkotaan tidak seimbang dengan luasnya kawasan permukiman yang ada. Hal ini dapat menciptakan kawasan permukiman kumuh di daerah perkotaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mendefinisikan permukiman kumuh sebagai permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Pada dasarnya permukiman kumuh muncul akibat dari kurangnya sistem perencanaan terhadap tata ruang dan wilayah kota. Sedangkan menurut Yunus (2005:91) ada tiga penyebab terjadinya permukiman kumuh, yaitu:

1. Proses Densifikasi

Proses densifikasi secara terus-menerus mengakibatkan kejenuhan pembangunan permukiman di wilayah-wilayah tertentu, hal ini akan

menyebabkan kurang tertatanya kawasan permukiman dan sulitnya pemenuhan prasarana dan sarana penunjang kawasan permukiman tersebut.

## 2. Proses Penuaan Bangunan

*Ageing process* atau proses penuaan bangunan mengakibatkan kumuh di perkotaan akibat ketidaklayakan dan penurunan kualitas bangunan tempat tinggal. Hal ini bisa dilihat dari sudut pandang ekonomi, akibat perekonomian masyarakat rendah menyebabkan ketidakmampuan masyarakat tersebut untuk melakukan pemugaran atau pemeliharaan bangunan tempat tinggalnya tersebut.

## 3. Proses Penggenangan Daerah Permukiman

Proses penggenangan berkaitan dengan ketersediannya sarana dan prasarana drainase yang memadai, jika permukiman penduduk semakin berdesakan akan mengurangi akses jalan, sarana air bersih dan sarana drainase untuk menampung kelebihan air akibat kegiatan masyarakat atau mengantisipasi banjir ketika hujan.

Permasalahan yang muncul apabila dengan adanya permukiman kumuh yang tidak cepat ditangani akan berimplikasi pada semakin luasnya kawasan permukiman kumuh tersebut. Permukiman kumuh juga dapat memberikan citra buruk terhadap kinerja pemerintah yang sekiranya tidak mengatur tata ruang wilayah daerahnya dengan baik serta tidak menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Semestinya pemerintah wajib memperhatikan tata ruang wilayah dan menyediakan sarana dan prasarana jika ditinjau secara fungsional. Hal ini sesuai dengan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 yaitu



pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan.

Kekumuhan atau tidaknya suatu kawasan permukiman dapat dilihat berdasarkan kriteria permukiman kumuh. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2016 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh menyatakan terdapat beberapa kriteria kawasan permukiman kumuh yang dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 1. Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh**

No	Kriteria	Parameter
1	Bangunan Gedung	Ketidakteraturan bangunan
		Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang
		Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat
2	Jalan Lingkungan	Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman
		Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk
3	Penyediaan Air Minum	Ketidaktersediaan akses aman air minum
		Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku
4	Drainase Lingkungan	Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan
		Ketidaktersediaan drainase
		Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan
		Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya
5	Pengelolaan Air Limbah	Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk
		Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku
6	Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis
		Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis

No	Kriteria	Parameter
		Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis
		Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase
7	Proteksi Kebakaran	Prasarana proteksi kebakaran
		Sarana proteksi kebakaran

*Sumber: Olahan Peneliti berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2016*

Menurut data Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2016 tercatat luas kawasan permukiman kumuh di Indonesia seluas 35.291 Ha. Hal ini sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai target peningkatan kualitas permukiman kumuh yang menyatakan target nasional awalnya pada tahun 2015 berada pada angka 38.431 Ha. Dapat dikatakan bahwa dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh telah berjalan cukup baik dengan menurunnya angka kawasan permukiman kumuh di Indonesia. Peningkatan kualitas permukiman kumuh ini masih berlangsung sampai tahun 2019 sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015 – 2019.

Kota Malang merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki daya tarik yang tinggi baik dari segi pendidikan maupun pariwisata. Hal tersebut tentunya berpengaruh pada semakin cepatnya laju pertumbuhan fisik dan ekonomi. Akibat dari cepatnya laju pertumbuhan ekonomi membuat para pendatang melihat kesempatan besar untuk mengadu nasib dan memutuskan untuk berpindah tempat tinggal sebagai kaum urban yang menyebabkan semakin

tingginya penduduk di Kota Malang. Jumlah penduduk di Kota Malang pada tiap tahunnya mengalami kenaikan yang signifikan, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kecamatan di Kota Malang**

Kecamatan	Penduduk		
	2015	2016	2017
Kedungkandang	186.068	188.175	190.274
Sukun	190.053	191.513	192.951
Klojen	104.127	103.637	103.129
Blimbing	177.729	178.564	179.368
Lowokwaru	193.321	194.521	195.692
<b>Kota Malang</b>	<b>851.298</b>	<b>856.410</b>	<b>861.414</b>

Sumber: [www.malangkota.bps.go.id](http://www.malangkota.bps.go.id)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa setiap tahunnya terdapat peningkatan dalam jumlah penduduk di Kota Malang. Data tersebut menunjukkan jumlah penduduk terbesar Kota Malang berada pada Kecamatan Lowokwaru. Akibat dari terus meningkatnya jumlah penduduk akan berimplikasi pada semakin padatnya kependudukan. Meningkatnya kepadatan penduduk maka jumlah permintaan kebutuhan kawasan permukiman akan turut meningkat. Kepadatan penduduk yang terjadi di Kota Malang dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 3. Kepadatan Penduduk Kota Malang menurut Kecamatan Tahun 2016**

Kecamatan	Luas Wilayah Area (Km <sup>2</sup> )	Penduduk	Persentase	Kepadatan Penduduk (penduduk/Km <sup>2</sup> )
Kedungkandang	39,89	188,175	36,24	4,717
Sukun	20,97	191,513	19,05	9,133
Klojen	8,83	103,637	8,02	11,737
Blimbing	17,77	178,564	16,15	10,049
Lowokwaru	22,60	194,521	20,53	8,607
<b>Kota Malang</b>	<b>110,06</b>	<b>856,410</b>	<b>100,00</b>	<b>7,781</b>

Sumber: [www.malangkota.bps.go.id](http://www.malangkota.bps.go.id)

Data di atas menunjukkan bahwa Kecamatan Klojen merupakan wilayah yang memiliki kepadatan penduduk paling tinggi sebesar 11.737 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk ini apabila tidak cepat ditangani akan membuat permasalahan yang ada semakin kompleks. Permasalahan yang paling umum adalah kurangnya lahan untuk permukiman masyarakat. Hal tersebut berdampak pada munculnya permukiman baru yang bersifat legal maupun ilegal. Permasalahan lainnya adalah munculnya kepadatan bangunan pada beberapa kawasan permukiman. Apabila permasalahan ini terus menerus tidak terkendali, maka akan menyebabkan buruknya tata wilayah kawasan permukiman sehingga muncul adanya permukiman kumuh.

Data luas kawasan permukiman kumuh hasil dari verifikasi Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KP-KP) tahun 2016 menunjukkan bahwa luas kawasan permukiman kumuh Kota Malang sebesar 599,8 hektare, sedangkan luas wilayah Kota Malang adalah 11.606 Ha. Kawasan permukiman kumuh Kota Malang tersebar pada 29 titik

wilayah kelurahan di lima kecamatan. Daftar kawasan perumahan dan permukiman kumuh perkulurahan di Kota Malang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4. Daftar Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Malang**

No	Lokasi	Target (Ha)	Realisasi (Ha)
1	Kelurahan Balarjosari	2,27	1,32
2	Kelurahan Blimbing	0,25	-
3	Kelurahan Pandanwangi	0,17	-
4	Kelurahan Purwantoro	0,05	-
5	Kelurahan Polehan	17,5	14,42
6	Kelurahan Jodipan	4,8	3,6
7	Kelurahan Kotalama	25,7	0,35
8	Kelurahan Mergosono	47,2	2,28
9	Kelurahan Samaan	30,4	16,34
10	Kelurahan Penanggungan	53,01	14,42
11	Kelurahan Oro-Oro Dowo	22,4	7,32
12	Kelurahan Gading Kasri	42,62	37,14
13	Kelurahan Bareng	81,56	11,03
14	Kelurahan Kauman	3,1	3,1
15	Kelurahan Kiduldalem	26,02	9,26
16	Kelurahan Kasin	48,2	-
17	Kelurahan Sukoharjo	39,2	32,19
18	Kelurahan Dinoyo	0,66	0,66
19	Kelurahan Tlogomas	2,54	2,54
20	Kelurahan Merjosari	0,05	0,05
21	Kelurahan Jatimulyo	0,4	0,4
22	Kelurahan Tulusrejo	8	6,71
23	Kelurahan Sumbersari	10,2	9,5
24	Kelurahan Lowokwaru	9,5	3,16
25	Kelurahan Ciptomulyo	62,6	-
26	Kelurahan Bandungrejosari	8,4	-
27	Kelurahan Sukun	34,35	31,62
28	Kelurahan Tanjungsrejo	8,4	2,3
29	Kelurahan Bandulan	27	9,84

Sumber: Olahan Peneliti berdasarkan SK Walikota Malang No. 86 Tahun 2015

Kawasan permukiman kumuh akan terus mengalami penambahan jika tidak ada bentuk penanganan yang inovatif, menyeluruh, dan tepat sasaran. Maka dari itu pemerintah pusat mengambil langkah untuk menangani permasalahan tersebut dengan membuat suatu program. Menurut Jones yang dikutip oleh Rohman (2009:101-102) menyebutkan program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan dan program juga sebuah upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan.

Upaya strategis yang dirancang oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya dalam menangani kawasan permukiman kumuh khususnya pada daerah perkotaan yaitu dengan membuat suatu program yang bernama Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program KOTAKU ini dirancang untuk percepatan penanganan permukiman kumuh dengan cara meminimalisir dari kriteria permukiman kumuh yang terdapat pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2016. Sebagaimana arah kebijakan pembangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk membangun sistem, fasilitasi pemerintah daerah dan fasilitasi komunitas (berbasis komunitas) maka program KOTAKU akan menangani kawasan permukiman kumuh dengan membangun *platform* kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah serta peran masyarakat.

Program KOTAKU dilaksanakan di 34 provinsi, yang tersebar di 269 kabupaten/kota, pada 11.067 desa/kelurahan. Lokasi sasaran Program KOTAKU adalah seluas 24.650 Hektare yang telah berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kumuh yang ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing kabupaten/kota. Sebagai implementasi percepatan penanganan kumuh, Program KOTAKU akan



melaksanakan peningkatan kualitas, pengelolaan serta pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru, dengan kegiatan-kegiatan pada entitas desa/kelurahan, kawasan dan kabupaten/kota. Kegiatan penanganan kawasan permukiman kumuh ini meliputi pembangunan infrastruktur serta pendampingan sosial dan ekonomi dalam rangka keberlanjutan penghidupan masyarakat yang lebih baik pada lokasi permukiman kumuh. Program ini telah disosialisasikan kepada Pemerintah Daerah yang wilayahnya termasuk ke dalam kawasan penanganan Program KOTAKU tertanggal 27 April 2016 bertempat di Jakarta.

Sesuai dengan amanat Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya nomor: 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh, Kota Malang telah membentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Permukiman (Pokja PKP). Adapun Dinas yang spesifik menangani kawasan permukiman kumuh di Kota Malang adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DISPERKIM), Bidang Perumahan dan Pertanahan. Selain itu juga terdapat pendamping atau fasilitator dalam Program KOTAKU di Kota Malang, diantaranya adalah Koordinator Kota Fasilitator P2KKP (Korkot), Assisten Kota Program Pemberdayaan Masyarakat (Askot), Senior Fasilitator (SF), dan Fasilitator Kelurahan (Faskel) yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dampingan yang berbeda.

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sesuai dengan misi ke-4 RPJMD Kota Malang, yaitu meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan. Berdasarkan estimasi penanganan melalui Satuan Kerja

Pembangunan Infrastruktur Permukiman, Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas, dan Program Kolaborasi selama kurun waktu 2015 – 2016 luas kawasan permukiman kumuh yang telah ditangani seluas 51,98 Ha. Setiap tahunnya terdapat beberapa kawasan yang menjadi prioritas penanganan di Kota Malang. Metode penanganan pada kawasan permukiman kumuh Kota Malang diprioritaskan pada kawasan kumuh yang memiliki beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Harus termasuk dalam lokasi kumuh yang terdapat pada Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 86 Tahun 2015;
2. Kondisi kelembagaan masyarakat mendukung atau Badan Keswadayaan Masyarakatnya memadai;
3. Status kinerja keuangan sekretariat Badan Keswadayaan Masyarakat minimal memadai;
4. Rencana Penataan Lingkungan Permukiman sudah tersusun dan disahkan;
5. Tidak ada penyalahgunaan keuangan yang belum terselesaikan;
6. Tidak berada di lokasi ilegal;
7. Tersedia *detail engineering design* (ded).

Pada tahun 2016 dan 2017 terdapat 10 Kelurahan yang menjadi kawasan prioritas, diantaranya adalah Kelurahan Tanjungrejo, Bandulan, Kasin, Bareng, Gading Kasri, Penanggungan, Oro-oro Dowo, Samaan, Kiduldalem dan Sukoharjo. Salah satu kelurahan di Kota Malang yang menjadi skala prioritas pada tahun 2016 dan 2017 dalam penanganan permasalahan permukiman kumuh yang telah berhasil melaksanakan Program Kota Tanpa Kumuh dan membuat

kawasan kumuhnya mendekati 0 % adalah Kelurahan Gading Kasri. Luas wilayah kelurahan ini mencakup 90,98 Ha dan luas kawasan permukiman kumuh awalnya berada pada angka 42,62 Ha. Permasalahan kumuh di Kelurahan Gading Kasri yang paling besar disebabkan pada masalah penyediaan air minum, jalan lingkungan dan pengelolaan air limbah. Berdasarkan tinjauan peneliti ke lapangan saat ini Kelurahan Gading Kasri telah berhasil menangani permasalahan-permasalahan kekumuhan yang ada dan membuat wilayahnya menjadi kelurahan percontohan di Kota Malang.

Pelaksanaan program dikatakan berhasil apabila membawa suatu perubahan ke arah yang lebih baik serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Pelaksanaan suatu program agar lebih mudah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari program tersebut, sebaiknya dilaksanakan berdasarkan fungsi administrasi. Mengutip dari Gullick dalam Siagian (2014:84) terdapat tujuh fungsi administrasi, diantaranya adalah *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Staffing* (Pengadaan Tenaga Kerja), *Directing* (Pemberian Bimbingan), *Coordinating* (Pengkoordinasian), *Reporting* (Pelaporan), dan *Budgeting* (Penganggaran). Rangkaian fungsi tersebut lebih dikenal dengan akronimnya “POSDCORB”. Apabila sejak awal dibuatnya program telah mengacu pada fungsi administrasi, maka pencapaian dari tujuan program tersebut akan lebih cepat tercapai.

Penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh dalam Perspektif Fungsi Administrasi (Studi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang dan di Kelurahan Gading Kasri Kota**

**Malang)**” ini membahas permasalahan terkait penanganan kawasan permukiman kumuh melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Gading Kasri Kota Malang. Pelaksanaan program KOTAKU ini ditinjau berdasarkan fungsi administrasi dari Luther M. Gullick yang terdiri dari *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Staffing* (Pengadaan Tenaga Kerja), *Directing* (Pemberian Bimbingan), *Coordinating* (Pengkoordinasian), *Reporting* (Pelaporan), dan *Budgeting* (PENGANGGARAN). Fungsi administrasi dapat menjadi salah satu penentu dalam keberhasilan pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Gading Kasri Kota Malang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penentuan rumusan masalah adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah pelaksanaan program kota tanpa kumuh dalam perspektif fungsi administrasi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang dan di Kelurahan Gading Kasri Kota Malang?
2. Apasajakah faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan program kota tanpa kumuh dalam perspektif fungsi administrasi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang dan di Kelurahan Gading Kasri Kota Malang?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan pelaksanaan program kota tanpa kumuh dalam perspektif fungsi administrasi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang dan di Kelurahan Gading Kasri Kota Malang.
2. Mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan program kota tanpa kumuh dalam perspektif fungsi administrasi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang dan di Kelurahan Gading Kasri Kota Malang.

### D. Kontribusi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara akademik maupun praktis:

1. Kontribusi Teoritis:
  - a. Sebagai bahan kajian dan menambah wacana keilmuan pengembangan ilmu administrasi publik.
  - b. Diharapkan dengan penelitian ini akan menjadi wacana keilmuan kebijakan publik khususnya pada pelaksanaan program kota tanpa kumuh.

## 2. Kontribusi Praktis:

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai masukan atau sumber informasi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang pelaksanaan program kota tanpa kumuh.
- b. Dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai data atau pedoman pelaksanaan penelitian lebih lanjut tentang pelaksanaan program kota tanpa kumuh.
- c. Diharapkan penelitian ini memberikan wawasan dan gambaran bagi kalangan akademisi dan para pelaku (stakeholder) yang terlibat pada pelaksanaan program kota tanpa kumuh.

## E. Sistematika Pembahasan

Bentuk upaya untuk memberikan kemudahan dalam memahami isi skripsi ini secara keseluruhan dan agar terdapatnya susunan yang logis dan sistematis, maka penulisan dalam penelitian ini mengacu pada sistematika sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian yaitu pelaksanaan program kota tanpa kumuh dalam perspektif fungsi administrasi (Studi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang dan di Kelurahan Gading Kasri Kota Malang). Dalam bab ini juga memaparkan rumusan masalah sebagai batasan penelitian, kemudian penjelasan terkait tujuan penelitian, kontribusi

penelitian baik secara akademis maupun praktis, dan sistematika pembahasan.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan paparan dan uraian teori sebagai landasan yang digunakan peneliti untuk menyusun penelitian ini. Teori atau konsep yang dipaparkan dalam bab ini juga dapat digunakan sebagai instrumen analisis data yang telah didapat oleh peneliti di lapangan.

## BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas metode penelitian apa yang digunakan peneliti dalam penelitian ini. Metode penelitian ini terdiri dari: jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian beserta alasannya, sumber data, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data.

## BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Menguraikan tentang gambaran umum meliputi data fokus pembagasan yang diperoleh selama penelitian. Penyajian data umum yang merupakan gambaran pada lokasi penelitian yang disusun menurut keperluan penilaian serta penyajian data fokus yang disesuaikan dengan fokus penelitian kemudian membahasnya.



## BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan terhadap pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, beserta saran yang dapat penulis berikan pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Administrasi Publik dan Fungsi Administrasi

##### 1. Definisi Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan terjemahan dari *public administration*. Menurut Henry dalam Indradi (2006:113) administrasi publik diartikan sebagai suatu yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Sedangkan ahli lain menyatakan bahwa administrasi publik yaitu kegiatan dari sekelompok dalam mengadakan usaha kerjasama untuk mencapai tujuan bersama Simon yang dikutip oleh Indradi (2006:117). Dilihat secara teoritis, administrasi publik mempunyai banyak pengembangan dan perubahan. Mengutip dari Indradi (2006:116) menyatakan administrasi publik merupakan pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik, dan hukum untuk memenuhi mandat pemerintah di bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam rangka fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian. Teori tersebut menyatakan bahwa administrasi publik menegaskan pada proses pengelolaan, politik, dan hukum. Administrasi publik juga mempunyai subjek dengan fungsi yang berbeda yaitu pemerintah dengan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Tujuan utama dari penerapan administrasi publik adalah untuk mengatur dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Keban (2004:8) cakupan atau ruang lingkup administrasi publik sangat kompleks tergantung dari perkembangan kebutuhan atau dinamika masalah yang dihadapi masyarakat. Maka dari itu administrasi publik diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar masyarakat. Mengutip dari Chandler dan Plano dalam Keban (2004:3) menjelaskan bahwa administrasi publik sebagai suatu disiplin ilmu bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama di bidang organisasi, berkenaan dengan pengaturan struktur dan hirarki yang merupakan pembuatan unit, pembagian tugas dan penetapan prosedur, aturan untuk mencapai tujuan organisasi. Administrasi publik juga berusaha melakukan penekanan pada pentingnya kegiatan pengelolaan dalam pencapaian sebuah tujuan. Selanjutnya Indradi (2006:116) mengemukakan bahwa administrasi publik berusaha melembagakan praktek-praktek manajemen agar sesuai dengan nilai efektifitas dan efesiensi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik. Hal ini dapat diartikan dalam memenuhi kebutuhan akan masyarakat yang lebih baik, diperlukan kegiatan pengelolaan di semua bidang mulai dari pembuatan kebijakan hingga pelaksanaan program dari kebijakan tersebut oleh setiap Negara.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi publik merupakan keilmuan yang memiliki ruang lingkup cukup luas dan tersebar pada berbagai sektor mewakili seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan

proses pemerintahan. Administrasi publik mengatur segala sesuatu untuk kepentingan publik yang artinya memberikan banyak manfaat untuk publik itu sendiri. Maka dari itu terdapat fungsi-fungsi administrasi yang pada dasarnya untuk diterapkan dalam seluruh pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

## 2. Fungsi Administrasi

Pada dasarnya administrasi berfungsi dalam menentukan tujuan suatu organisasi dan merumuskan kebijakan secara umum. Fungsi yang terdapat pada administrasi bersifat menyeluruh dan berlaku untuk seluruh organisasi. Administrasi memiliki tugas atau kegiatan tertentu dalam suatu proses pelaksanaan yang harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tugas-tugas itulah yang biasa disebut atau diartikan sebagai fungsi administrasi (Siagian, 2014:82).

Beberapa ahli menyatakan pendapatnya mengenai fungsi administrasi. Fungsi administrasi yang disampaikan oleh beberapa ahli terdapat beberapa perbedaan pendapat. Menurut Henry Fayol yang dikutip oleh Siagian (2014:84) mengatakan bahwa fungsi administrasi adalah *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *commanding* (pemberian komando), *coordinating* (pengkoordinasian), dan *controlling* (pengawasan).

Selanjutnya menurut Luther M. Gullick yang dikutip oleh Siagian (2014:84) mengatakan bahwa fungsi administrasi adalah *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *staffing* (pengadaan tenaga kerja), *directing* (pemberian bimbingan), *coordinating* (pengkoordinasian), *reporting* (pelaporan), dan *budgeting* (penganggaran). Rangkaian fungsi ini

lebih dikenal dengan akronimnya “posdcorb”. Sedangkan pendapat George Terry yang dikutip oleh Siagian (2014:85) mengatakan bahwa fungsi administrasi adalah *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (penggerakkan), dan *controlling* (pengawasan). Rangkaian fungsi ini lebih dikenal dengan akronim “poac”.

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli dapat dilihat salah satu fungsi administrasi yang menyajikan secara menyeluruh adalah pendapat dari Luther M. Gullick. Menurut peneliti dalam fungsi POSDCORB telah memaparkan kegiatan administrasi secara keseluruhan, baik itu dari perencanaan sampai penganggaran. Dalam fungsi ini juga terdapat fungsi penganggaran yang secara keseluruhan dapat menyukkseskan proses kegiatan administrasi. Penjelasan lebih lanjut mengenai fungsi POSDCORB dijelaskan sebagai berikut:

a. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan dalam administrasi meliputi seluruh kegiatan yang terdapat dalam suatu organisasi. Rencana yang baik merupakan bagian penting dari proses administrasi dan rencana tersebut akan terlihat setelah dilaksanakan. Perencanaan juga dijadikan sebagai tolak ukur dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Siagian (2014:88) menyatakan bahwa *planning* atau perencanaan merupakan keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Kemudian menurut

Terry (2014:46) menyatakan bahwa perencanaan merupakan pemilihan dan menghubungkan fakta, menggunakan asumsi-asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan memang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sedangkan menurut Pasolong (2011:85) perencanaan adalah suatu proses pengambilan keputusan tentang apa tujuan yang harus dicapai pada kurun waktu tertentu di masa mendatang dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Proses tersebut terdiri atas dua elemen yaitu penetapan tujuan dan menentukan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Maka dari itu jika tidak ada perencanaan dalam suatu kegiatan akan mengakibatkan sulitnya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Suatu perencanaan pasti berorientasi pada masa yang akan datang. Dalam teori administrasi terdapat istilah *planning premises* yang merupakan hal penting berhubungan dengan proses *planning* tersebut. Mengutip dari Siagian (2014:89) terdapat empat premis yang perlu dipegang teguh (atau paling sedikit diingat), yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan, sumber-sumber yang tersedia, atau mungkin tersedia, selalu terbatas sedangkan tujuan yang hendak dicapai tidak pernah terbatas.
- 2) Bahwa suatu organisasi harus selalu memperhatikan kondisi-kondisi serta situasi dalam masyarakat, baik bersifat positif yang berarti mendorong ke arah majunya organisasi, maupun bersifat negatif,

dengan kemungkinan akan menghalangi kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan.

- 3) Bahwa organisasi, tidak dapat melepaskan diri dari beberapa jenis pertanggungjawaban.
- 4) Bahwa manusia yang menjadi anggota organisasi dihadapkan kepada keserbaterbatasan, baik fisik, mental, dan biologis.

Menurut Siagian (2014:90) fungsi perencanaan dapat dilaksanakan dengan baik salah satunya yaitu harus mengetahui sifat-sifat atau ciri-ciri suatu rencana yang baik. Adapun ciri-ciri itu ialah sebagai berikut:

- 1) Rencana harus mempermudah tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
- 2) Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh memahami tujuan organisasi.
- 3) Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mendalami teknik-teknik perencanaan.
- 4) Rencana harus disertai oleh suatu rincian yang teliti.
- 5) Rencana tidak boleh terlepas sama sekali dari pemikiran pelaksanaan.
- 6) Rencana harus bersifat sederhana.
- 7) Rencana harus luwes.
- 8) Di dalam rencana terdapat tempat pengambilan risiko.
- 9) Rencana harus bersifat praktis (pragmatis).
- 10) Rencana harus merupakan *forecasting*.



Apabila suatu organisasi mendalami dengan sungguh-sungguh kesepuluh ciri-ciri rencana yang baik itu dan mencoba menggunakan ciri-ciri itu pada fungsi perencanaannya, maka organisasi tersebut memiliki suatu perencanaan yang baik sehingga tujuan dari organisasinya akan mudah untuk dicapai.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian dalam administrasi merupakan sebagai proses pembentukan suatu organisasi secara menyeluruh. Menurut Siagian (2014:95) mengatakan bahwa pengorganisasian merupakan keseluruhan proses pengelompokkan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Kemudian menurut Pasolong (2011:85) pengorganisasian merupakan suatu proses pembagian kerja yang disertai dengan pendelegasian wewenang. Dari dua definisi tersebut jelas menunjukkan bahwa pengorganisasian merupakan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada setiap orang yang ada di organisasi tersebut dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Melalui fungsi pengorganisasian juga akan menghasilkan suatu organisasi yang dapat diarahkan.

Pengorganisasian sangat identik dengan bentuk struktur organisasi. Menurut Wijayanto (2012:128) struktur organisasi adalah pengelompokkan dan pengorganisasian aktivitas organisasi. Sedangkan menurut

Schermerhorn, J.R yang dikutip oleh Wijayanto (2012:128) struktur organisasi merupakan sistem tugas, hubungan pelaporan dan komunikasi yang dikaitkan secara bersama dalam pekerjaan individual maupun kelompok. Sehingga dalam struktur organisasi tergambar kerangka kerja dimana pimpinan membagi dan mengkoordinasikan aktivitas para anggota organisasi. Struktur organisasi biasanya digambarkan dengan diagram yang menggambarkan basis pengaturan posisi pekerjaan dalam organisasi. Dalam struktur organisasi ini akan tergambar peta garis kewenangan dan komunikasi.

Hasil dalam pelaksanaan fungsi pengorganisasian ini dapat dilihat dalam penciptaan organisasi tersebut baik atau sebaliknya. Menurut Siagian (2014:97) yang dimaksud dengan organisasi yang baik adalah suatu organisasi yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Terdapat tujuan yang jelas.
- 2) Tujuan organisasi harus dipahami oleh setiap orang di dalam organisasi.
- 3) Tujuan organisasi harus diterima oleh setiap orang dalam organisasi.
- 4) Adanya kesatuan arah (*unity of direction*).
- 5) Adanya kesatuan perintah (*unity of command*).
- 6) Adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab seseorang.
- 7) Adanya pembagian tugas (*distribution of work*).
- 8) Struktur organisasi harus disusun sesederhana mungkin.

- 9) Pola dasar organisasi harus relatif permanen.
- 10) Adanya jaminan jabatan (*security of tenure*).
- 11) Imbalan yang diberikan kepada setiap orang harus setimpal dengan jasa yang diberikan.
- 12) Penempatan orang yang sesuai dengan keahliannya (*the right man in the right place*).

c. *Staffing* (Pengadaan Tenaga Kerja)

Pengadaan atau *staffing* merupakan kegiatan selanjutnya dari fungsi organizing atau pengorganisasian. Dalam fungsi pengadaan ini dilakukan kegiatan yang berkaitan dengan masuk, proses, dan keluarnya seluruh pegawai. Menurut Pasolong (2011:85) *staffing* ialah suatu proses untuk memperoleh tenaga yang tepat, baik dalam jumlah maupun kualitas sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dalam organisasi. Kemudian menurut Terry (2014:112) menyatakan bahwa *staffing* merupakan kegiatan merekrut, memilih, mempromosikan, memindahkan dan pengunduran diri dari para anggota manajemen. Dari definisi di atas menyatakan bahwa *staffing* merupakan fungsi administrasi yang mengatur kepegawaian secara menyeluruh, baik dari kegiatan rekrutmen sampai pemberhentiannya. Sedangkan menurut Hasibuan (2014:173) *staffing* terdiri atas:

- 1) Pengadaan (*Procurement*) adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan, baik kualitas maupun kuantitasnya sesuai dengan kebutuhan organisasi. Untuk mendapatkan pegawai yang kualitas dan

kuantitasnya baik, sehingga efektif mengerjakan tugas-tugasnya harus dilakukan dengan cara analisis jabatan. dengan analisis jabatan ini dapat diketahui tugas dan tanggungjawab; syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengisi lowongan pekerjaan; jumlah karyawan yang dibutuhkan; dasar dan prosedur seleksi yang dilakukan.

- 2) Penarikan (*Recruiting*) adalah kegiatan mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang masih kosong. “Mencari” yaitu menetapkan sumber-sumber tenaga kerja yang akan ditarik. “Mempengaruhi” adalah menetapkan cara-cara penarikannya, seperti melalui iklan pada media massa.
- 3) Seleksi (*Selection*) adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau yang ditolak untuk menjadi pegawai organisasi.
- 4) Penempatan (*Placement*) adalah kegiatan untuk menempatkan orang-orang yang telah lulus seleksi pada jabatan-jabatan tertentu sesuai dengan uraian pekerjaan dan klasifikasi-klasifikasi pegawainya.
- 5) Pemberhentian (*Separation*) adalah putusnya hubungan kerja seorang pegawai dengan suatu perusahaan.

Sebagaimana fungsi administrasi lainnya, pengadaan tenaga kerja merupakan fungsi yang tidak kalah penting dari fungsi lainnya. Titik yang menjadi perbedaan antara fungsi ini dengan fungsi lainnya lebih menekankan pada sumber daya manusia yang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Kegiatan yang dilakukan

dalam fungsi pengadaan tenaga kerja diantaranya adalah memilih, mengangkat dan menempatkan beberapa sumber daya manusia yang ikut serta dalam proses pengadaan ini. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa fungsi pengadaan dalam administrasi sangat penting dalam rangka mencapai tujuan suatu organisasi.

d. *Directing* (Pemberian Bimbingan)

Pemberian bimbingan atau *directing* dalam melakukan suatu pekerjaan sangat penting agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Menurut Terry (2014:138) yang dimaksud *directing* ialah suatu kegiatan untuk mengintegrasikan usaha-usaha anggota-anggota dari suatu kelompok, sehingga melalui tugas-tugas mereka dapat terpenuhi tujuan-tujuan pribadi dan kelompoknya. Kemudian menurut Pasolong (2011:85) *directing* merupakan suatu tugas yang berkelanjutan dalam pembuatan keputusan dan penyusunannya dalam aturan-aturan dan intruksi-intruksi khusus atau umum, dan melayani sebagai pemimpin organisasi. Dari dua definisi yang telah dikemukakan menunjukkan bahwa *directing* merupakan suatu pemberian arahan dalam melakukan suatu pekerjaan agar sasaran dan tujuan dari pekerjaan tersebut dapat tercapai.

Suatu pengarahan kepada anggota organisasi dapat berbentuk dalam pemberian bimbingan. Menurut yang dikemukakan oleh Sukarna (1990:76) dalam pembimbingan dan pengamatan (*overseeing*) ini harus dapat menimbulkan daya cipta (*innovation*) dan inisiatif, sehingga timbul teknik-teknik kerja yang baru dalam mempercepat penyelesaian pekerjaan.

Sukarna juga menambahkan dalam *directing* inipun harus dapat mempengaruhi pegawai untuk bekerja sama satu sama lain, mengingat hanya suasana kerja samalah tujuan bersama dapat tercapai. Maka dari itu *directing* juga memerlukan sifat kepemimpinan atau *leadership* yang mampu mengarahkan seluruh tenaga kerja dalam melakukan suatu pekerjaan.

Pelaksanaan kegiatan pemberian bimbingan ini biasanya dilakukan dengan cara pimpinan memberikan suatu bimbingan terkait dengan rangkaian kegiatan yang terdapat pada programnya. Apabila pemberian bimbingan ini disampaikan sesuai dengan kemampuan dari para pegawai, maka pemberian bimbingan tersebut akan memberikan hasil yang dapat memotivasi seluruh pegawai dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang ada.

e. *Coordinating* (Pengkoordinasian)

Koordinasi dalam melaksanakan suatu kegiatan sangat penting agar dapat dilakukan secara serempak dan searah dengan tujuan yang hendak dicapai. Menurut Pasolong (2011:85) pengkoordinasian adalah suatu proses pengintegrasian kegiatan-kegiatan dan target atau tujuan dari berbagai unit kerja dari suatu organisasi agar dapat mencapai tujuan secara efisien. Sedangkan menurut Awaluddin Djamin yang dikutip oleh Hasibuan (2014:86) menyatakan koordinasi adalah suatu usaha kerjasama antar badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi.



Kemudian menurut George R. Terry yang dikutip oleh Hasibuan (2014:85) mengemukakan bahwa pengkoordinasian adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Berdasarkan definisi-definisi tersebut menunjukkan bahwa *coordinating* atau pengkoordinasian merupakan usaha dalam mengatur keseragaman pelaksanaan pekerjaan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan mudah.

Menurut Sukarna (1990:78) koordinasi itu dapat dilakukan secara vertikal yaitu dari atasan terhadap bawahan, tetapi juga secara horizontal, yaitu koordinasi yang dilakukan pada tingkat yang sama baik terhadap pekerjaan yang sejenis ataupun tidak, tetapi berada di luar batas wewenangnya sendiri. Sukarna juga mengemukakan tujuan dari koordinasi yaitu untuk mewujudkan kerjasama yang sebaik-baiknya sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan simultan dan sinkron, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengkoordinasian sangat penting dalam melaksanakan suatu pekerjaan agar dalam prosesnya berjalan secara bersamaan dan sinkron.

f. *Reporting* (Pelaporan)

Pelaporan atau *reporting* berkaitan erat dengan pengkoordinasian atau *coordinating*. Laporan ini sangat penting agar dapat diketahui bagian-bagian pekerjaan yang tidak dapat dilakukan semestinya sehingga dapat



mengganggu secara keseluruhan. Hubungannya dengan coordinating yaitu apabila terdapat suatu gangguan pada bagian pekerjaan, maka koordinasi pekerjaan tidak dapat dilaksanakan. Maka dari itu pelaporan dimaksudkan sebagai alat pengawasan pada pelaksanaan suatu pekerjaan. Menurut Pasolong (2011:85) menyatakan bahwa pelaporan adalah kegiatan eksekutif menyampaikan informasi tentang apa yang sedang terjadi kepada atasannya, termasuk menjadi agar dirinya dan bawahannya tetap mengetahui informasi lewat laporan-laporan, penelitian, dan inpeksi. Fungsi ini kebalikan dari *directing* yang datang dari atasan ke bawahan, melainkan ini dari bawah ke atas. Pelaporan berfungsi dengan pemberian informasi kepada atasan, sehingga yang bersangkutan dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan kerja. Jalur pelaporan dapat bersifat vertikal dan horizontal. Maka dari itu pelaporan merupakan hal penting dalam suatu pekerjaan agar dapat diketahui apa saja yang harus dilakukan oleh atasan maupun bawahan.

g. *Budgeting* (Penganggaran)

Penganggaran atau *budgeting* sangat identik dengan biaya. Biaya merupakan sebuah kunci dari suatu pelaksanaan pekerjaan. Menurut Sukarna (1990:79) mengatakan bahwa *budgeting* merupakan penyusunan dan penetapan anggaran belanja yang diperlukan untuk pelaksanaan *planning*. Kemudian menurut Pasolong (2011:85) *budgeting* merupakan semua kegiatan dalam bentuk perencanaan, perhitungan dan pengendalian anggaran. Berdasarkan dua definisi yang telah dikemukakan menunjukkan bahwa *budgeting* merupakan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan

anggaran atau biaya yang telah disesuaikan dengan perencanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan.

Menurut Mardiasmo (2005:63) anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, alat motivasi, dan menciptakan ruang publik. Penyusunan anggaran belanja yaitu bagaimana uang itu digunakan, untuk keperluan apa, berapa banyaknya, termasuk kepada pos mana, kemudian dari sumber-sumber apa saja keuangan didapat. Penentuan modal dan biaya yang diperlukan untuk suatu pekerjaan yang telah direncanakan dilakukan pada fungsi budgeting ini. *Planning* tanpa budgeting tidak akan dapat dilaksanakan, karena tidak adanya biaya untuk melakukan pekerjaan tersebut.

Menurut Terry (2014:192) anggaran berfungsi sebagai perencanaan dan pengendalian kegiatan. Perencanaan dicakup oleh anggaran dan pelaksanaannya diatur oleh anggaran tersebut. Banyak rencana yang tidak berhasil dalam pelaksanaannya karena kekurangan modal dan biaya. Dengan demikian perencanaan akan sia-sia apabila *budget* tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.

Berdasarkan fungsi administrasi dari Luther M. Gullick yang telah dijelaskan di atas, apabila diterapkan pada seluruh pelaksanaan program ataupun kegiatan pemerintahan akan berjalan dengan baik dan lebih mudah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Khususnya dalam hal pelaksanaan program pembangunan yang output dari program tersebut

akan jelas terlihat. Hal tersebut dikarenakan telah berlangsungnya kegiatan dari proses perumusan perencanaan sampai penganggaran, sehingga dapat meminimalisir kendala-kendala yang dapat terjadi pada saat pelaksanaan.

## **B. Konsep Pembangunan Kawasan Permukiman Kumuh**

### **1. Definisi Pembangunan**

Pembangunan merupakan istilah yang sudah tidak asing bagi setiap warga negara, khususnya pada negara berkembang. Pada saat ini banyak negara yang menjadikan fokus utama kegiatannya untuk pembangunan, karena dianggap dapat memotivasi untuk mencapai keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan. Pembangunan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh banyak orang untuk meningkatkan taraf hidupnya. Menurut Tjokrowinoto dalam Suryono (2004:21) yang menyimpulkan bahwa pembangunan merupakan citra pembangunan dalam perspektif diakronis (pembangunan menurut tahap pertumbuhan dan periode waktu yang dasarnya tidak jelas) yaitu sebagai berikut:

- a. Pembangunan sebagai proses perubahan sosial menuju ketataran kehidupan masyarakat yang lebih baik.
- b. Pembangunan sebagai upaya manusia yang sadar, terencana, dan melembaga.
- c. Pembangunan sebagai proses sosial yang bebas nilai (*value free*).

- d. Pembangunan memperoleh sifat dan konsep transendental, sebagai *metadisciplinary phenomenon*, bahkan memperoleh bentuk sebagai ideologi, *the ideology of developmentalism*.
- e. Pembangunan sebagai konsep yang sarat nilai (*value loaded*) menyangkut proses pencapaian nilai yang dianut suatu bangsa secara makin meningkat.
- f. Pembangunan menjadi *culture spesific*, *situation spesific*, dan *time spesific*.

Lain halnya menurut Siagian yang dikutip oleh Suryono (2004:21) dijelaskan bahwa pembangunan merupakan usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Siagian juga mengemukakan beberapa ide pokok dalam pembangunan yaitu:

- a. Pembangunan merupakan suatu proses;
- b. Pembangunan merupakan suatu usaha yang secara sadar dilaksanakan;
- c. Pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaannya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan;
- d. Pembangunan mengarah kepada modernitas;
- e. Modernitas yang dicapai melalui pembangunan bersifat multi dimensional; dan

- f. Proses dan kegiatan pembangunan ditujukan kepada usaha membina bangsa dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan.

Pengertian-pengertian yang telah dijelaskan di atas menyatakan bahwa pembangunan merupakan suatu proses perubahan menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya yang dilakukan secara sadar dan terencana. Pembangunan dalam kegiatannya dilaksanakan dalam rangka menciptakan kehidupan warga negara yang lebih baik sesuai dengan pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan. Hal lain yang diharapkan dari kegiatan pembangunan adalah terciptanya kondisi lingkungan yang baik dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

## **2. Pembangunan Kawasan Permukiman Kumuh**

Pada hakikatnya manusia pasti membutuhkan tempat untuk tinggal dan berinteraksi dengan yang lainnya. Tempat manusia tinggal bersama dalam satu kawasan biasa disebut dengan permukiman. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman merupakan bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan. Sedangkan mengutip dari Soedarsono dalam Ridho (2001:19) menyatakan bahwa permukiman adalah suatu kawasan perumahan lengkap dengan prasarana lingkungan, prasarana umum, dan fasilitas sosial yang mengandung keterpaduan kepentingan dan keselarasan pemanfaatan sebagai

lingkungan kehidupan. Maka dari itu permukiman merupakan hal yang sangat penting bagi manusia dalam menjalankan suatu kehidupan.

Pembangunan permukiman dengan bertambahnya penduduk yang tinggi menyebabkan tidak seimbangnya antara luasnya kawasan permukiman dengan tingkat kepadatan penduduk. Hal ini nantinya akan berdampak pada munculnya kawasan permukiman kumuh. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Sedangkan mengutip dari Kuswartojo (2005) menyatakan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang padat, kualitas konstruksi rendah, prasarana dan pelayanan minim adalah pengejawantahan kemiskinan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa permukiman kumuh merupakan tempat tinggal yang tidak layak huni atau tidak memenuhi syarat baik itu kondisi rumah, lingkungan, serta sarana dan prasarana.

Langkah yang diambil pemerintah dalam pembangunan kawasan permukiman kumuh melalui program yang telah disusun dalam rangka menciptakan kota yang bebas dari kumuh. Dengan adanya pembangunan kawasan permukiman kumuh diharapkan terpenuhinya kebutuhan manusia akan tempat hunian yang layak serta lingkungan permukiman sehat.

## C. Konsep Program

### 1. Definisi Program

Sebuah Organisasi, Lembaga, ataupun Negara tentu mempunyai suatu program. Program dapat dikatakan sebagai bentuk perencanaan yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah yang muncul akibat ketidaksesuaian teori dengan praktik. Menurut Jones yang dikutip oleh Rohman (2009:101-102) menyebutkan program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Program adalah upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Terdapat tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu:

#### a. Pengorganisasian

Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.

#### b. Interpretasi

Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

#### c. Penerapan atau Aplikasi

Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.

Kemudian definisi program yang tercantum dalam Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional



adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau masyarakat dikoordinasikan oleh instansi. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya program merupakan turunan dari kebijakan yang berisikan serangkaian kegiatan. Rangkaian kegiatan tersebut tersusun dari perencanaan hingga pelaksanaan dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal itu melibatkan partisipasi aktif dari pihak pemerintah, lembaga ataupun masyarakat dalam memudahkan pencapaian tujuan dan sasaran program tersebut.

## **2. Pelaksanaan Program**

Terbentuknya suatu program untuk dilaksanakan dalam rangka mencapai suatu tujuan dan sasaran. Jika program dikaitkan dengan pelaksanaan program, maka dapat dikatakan program merupakan realisasi dari suatu kebijakan. Suatu program hanya rencana bagus di atas kertas apabila perencanaan dengan pelaksanaan program tersebut tidak sesuai atau dapat dikatakan program tersebut tidak dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu pelaksanaan merupakan aspek penting dalam menentukan suatu program telah terlaksana dengan baik atau tidak.

Sebelum suatu program dilaksanakan pasti ada perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan ini berfungsi untuk memberikan arah ataupun cara dalam mencapai tujuan program tersebut dengan baik. Mengutip dari Zauhar (1993:4) membagi perencanaan ke dalam beberapa tahap, yaitu:

a. Tahap Konseptualisasi

Tahap awal pengelolaan suatu program selalu dimulai dengan konseptualisasi dan identifikasi. Dalam tahap konseptualisasi, ide yang telah terkonsep akan melalui proses yang panjang dan perlu ditindaklanjuti dalam bentuk pembicaraan resmi, yang akhirnya tertuang dalam bentuk usulan tertulis.

b. Tahap Studi Kelayakan

Tujuan dari studi kelayakan adalah untuk mengetahui sejauh mana konsep ide itu penting dan logis untuk dilaksanakan yang dapat dinilai dari efisiensi tenaga, waktu, dan biaya yang harus dikeluarkan dalam pelaksanaannya.

c. Tahap Desain

Jika studi kelayakan sudah dianggap cukup, maka langkah selanjutnya adalah tahap desain. Di dalam desain inilah akan tergambar rincian yang lebih detail dari suatu program. Program harus memenuhi persyaratan antara lain teknis, ekonomis dan finansial, sosial dan politik.

d. Tahap Persiapan Pelaksanaan

Dalam tahap persiapan pelaksanaan semua hal yang berhubungan dengan proses pelaksanaan suatu program perlu diperhitungkan. Seperti dalam hal sumber daya manusia yaitu kepegawaiannya, peralatan, perlengkapan, pendanaan, dan semua yang terkait dengan program tersebut.

Menurut United Nation yang dikutip oleh Zauhar (1993:1) bahwa suatu program dapat terlaksana dengan baik apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Tujuan yang dirumuskan jelas.
- b. Penentuan dari peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan.
- c. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten dan atau proyek-proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program secara selektif.
- d. Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan-keuntungan yang diharapkan akan hasil dari program tersebut.
- e. Hubungan dengan kegiatan lain dalam usaha pembangunan tidak berdiri sendiri.
- f. Berbagai upaya di bidang manajemen termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut.

Suatu proses pelaksanaan program dalam mencapai tujuannya perlu dilakukan kegiatan monitoring agar dapat diketahui program tersebut sudah berjalan dengan baik atau sebaliknya. Seperti yang dikemukakan oleh Zauhar (1993:11) bahwa monitoring sebagai perangkat kegiatan yang dilakukan untuk mengikuti, mengamati dan melacak jalannya pelaksanaan program dan proyek pembangunan dengan menggunakan sistem pelaporan dan tujuan langsung ke lokasi agar memperoleh data dan informasi yang jelas serta menghimpun masalah yang ada untuk dijadikan alternatif pemecahan sebagai input penyempurnaan. Tahapan yang terakhir setelah dilakukannya kegiatan monitoring adalah kegiatan evaluasi program. Menurut Zauhar (1993:16) evaluasi sebagai proses pengukuran atau pengenalan yang berusaha untuk menentukan mengapa kejadian dalam pelaksanaan tingkat keluaran belum atau tercapai. Selanjutnya dijelaskan juga bahwa tujuan pokok evaluasi adalah status akhir proyek yang akan menjadi landasan untuk meningkatkan kebijaksanaan tentang proyek atau program pembangunan berikutnya. Dalam

artian bahwa evaluasi akan dijadikan sebagai acuan dan juga bahan rujukan dalam pengambilan keputusan dalam rangka untuk memperbaiki sebuah program.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program merupakan penerapan suatu program yang sudah direncanakan dengan matang sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar mendapatkan gambaran dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditentukan. Dalam proses pelaksanaan program juga harus disertakan kegiatan monitoring untuk memantau jalannya program tersebut.

### **3. Program Kota Tanpa Kumuh**

#### **a. Pengertian Program Kota Tanpa Kumuh**

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten/kota di 34 Provinsi yang menjadi “platform kolaborasi” atau basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan permukiman kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat. KOTAKU diharapkan menjadi “platform kolaborasi” yang mendukung penanganan permukiman kumuh seluas 35.291 Ha yang dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia

melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, penguatan kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar di tingkat kota maupun masyarakat, serta pendampingan teknis untuk mendukung tercapainya sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu kota tanpa kumuh. (Pedoman Umum Program KOTAKU, 11 Oktober 2017 : 02 – 03)

b. Tujuan Program Kota Tanpa Kumuh

Tujuan program adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Tujuan tersebut dicapai melalui tujuan antara sebagai berikut:

- 1) Menurunnya luas permukiman kumuh;
- 2) Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat kabupaten/kota dalam penanganan permukiman kumuh yang berfungsi dengan baik;
- 3) Tersusunnya rencana penanganan permukiman kumuh tingkat kabupaten/kota dan tingkat masyarakat yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- 4) Meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh; dan

- 5) Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh.

Pencapaian tujuan program dan tujuan antara diukur dengan merumuskan indikator kinerja keberhasilan dan target capaian program yang akan berkontribusi terhadap tercapainya sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yaitu pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen. Secara garis besar pencapaian tujuan diukur dengan indikator “outcome” sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada permukiman kumuh sesuai dengan kriteria permukiman kumuh yang ditetapkan (a.l drainase; air bersih/minum; pengelolaan persampahan; pengelolaan air limbah; pengamanan kebakaran; Ruang Terbuka Publik);
- 2) Menurunnya luasan permukiman kumuh karena akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang lebih baik;
- 3) Terbentuk dan berfungsinya kelembagaan yaitu Pokja PKP di tingkat kabupaten/kota untuk mendukung program KOTAKU;
- 4) Penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di permukiman kumuh; dan
- 5) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan mendorong penghidupan berkelanjutan di wilayah kumuh. (Pedoman Umum Program KOTAKU, 11 Oktober 2017 : 03 – 05)

### c. Strategi dan Prinsip Program Kota Tanpa Kumuh

#### 1) Strategi Dasar

Kolaborasi seluruh pelaku pembangunan dalam penanganan permukiman kumuh.

#### 2) Strategi Operasional

Strategi operasional dalam penyelenggaraan program adalah sebagai berikut:

- i. Menyelenggarakan penanganan permukiman kumuh melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh;
- ii. Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kelembagaan yang mampu berkolaborasi dan membangun jejaring penanganan permukiman kumuh mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat masyarakat;
- iii. Menerapkan perencanaan partisipatif dan penganggaran yang terintegrasi dengan multi-sektor dan multi-aktor;
- iv. Memastikan rencana penanganan permukiman kumuh dimasukkan dalam agenda RPJM Daerah dan perencanaan formal lainnya;
- v. Memfasilitasi kolaborasi dalam pemanfaatan produk data dan rencana yang sudah ada, termasuk dalam penyepakatan data dasar (baseline) permukiman yang akan dijadikan acuan bersama dalam perencanaan dan pengendalian;
- vi. Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar lingkungan yang terpadu dengan sistem kota;



- vii. Mengembangkan perekonomian lokal sebagai sarana peningkatan penghidupan berkelanjutan;
- viii. Advokasi kepastian bermukim bagi masyarakat berpenghasilan rendah kepada semua pelaku kunci; dan\
- ix. Memfasilitasi perubahan sikap dan perilaku pemangku kepentingan dalam menjaga lingkungan permukiman agar layak huni dan berkelanjutan. (Pedoman Umum Program KOTAKU, 11 Oktober : 05 – 06)

### 3) Prinsip

Prinsip dasar yang diterapkan dalam pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh adalah:

#### i. Pemerintah daerah sebagai Nakhoda

Pemerintah daerah dan pemerintah kelurahan/desa memimpin kegiatan penanganan permukiman kumuh secara kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan baik sektor maupun aktor di tingkatan pemerintahan serta melibatkan masyarakat dan kelompok peduli lainnya.

#### ii. Perencanaan komprehensif dan berorientasi outcome (pencapaian tujuan program)

Penataan permukiman diselenggarakan dengan pola pikir yang komprehensif dan berorientasi pencapaian tujuan terciptanya permukiman layak huni sesuai visi kabupaten/kota yang

berkontribusi pada pencapaian target nasional yaitu mencapai 0 ha permukiman kumuh pada 5 tahun mendatang (2019).

iii. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran

Rencana penanganan permukiman kumuh merupakan produk Pemerintah Daerah sehingga mengacu pada visi kabupaten/kota dalam RPJMD. Rencana penanganan permukiman kumuh terintegrasi dengan perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten/kota dimana proses penyelenggaraan disesuaikan dengan siklus perencanaan dan penganggaran. Rencana penanganan permukiman kumuh di tingkat kabupaten/kota mengakomodasi rencana di tingkat masyarakat, yang diikuti dengan integrasi penganggaran mulai dari Pemerintah Provinsi, Pemkab/ Pemkot hingga pemerintah desa dan kecamatan.

iv. Partisipatif

Pembangunan partisipatif dengan memadukan perencanaan dari atas (top-down) dan dari bawah (bottom-up) sehingga perencanaan di tingkat masyarakat akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan yang lebih makro/tingkat kota.

v. Kreatif dan Inovatif

Prinsip kreatif dalam penanganan permukiman kumuh adalah upaya untuk selalu mengembangkan ide-ide dan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang yang sangat dibutuhkan dalam penanganan permukiman kumuh untuk mewujudkan kesejahteraan

bersama dan menciptakan lingkungan permukiman yang layak huni.

- vi. Pengelolaan Lingkungan dan Sosial yang menjamin keberlanjutan program investasi KOTAKU harus memuat prinsip pembangunan yang berkelanjutan, sehingga dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya perlu diterapkan prinsip dan prosedur tertentu yang mengacu pada Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Program KOTAKU.
- vii. Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (*good governance*)  
Prinsip ini menjadikan kegiatan penanganan permukiman kumuh sebagai pemicu dan pemacu untuk membangun kapasitas pemerintah daerah pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat, agar mampu melaksanakan dan mengelola pembangunan wilayahnya secara mandiri, dengan menerapkan tata kelola yang baik (*good governance*).
- viii. Investasi penanganan permukiman kumuh disamping harus mendukung perkembangan kota juga harus mampu meningkatkan kapasitas dan daya dukung lingkungan.
- ix. Revitalisasi peran BKM, penajaman peran BKM dari orientasi penanggulangan kemiskinan kepada orientasi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh. (Pedoman Umum Program KOTAKU, 11 Oktober : 06 – 07)

#### d. Cakupan Program Kota Tanpa Kumuh

##### 1) Komponen

Program KOTAKU terdiri dari komponen-komponen berikut dalam rangka pencapaian tujuannya:

- a) Pengembangan kelembagaan, strategi dan kebijakan;
- b) Pengembangan kapasitas untuk pemerintah daerah dan masyarakat termasuk dukungan untuk perencanaan penanganan permukiman kumuh yang terintegrasi;
- c) Pendanaan Investasi untuk infrastruktur dan pelayanan perkotaan, yang terdiri dari:
  - i. Infrastruktur skala kawasan dan skala kab/kota, termasuk dukungan pusat pengembangan usaha di kabupaten/kota terpilih.
  - ii. Pembangunan Kawasan Permukiman Baru untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
  - iii. Infrastruktur skala lingkungan, termasuk dukungan pengembangan penghidupan berkelanjutan.
- d) Dukungan pelaksanaan dan bantuan teknis; dan
- e) Dukungan program/kegiatan lainnya, termasuk dukungan untuk kondisi darurat bencana. (Pedoman Umum Program KOTAKU, 11 Oktober 2017 : 08)

##### 2) Penanganan Permukiman Kumuh

Sesuai dengan tujuan program, penanganan permukiman kumuh yang dimaksud dalam Program KOTAKU tidak hanya mengatasi

kekumuhan yang sudah ada, namun juga untuk mencegah tumbuhnya kekumuhan baru. Cakupan kerja penanganan permukiman kumuh dalam Program KOTAKU berdasarkan kondisi kualitas permukiman yang ada dapat dibedakan menjadi tiga pola penanganan, yang mengacu kepada Undang-Undang No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu:

b) Pencegahan

Tindakan pencegahan kumuh dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh baru. Tindakan pencegahan meliputi pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat. Pengawasan dan pengendalian dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan (misal: izin prinsip, izin lokasi, izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan), standar teknis, dan kelaikan fungsi melalui pemeriksaan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberdayaan dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui pendampingan dan pelayanan informasi.

c) Peningkatan

Kualitas Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dilaksanakan melalui pola-pola penanganan, antara lain pemugaran, peremajaan, dan permukiman kembali (perhatikan

ketentuan khusus terkait konsolidasi tanah dan pemukiman kembali pada Kerangka Kerja Pengelolaan Dampak Sosial dan Lingkungan atau dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Dampak Sosial).

d) Pengelolaan

- i. Pengelolaan dilakukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan;
- ii. Pengelolaan dilakukan oleh masyarakat secara swadaya;
- iii. Pengelolaan oleh masyarakat difasilitasi oleh pemerintah daerah baik dukungan pendanaan untuk pemeliharaan maupun penguatan kapasitas masyarakat untuk melaksanakan pengelolaan; dan
- iv. Pengelolaan oleh pemerintah daerah dengan berbagai sumber pendanaan. Aspek yang ditangani mencakup seluruh aspek yang diidentifikasi sebagai gejala dan penyebab kumuh, baik dari aspek sosial, ekonomi, fisik lingkungan, maupun aspek legal yang bertujuan untuk pencapaian visi kota tanpa kumuh. (Pedoman Umum Program KOTAKU, 11 Oktober 2017 : 08 - 09)

3) Lokasi

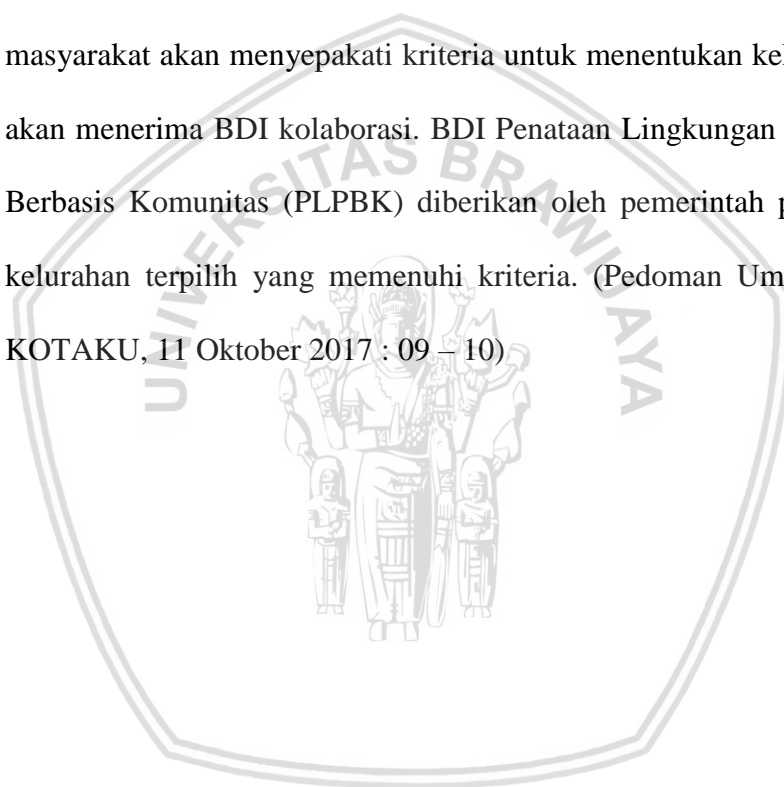
Program kotaku dilaksanakan di 271 kabupaten/kota di 34 Propinsi di seluruh Indonesia. Cakupan lokasi program berdasarkan kategori kegiatan adalah sebagai berikut:

- a) Kegiatan peningkatan kualitas permukiman dilaksanakan di seluruh kawasan teridentifikasi kumuh yang diusulkan kabupaten/kota. Khusus untuk perbaikan infrastruktur tingkat kota (infrastruktur primer dan sekunder), dukungan investasi dari pemerintah pusat hanya akan diberikan kepada kabupaten/kota terpilih, yang memenuhi kriteria tertentu.
- b) Kegiatan pencegahan kumuh dilaksanakan di seluruh kelurahan dan atau kawasan/kecamatan Perkotaan diluar kelurahan/desa kawasan yang teridentifikasi kumuh termasuk lokasi kawasan permukiman potensi rawan kumuh yang diidentifikasi pemerintah kabupaten/kota.
- c) Kegiatan pengembangan penghidupan berkelanjutan dilakukan di semua lokasi peningkatan kualitas maupun pencegahan kumuh.
- d) Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase-2 (NUSP-2) dilaksanakan di 20 kota/kabupaten terpilih.

Seleksi Kabupaten/kota untuk memperoleh dukungan investasi infrastruktur tingkat kota akan dipilih Kabupaten/Kota dari kriteria karakteristik penduduk, luas permukiman kumuh, kebutuhan akses terhadap infrastruktur dasar dan pelayanan dasar dan komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan penanganan perumahan dan permukiman kumuh. Adapun tata cara seleksi diatur secara terpisah dalam surat Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya.



Kegiatan peningkatan kualitas dan pencegahan permukiman kumuh di tingkat kelurahan didukung oleh dana stimulan yang akan dialokasikan melalui Bantuan dana Investasi (BDI) kolaborasi dan PLPBK. BDI kolaborasi diberikan kepada kabupaten/kota terpilih namun dana BDI dicairkan langsung ke kelurahan sesuai Petunjuk Teknis Pencairan dan Pemanfaatan Bantuan Dana Investasi. Pemda dan masyarakat akan menyepakati kriteria untuk menentukan kelurahan yang akan menerima BDI kolaborasi. BDI Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) diberikan oleh pemerintah pusat kepada kelurahan terpilih yang memenuhi kriteria. (Pedoman Umum Program KOTAKU, 11 Oktober 2017 : 09 – 10)



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yang artinya penelitian ini lebih ditekankan pada makna dan proses daripada hasil suatu kegiatan. Penelitian ini juga untuk menunjang tercapainya tujuan dari suatu penelitian yang bersifat sistematis dan faktual. Menurut Kirk dan Miller yang dikutip oleh Moleong (2014:4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia, baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

Karakteristik penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Biklen dalam Sugiyono (2014:15) adalah sebagai berikut:

1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci;
2. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka;
3. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau *outcome*;
4. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif;
5. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna (data dibalik yang teramati).

Adapun beberapa ciri-ciri dalam sebuah penelitian kualitatif menurut Erickson yang dikutip oleh Sugiyono (2014:16) adalah metode penelitian kualitatif itu dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif

terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail. Berdasarkan karakteristik dan ciri-ciri yang telah dijelaskan, dapat diketahui bahwa penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini dipilih untuk mendeskripsikan dan menjelaskan keadaan atau fenomena secara menyeluruh berkenaan dengan pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam persektif fungsi administrasi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang dan di Kelurahan Gading Kasri Kota Malang.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini bertujuan untuk menentukan fokus pada suatu penelitian dengan memutuskan objek perhatian dan mempersempit objek yang diteliti. Menurut Spradley dalam Sugiyono (2014:288) menyatakan bahwa fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa dominan yang terkait dari situasi sosial. Penentuan fokus dalam penelitian kualitatif didasarkan atas tingkat kebaruan informasi yang didapat dari situasi sosial yang berupaya untuk memahami secara lebih luas dan mendalam tentang situasi sosial tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka dalam penelitian ini yang menjadi fokus peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program kota tanpa kumuh dalam perspektif fungsi administrasi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang dan di Kelurahan Gading Kasri Kota Malang, dilihat dari:

- a. Perencanaan (*Planning*) program kota tanpa kumuh, dalam penelitian ini diamati meliputi aspek rencana penataan lingkungan permukiman (RPLP).
  - b. Pengorganisasian (*Organizing*) program kota tanpa kumuh, dalam penelitian ini diamati meliputi aspek struktur organisasi pegawai.
  - c. Pengadaan Tenaga Kerja (*Staffing*) program kota tanpa kumuh, dalam penelitian ini diamati meliputi aspek manajemen kepegawaian.
  - d. Pemberian Bimbingan (*Directing*) program kota tanpa kumuh, dalam penelitian ini diamati meliputi aspek aktor pemberi bimbingan dan aktor penerima bimbingan.
  - e. Pengkoordinasian (*Coordinating*) program kota tanpa kumuh, dalam penelitian ini diamati meliputi aspek rapat koordinasi antar *stakeholder* terkait.
  - f. Pelaporan (*Reporting*) program kota tanpa kumuh, dalam penelitian ini diamati meliputi aspek laporan pertanggung jawaban.
  - g. Penganggaran (*Budgeting*) program kota tanpa kumuh, dalam penelitian ini diamati meliputi aspek penyusunan anggaran biaya.
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan program kota tanpa kumuh dalam perspektif fungsi administrasi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang dan di Kelurahan Gading Kasri Kota Malang, dilihat dari:
- a. Faktor pendukung
    - 1) Faktor Internal

- a) Adanya Peraturan Menteri PUPR Nomor 02/PRT/M/2016 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai payung hukum.
  - b) Peran pemerintah daerah.
- 2) Faktor Eksternal
- a) Adanya partisipasi masyarakat.
  - b) Bantuan dana investasi (BDI).
- b. Faktor penghambat
- 1) Faktor Internal
- a) Kurangnya partisipasi dalam kepengurusan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).
  - b) Tuntutan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan bidangnya.
- 2) Faktor Eksternal
- a) Perbedaan pendapat antar masyarakat.
  - b) Peran Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

### **C. Lokasi dan Situs Penelitian**

Lokasi penelitian ditujukan untuk memilih lokasi dimana peneliti akan melaksanakan penelitian terhadap objek yang diteliti dalam mendapatkan data dan juga informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Kota Malang. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan atas fokus penelitian dan juga dikarenakan Kota Malang merupakan salah satu kota yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tergolong tinggi, sehingga

karakteristik permasalahan yang terjadi akan sangat kompleks terutama dalam masalah timbulnya kawasan permukiman kumuh.

Sedangkan yang dimaksud dengan situs penelitian yaitu tempat dimana peneliti akan melihat sendiri keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti, sehingga data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan sesuai dengan fokus penelitian dapat diperoleh. Penentuan situs penelitian bertujuan untuk memudahkan penetapan lokus agar tidak terlalu luas. Adapun situs penelitian ini yaitu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang dan Kelurahan Gading Kasri Kota Malang. Pemilihan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang dan Kelurahan Gading Kasri Kota Malang sebagai objek peneliti dikarenakan pada lokasi-lokasi tersebut terdapat data dan informasi yang akurat dan relevan berkenaan dengan pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam perspektif fungsi administrasi.

#### **D. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data mempunyai peranan yang penting dalam suatu penelitian, bahkan dapat dikatakan sebagai salah satu inti dari apa yang diteliti. Menurut Lofland dan Lofland yang dikutip oleh Moleong (2014:157) menyatakan bahwa sumber data utama penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berdasarkan pernyataan tersebut sumber data dapat diklasifikasikan menjadi:

### 1. Kata-kata dan tindakan

Kata-kata maupun tindakan orang-orang yang diamati maupun diwawancari merupakan data utama. Sumber data utama tersebut dicatat dan dijadikan catatan tertulis maupun dapat pula melalui perekaman video, *tape recorder*, pengambilan foto, atau film. Berbagai data tersebut dapat diperoleh dari *merger* kegiatan mengamati, mendengar, dan bertanya. Kegiatan-kegiatan tersebut harus dilakukan secara sadar dan terarah karena memang telah direncanakan oleh peneliti.

### 2. Sumber Tertulis

Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku, majalah ilmiah, koran, sumber dari arsip, dokumen pribadi, maupun dokumen resmi.

### 3. Foto

Foto akan sangat bermanfaat bagi peneliti. Karena foto dapat dijadikan bukti nyata dalam pelaksanaan penelitian dan data yang dapat diperoleh lebih relevan. Foto digunakan sebagai data atau sebagai pendorong dalam upaya menghasilkan data, dengan kata lain, foto digunakan sebagai pelengkap pengambilan data terhadap cara dan teknik lainnya.

### 4. Data Statistik

Pada penelitian kualitatif sering pula menggunakan data statistik yang telah tersedia sebagai sumber data tambahan bagi keperluannya.

Berdasarkan sumber data yang telah diuraikan oleh peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti membagi data menjadi dua bagian, yaitu:



1. Data Primer adalah data yang didapat secara langsung dan bersumber dari lapangan penelitian. Sumber tersebut didapat dari pihak terkait sebagai informan dalam objek penelitian. Data yang didapat berupa jawaban langsung atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh peneliti melalui wawancara. Data primer merupakan pendapat-pendapat yang bersifat objektif, karena berupa persepsi pribadi yang disampaikan langsung kepada peneliti. Adapun data primer dengan sumber data yang terdiri dari:

- a. Kepala Seksi Perumahan dan Permukiman Bidang Perumahan dan Pertanahan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang.
- b. Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Gading Kasri, Kota Malang.
- c. Koordinator Tim Koordinator Kota Program KOTAKU, Kota Malang.
- d. Masyarakat di Kelurahan Gading Kasri, Kota Malang.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari dokumen-dokumen, arsip-arsip, buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan fokus penelitian. Adapun sumber data sekunder yang digunakan adalah:

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- b. Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- c. Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh.

- d. Surat Keputusan Walikota No. 86 Tahun 2015.
- e. Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- f. Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Gading Kasri.
- g. Laporan Pertanggung Jawaban Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Gading Kasri tahun 2016 & tahun 2017.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Data merupakan salah satu faktor pendukung utama dalam suatu penelitian. Menurut Sugiyono (2014:308) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Untuk mendapatkan data yang valid dan relevan dalam penelitian, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

#### **1. Observasi**

Metode ini adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lapangan. Menurut Spradley dalam Sugiyono (2014:313) mengatakan bahwa objek dalam penelitian kualitatif yang diobservasi dinamakan situasi sosial yang terdiri dari tiga komponen yaitu:

- a. *Place*, atau tempat dimana interaksi dalam situasi sosial sedang berlangsung;
- b. *Actor*, pelaku atau orang-orang yang sedang memainkan peran tertentu;

- c. *Activity*, atau kegiatan yang dilakukan oleh aktor dalam situasi sosial yang sedang berlangsung.

Pada penelitian ini observasi dilakukan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang dan Kelurahan Gading Kasri Kota Malang untuk mengetahui pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam perspektif fungsi administrasi dan siapa saja *stakeholder* yang berperan dalam rangkaian kegiatan pada program KOTAKU di Kelurahan Gading Kasri.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Esterbeg dalam Sugiyono, 2014:316). Salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi ataupun ungkapan kepada orang yang diteliti seputar mengenai pendapat dan keinginannya. Dalam bentuk yang paling sederhana, wawancara terdiri dari beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan oleh peneliti dan disampaikan kepada seseorang mengenai fokus penelitian secara tatap muka dan peneliti merekam jawaban-jawaban yang telah disampaikan.

Pada penelitian ini wawancara dilakukan untuk mendapatkan jawaban secara langsung dari narasumber pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam perspektif fungsi administrasi. Kegiatan wawancara ini dilaksanakan pada waktu yang tepat untuk memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya dan dapat mengungkap terkait dengan pelaksanaan program KOTAKU di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota

Malang dan di Kelurahan Gading Kasri Kota Malang dalam perspektif fungsi administrasi.

Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bapak Drs. Mochammad Jusuf, selaku Kepala Seksi Perumahan dan Permukiman, Bidang Perumahan dan Pertanahan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang.
- b. Ibu Dra. Dewi Nurjannah, MM. AFP selaku Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat, Kelurahan Gading Kasri, Kota Malang.
- c. Bapak Winardi, S.E selaku Koordinator Tim Koordinator Kota Program KOTAKU, Kota Malang.
- d. Bapak Joko Santoso, selaku perwakilan dari masyarakat Kelurahan Gading Kasri dan Ketua RT 11 RW 03 Kelurahan Gading Kasri, Kota Malang.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen atau arsip-arsip mengenai pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Gading Kasri. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya Undang-Undang, Peraturan Menteri, Pedoman Umum, Renstra, Laporan dan lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan program KOTAKU. Sedangkan dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto terkait dengan pelaksanaan program KOTAKU.

## F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian, sehingga kegiatan penelitian dapat berjalan dengan baik dan lancar. Instrumen penelitian juga digunakan untuk mendapatkan atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Adapun instrumen penelitian dalam penelitian ini, terdiri dari:

1. Peneliti, dalam penelitian kualitatif peneliti menjadi instrumen utama dalam pengumpulan data khususnya pada kegiatan wawancara dan analisis data. Seperti yang diungkapkan oleh Sugiyono (2014:305) dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Maka dari itu selama melakukan proses penelitian, peneliti tidak pernah diwakili oleh orang lain, dan selalu melakukannya sendiri baik wawancara maupun observasi. Sehingga semua data yang diperoleh di lapangan peneliti benar-benar memahami.
2. Pedoman wawancara (interview guide), hal ini berfungsi untuk membatasi dan mengarahkan peneliti dalam mencari data-data yang diperlukan guna kegiatan penelitian. Sebelum melakukan wawancara peneliti membuat pedoman wawancara untuk mengetahui data apa yang diinginkan baik untuk memulai pencarian data, maupun memperdalam data yang sudah didapatkan sebelumnya. Instrumen ini berupa daftar pertanyaan yang disusun oleh peneliti untuk memudahkan dan mengarahkan jalannya wawancara agar sesuai dengan fokus penelitian.

3. Perangkat penunjang, dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penunjang. Diantaranya yaitu alat rekaman dan foto melalui *handphone* peneliti, serta buku saku kecil.

## G. Analisis Data

Peneliti melakukan penelitian ini dikarenakan peneliti ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sedang muncul di benak peneliti, dan juga untuk menjawab dan mengungkapkan fenomena sosial. Oleh karena itu dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian, maka peneliti harus mengadakan analisis data terhadap data yang diperoleh. Hal ini seperti yang disampaikan oleh (Sugiyono, 2014:244):

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisa data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data kualitatif dengan berdasarkan model interaktif oleh Miles, Huberman, dan Saldana. Adapun komponen-komponen analisis dalam model interaktif ini digambarkan sebagai berikut:





peneliti. Sedangkan data yang berupa dokumen dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan data penelitian yang bersumber dari dokumen resmi milik Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang dan Kelurahan Gading Kasri Kota Malang.

## 2. *Data Condensation* / Kondensasi Data

Pada tahap ini merupakan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan atau merubah data yang telah ditemukan di lapangan berdasarkan catatan lapangan, hasil wawancara, dokumen, dan fakta di lapangan. Kondensasi data ini bertujuan untuk lebih memfokuskan data-data yang telah didapatkan melalui proses pengumpulan data. Data ini dapat berupa data hasil wawancara dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang dan Kelurahan Gading Kasri Kota Malang yang kemudian dirangkum dengan tujuan mempermudah dalam membuat laporan penelitian tanpa menghilangkan data. Dengan kondensasi data, data akan menjadi lebih kuat.

## 3. *Data Display* / Penyajian Data

Penyajian data adalah tahapan yang penting dalam kegiatan analisis. Dengan melakukan penyajian data, peneliti dapat memahami suatu fenomena yang terjadi dan tindakan yang seharusnya dilakukan. Bentuk penyajian yang digunakan adalah bentuk teks naratif. Pada tahap ini, peneliti menyajikan data penelitian yang telah selesai melalui tahap kondensasi data. Data disajikan sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan, sehingga kegiatan penelitian dapat fokus dan mempermudah

dalam analisis data. Penyajian data ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu gambaran umum dan penyajian data fokus penelitian. Gambaran umum berisikan gambaran terkait lokasi dan situs penelitian. Diantaranya adalah Kota Malang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang, dan Kelurahan Gading Kasri Kota Malang. Sedangkan penyajian data fokus penelitian menyajikan data yang telah dikondensasikan berdasarkan fokus penelitian.

4. *Drawing and Verifying Conclusion* / Menggambarkan dan Memverifikasi Kesimpulan

Penarikan kesimpulan juga perlu diverifikasi selama penelitian berlangsung. Dengan kata lain, makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya, yaitu merupakan validitasnya. Pada tahap ini setelah proses penyajian data dilakukan, peneliti menarik kesimpulan tentang pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh dalam perspektif fungsi administrasi di Kelurahan Gading Kasri Kota Malang. Penarikan kesimpulan ini adalah hasil dari analisis data berdasarkan pada beberapa teori yang sudah dipaparkan peneliti di tinjauan pustaka.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

##### 1. Kota Malang

###### a. Sejarah Kota Malang

Kota Malang seperti kota-kota lain di Indonesia pada umumnya baru tumbuh dan berkembang setelah hadirnya pemerintah kolonial Belanda. Fasilitas umum di rencanakan sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan keluarga Belanda. Kesan diskriminatif itu masih berbekas hingga sekarang. Misalnya Ijen Boulevard kawasan sekitarnya. hanya dinikmati oleh keluarga- keluarga Belanda dan Bangsa Eropa lainnya, sementara penduduk pribumi harus puas bertempat tinggal di pinggiran kota dengan fasilitas yang kurang memadai. Kawasan perumahan itu sekarang sebagai monumen yang menyimpan misteri dan seringkali mengundang keluarga-keluarga Belanda yang pernah bermukim disana untuk bernostalgia.

Pada Tahun 1879, di Kota Malang mulai beroperasi kereta api dan sejak itu Kota Malang berkembang dengan pesatnya. Berbagai kebutuhan masyarakatpun semakin meningkat terutama akan ruang gerak melakukan berbagai kegiatan. Akibatnya terjadilah perubahan tata guna tanah, daerah yang terbangun bermunculan tanpa terkendali. Perubahan fungsi lahan mengalami perubahan sangat pesat, seperti dari fungsi pertanian menjadi perumahan dan industri.

Sejalan perkembangan tersebut di atas, urbanisasi terus berlangsung dan kebutuhan masyarakat akan perumahan meningkat di luar kemampuan pemerintah, sementara tingkat ekonomi urbanis sangat terbatas, yang selanjutnya akan berakibat timbulnya perumahan-perumahan liar yang pada umumnya berkembang di sekitar daerah perdagangan, di sepanjang jalur hijau, sekitar sungai, rel kereta api dan lahan-lahan yang dianggap tidak bertuan. Selang beberapa lama kemudian daerah itu menjadi perkampungan, dan degradasi kualitas lingkungan hidup mulai terjadi dengan segala dampak bawaannya. Gejala-gejala itu cenderung terus meningkat, dan sulit dibayangkan apa yang terjadi seandainya masalah itu diabaikan.

#### 1) Penduduk dan Sosiologi

##### a) Jumlah

Kota Malang memiliki luas 110.06 Km<sup>2</sup>. Kota dengan jumlah penduduk sampai tahun 2010 sebesar 820.243 jiwa yang terdiri dari 404.553 jiwa penduduk laki-laki, dan penduduk perempuan sebesar 415.690 jiwa. Kepadatan penduduk kurang lebih 7.453 jiwa per kilometer persegi. Tersebar di 5 Kecamatan (Klojen = 105.907 jiwa, Blimbing = 172.333 jiwa, Kedungkandang = 174.447 jiwa, Sukun = 181.513 jiwa, dan Lowokwaru = 186.013 jiwa). Terdiri dari 57 Kelurahan, 536 unit RW dan 4.011 unit RT.

#### b) Pendatang

Kebanyakan pendatang adalah pedagang, pekerja dan pelajar / mahasiswa yang tidak menetap dan dalam kurun waktu tertentu kembali ke daerah asalnya. Sebagian besar berasal dari wilayah disekitar Kota Malang untuk golongan pedagang dan pekerja. Sedang untuk golongan pelajar/mahasiswa banyak yang berasal dari luar daerah (terutama wilayah Indonesia Timur) seperti Bali, Nusa Tenggara, Timor Timur, Irian Jaya, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan.

#### b. Keadaan Geografis Kota Malang

Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440 – 667 meter diatas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak  $112,06^{\circ}$  –  $112,07^{\circ}$  Bujur Timur dan  $7,06^{\circ}$  –  $8,02^{\circ}$  Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara: Kecamatan Singosari dan Kec. Karangploso Kabupaten Malang.
- 2) Sebelah Timur: Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.
- 3) Sebelah Selatan: Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.

- 4) Sebelah Barat: Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

Keadaan tanah di wilayah Kota Malang antara lain:

- 1) Bagian selatan termasuk dataran tinggi yang cukup luas, cocok untuk industri.
- 2) Bagian utara termasuk dataran tinggi yang subur, cocok untuk pertanian.
- 3) Bagian timur merupakan dataran tinggi dengan keadaan kurang subur.
- 4) Bagian barat merupakan dataran tinggi yang amat luas menjadi daerah pendidikan.

Jenis tanah di wilayah Kota Malang ada 4 macam, antara lain:

- 1) Alluvial kelabu kehitaman dengan luas 6,930,267 Ha.
- 2) Mediteran coklat dengan luas 1.225.160 Ha.
- 3) Asosiasi latosol coklat kemerahan grey coklat dengan luas 1.942.160 Ha.
- 4) Asosiasi andosol coklat dan grey humus dengan luas 1.765,160 Ha.

Struktur tanah pada umumnya relatif baik, akan tetapi yang perlu mendapatkan perhatian adalah penggunaan jenis tanah andosol yang memiliki sifat peka erosi. Jenis tanah andosol ini terdapat di Kecamatan lowokwaru dengan relatif kemiringan sekitar 15 %.

(<http://malangkota.go.id/>)







visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Oleh karenanya, maka perumusan visi, misi dan program dalam RPJMD Kota Malang ini 2013-2018 tidak hanya berasal dari visi, misi dan program Kepala Daerah saja, namun sudah dilakukan beberapa penyesuaian dari semua acuan dimaksud.

### **“MENJADIKAN KOTA MALANG SEBAGAI KOTA BERMARTABAT”**

Istilah MARTABAT adalah istilah yang menunjuk pada harga diri kemanusiaan, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, dengan visi ‘Menjadikan Kota Malang sebagai Kota BERMARTABAT’ diharapkan dapat terwujud suatu kondisi kemuliaan bagi Kota Malang dan seluruh masyarakatnya. Hal ini adalah penerjemahan langsung dari konsep Islam mengenai *baladun thoyyibatun wa robbun ghofur* (negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT). Untuk dapat disebut sebagai Kota BERMARTABAT, maka akan diwujudkan Kota Malang yang aman, tertib, bersih, dan asri, dimana masyarakat Kota Malang adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta memiliki nilai religiusitas yang tinggi dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, dengan Pemerintah Kota Malang yang bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat. Sehingga, Kota Malang secara umum akan memiliki keunggulan-

keunggulan dan berdaya saing tinggi untuk dapat menempatkan diri sebagai kota yang terkemuka dengan berbagai prestasi di berbagai bidang.

Selain itu, visi BERMARTABAT dapat menjadi akronim dari beberapa prioritas pembangunan yang menunjuk pada kondisi-kondisi yang hendak diwujudkan sepanjang periode 2013-2018, yakni: **BER**sih, **MA**kmur, **AD**il, **RE**ligius-toleran, **TE**rkemuka, **AM**an, **BE**rbudaya, **AS**ri, dan **TE**rdidik. Masing-masing akronim dari **BERMARTABAT** tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Bersih, Kota Malang yang bersih adalah harapan seluruh warga Kota Malang.
- 2) Makmur, Masyarakat yang makmur adalah cita-cita yang dipercayakan kepada pemerintah untuk diwujudkan melalui serangkaian kewenangan yang dipunyai pemerintah.
- 3) Adil, Terciptanya kondisi yang adil di segala bidang kehidupan adalah harapan seluruh masyarakat Kota Malang.
- 4) Religius-toleran, Terwujudnya masyarakat yang religius dan toleran adalah kondisi yang harus terwujud sepanjang 2013-2018.
- 5) Terkemuka, Kota Malang yang terkemuka dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia merupakan kondisi yang hendak diwujudkan.
- 6) Aman, Situasi kota yang aman dan tertib merupakan kondisi yang mutlak diperlukan oleh masyarakat.
- 7) Berbudaya, Masyarakat Kota Malang yang berbudaya merupakan kondisi dimana nilai-nilai adiluhung dipertunjukkan dalam sifat,

sikap, tindakan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari di semua tempat.

- 8) Asri, Kota Malang yang asri adalah dambaan masyarakat.
- 9) Terdidik, Terdidik adalah kondisi dimana semua masyarakat mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan peraturan perundangan.

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, maka misi Kota Malang Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan.
- 2) Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, pengarusutamaan gender, serta kerukunan sosial.
- 4) Meningkatnya pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan.
- 5) Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

## 2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang

### a. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 2) Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 3) Koordinasi pelaksanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 4) Pengendalian pelaksanaan program di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 5) Pengelolaan administrasi Dinas.



Adapun pokok-pokok pikiran dari visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Layak adalah:

- 1) Tersedianya tempat hunian yang layak huni yang sesuai dengan tata ruang daerah;
- 2) Terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyediaan tempat hunian yang layak huni dan menciptakan kondisi lingkungan permukiman perkotaan yang tidak kumuh;
- 3) Terciptanya kondisi lingkungan permukiman perkotaan yang tidak kumuh melalui penyediaan Rusunawa;
- 4) Terwujudnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana Rusunawa.

Asri adalah:

- 1) Tersedia dan terpeliharanya RTH, baik yang difungsikan sebagai taman kota, hutan kota, lahan resapan, maupun fungsi penghijauan lainnya;
- 2) Tersedianya daya dukung yang dibutuhkan dalam rangka mengoptimisasi penyediaan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau;
- 3) Terciptanya lingkungan yang indah, teduh, sejuk dan segar selaras dengan upaya peningkatan kelestarian lingkungan;
- 4) Tersedianya kebun bibit tanaman dengan keanekaragaman tanaman yang tersebar di seluruh wilayah Kota Malang melalui pemanfaatan dan mengoptimalkan ruang-ruang publik yang tersedia untuk



memperbaiki kualitas lingkungan dan sekaligus sebagai pensuplai oksigen dan pengikat gas karbon;

- 5) Tumbuhnya kesadaran segenap elemen masyarakat untuk melakukan penanaman dan penghijauan, baik di ruang-ruang publik maupun di ruang privat sebagai upaya mendukung penghijauan kota dan pelestarian lingkungan.

Menarik adalah:

- 1) Tersedianya taman aktif sebagai daya tarik kota yang juga dapat mempercantik Kota Malang dan sekaligus dijadikan sebagai wahana bagi masyarakat untuk mendapatkan pembelajaran, kesenangan, kegembiraan dan kenyamanan;
- 2) Tersedianya taman kota yang tematik, menarik, dan unik yang dapat dinikmati keindahannya sekaligus dapat difungsikan sebagai wahana masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas bermain, berolahraga dan mengasah kreatifitas pelajar, mahasiswa dan masyarakat;
- 3) Tersedianya dekorasi dan ornamen kota yang menarik, semarak dan memadai dalam rangka untuk mempercantik kota sekaligus mendukung penguatan karakter Kota Malang sebagai kota pelajar yang metropolitan dengan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal.

Berbasis Pada Ketertiban Pertanahan yaitu diarahkan pada terwujudnya DISPERKIM, sebagai Dinas yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan pemerataan penyediaan tempat hunian yang layak huni yang sesuai dengan tata ruang daerah dalam rangka

menanggulangi lingkungan permukiman perkotaan yang tidak kumuh serta peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur dan daya dukung kota, melalui penciptaan taman aktif dan tematik sebagai wahana masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas masyarakat, baik untuk bermain, berolahraga, maupun untuk mengasah kreatifitas masyarakat yang tetap menjaga dan mempertimbangkan ketertiban pertanahan.

Upaya-upaya untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, maka perlu dirumuskan misi yang dapat digunakan sebagai pilihan jalan bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang dalam menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi masyarakat. Maka, misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas dan pemerataan penyediaan tempat hunian yang layak huni yang sesuai dengan tata ruang daerah serta menanggulangi lingkungan permukiman perkotaan yang tidak kumuh melalui Rusunawa serta peningkatan kualitas sarana dan prasarananya;
- 2) Menciptakan taman aktif dan tematik sebagai wahana masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas masyarakat untuk bermain, berolahraga dan mengasah kreatifitas masyarakat;
- 3) Meningkatkan kualitas, kuantitas dan ketersediaan daya dukung RTH pada taman kota, hutan kota, dan pemakaman melalui penyediaan

kebun bibit tanaman yang berfungsi sebagai ekologis, estetis dan sosial berbasis pada peranserta dunia usaha dan masyarakat;

- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemerataan penerangan jalan dan dekorasi kota untuk mempercantik kota sekaligus mendukung penguatan karakter kota Malang sebagai Kota Pendidikan, Kota Industri dan Kota Pariwisata yang metropolitan;
- 5) Meningkatkan kualitas, pemerataan pelayanan pemakaman, dan mengoptimalkan pemeliharaannya serta kondisi pemakaman yang tertata;
- 6) Meningkatkan pemanfaatan lahan dan pertanahan yang tertib.

d. Kepegawaian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang  
Kepegawaian berdasarkan data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang dalam angka pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5. Data Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang**

No	Unit Kerja	Jumlah			Total
		ASN	PTT	TPOK	
1	Sekretariat	22	3	6	31
2	Bidang Penerangan Jalan	16	-	18	36
3	Bidang Pertamanan	78	2	137	217
4	Bidang Perumahan dan Pertanahan	13	1	11	25
5	UPT Taman Aktif	22	2	35	59
6	UPT Kebun Pembibitan Tanaman	15	-	15	30
	UPT Tempat Pemakaman				

No	Unit Kerja	Jumlah			Total
		ASN	PTT	TPOK	
7	Umum	46	1	4	51
8	UPT Rusunawa	4	-	43	47
9	UPT Bingkil	2	-	2	4
	Jumlah	219	9	222	439

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang, 2018.

### 3. Kelurahan Gading Kasri Kota Malang

#### a. Letak Geografis Kelurahan Gading Kasri Kota Malang

Kelurahan Gading Kasri merupakan bagian dari Kecamatan Klojen Kota Malang. Luas wilayah 90,98 Ha, dengan kordinat wilayah terletak pada Longitude: -7.9790693 dan Latitude: 112.6219486 dan secara administrastif, Kelurahan Gading Kasri memiliki 6 RW dan 50 RT dengan batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara: Kelurahan Sumbersari dan Kelurahan Oro Oro Dowo
- 2) Sebelah Timur: Kelurahan Kauman dan Kelurahan Oro Oro Dowo
- 3) Sebelah Selatan: Kelurahan Bareng
- 4) Sebelah Barat: Kelurahan Pisang Candi dan Kelurahan Karang Besuki

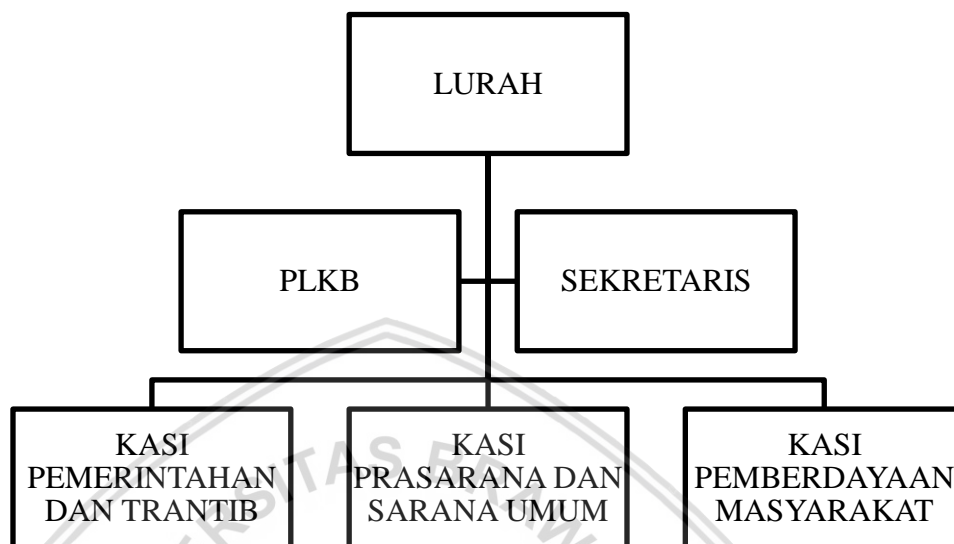


Visi Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen tersebut merupakan visi yang terintegrasi dan menjadi satu kesatuan dengan visi Kota Malang. Berdasarkan pada visi tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan yang telah digariskan sehingga peningkatan mutu pelayanan dapat mendorong gerak laju pertumbuhan pembangunan maupun dalam perekonomian di wilayah Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen diharapkan dapat mewujudkan kepuasan masyarakat.

Visi Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen diwujudkan melalui misi Kelurahan yang meliputi:

- 1) Mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat dan ramah lingkungan;
- 2) Mewujudkan pemberdayaan kelembagaan masyarakat yang berkualitas;
- 3) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui kemitraan masyarakat dengan pelaku usaha baik di bidang pembenahan infrastruktur permukiman/lingkungan maupun di bidang ekonomi/usaha masyarakat dengan mendayagunakan segenap ketrampilan dan keahlian yang dimiliki oleh warga.

c. Struktur Organisasi Kelurahan Gading Kasri Kota Malang



**Gambar 6. Struktur Organisasi Kelurahan Gading Kasri Kota Malang**

*Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan Gading Kasri Kota Malang, 2018.*

d. Kelembagaan Masyarakat Kelurahan Gading Kasri Kota Malang

Keterlibatan masyarakat dalam organisasi kelembagaan sosial kemasyarakatan terhadap pembangunan sangat tinggi yang dibuktikan dengan banyaknya kegiatan sosial yang diikuti warga yang diorganisir oleh organisasi kemasyarakatan yang ada. Di samping organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang sosial dan keagamaan ada juga tokoh-tokoh masyarakat yang berperan dalam kegiatan kemasyarakatan. Dari data yang ada kelembagaan masyarakat yang ada di Kelurahan Gading Kasri adalah:



- 1) PKK
- 2) LPMK
- 3) BKM
- 4) Karang Taruna
- 5) Fatayat/Muslimat
- 6) Karang Werda

e. Kondisi Demografi Kelurahan Gading Kasri Kota Malang

Kebutuhan informasi terkait dengan kondisi demografi berkaitan dengan daya dukung dan daya tampung suatu wilayah, bahwa kebutuhan data dan informasi yang disajikan yaitu berkaitan dengan jumlah penduduk, populasi penduduk dan luas lahan, selengkapya kondisi kependudukan pada wilayah Kelurahan Gading Kasri dapat diuraikan sebagai berikut:





**Tabel 6. Kondisi Kependudukan di Kelurahan Gading Kasri Kota Malang**

RW	$\Sigma$ KPL. RT	$\Sigma$ KK	$\Sigma$ KPLA. RT MBR	$\Sigma$ KPLA. RT NON MBR	$\Sigma$ PNDDK. LAKI- LAKI	$\Sigma$ PNDDK. PRMPUAN
1	376	513	87	289	903	904
2	641	702	172	469	1132	1229
3	501	745	53	448	1129	1243
4	205	236	0	205	358	442
5	89	125	0	89	204	198
6	305	348	61	244	520	590

Sumber : Data Baseline Kelurahan Gading Kasri, 2016.

Apabila didasarkan sebaran jumlah rumah tangga MBR pada tiap RW, maka RW 02 memiliki jumlah rumah tangga MBR tertinggi dibandingkan dengan RW lainnya. Jumlah kepala keluarga MBR di RW 02 berjumlah 172 rumah tangga. Kemudian untuk RW 04 dan RW 05 tidak terdapat rumah tangga MBR.

Indikator kependudukan lain yang dapat digunakan untuk mengkaji kondisi permukiman di kawasan perencanaan adalah kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk dipengaruhi oleh luas lahan serta jumlah penduduk yang terdapat pada suatu wilayah. Kepadatan penduduk berdasarkan SNI 03-1733-2004 memiliki kategori yaitu:

- 1) Kepadatan sangat tinggi dengan nilai lebih dari 400 jiwa/ha: 
- 2) Kepadatan tinggi dengan nilai berkisar 201-400 jiwa/ha: 
- 3) Kepadatan sedang dengan nilai antara 151-200 jiwa/ha: 
- 4) Kepadatan rendah dengan nilai kurang dari 150 jiwa/ha: 

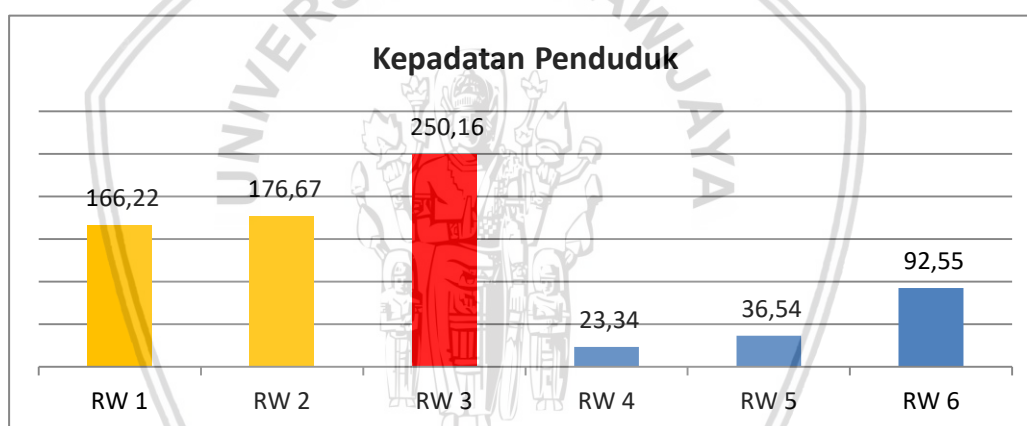
Untuk lebih jelasnya terkait dengan kondisi kepadatan penduduk dapat dilihat pada tabel, grafik, dan peta berikut:

**Tabel 7. Kepadatan Penduduk di Kawasan Perencanaan**

RW	KEPADATAN PENDUDUK		
	KEPADATAN PENDUDUK (Jiwa/Ha)	Σ PENDUDUK (Jiwa)	LUAS WIL. (Ha)
1	166,222	1807	10,871
2	176,669	2361	13,364

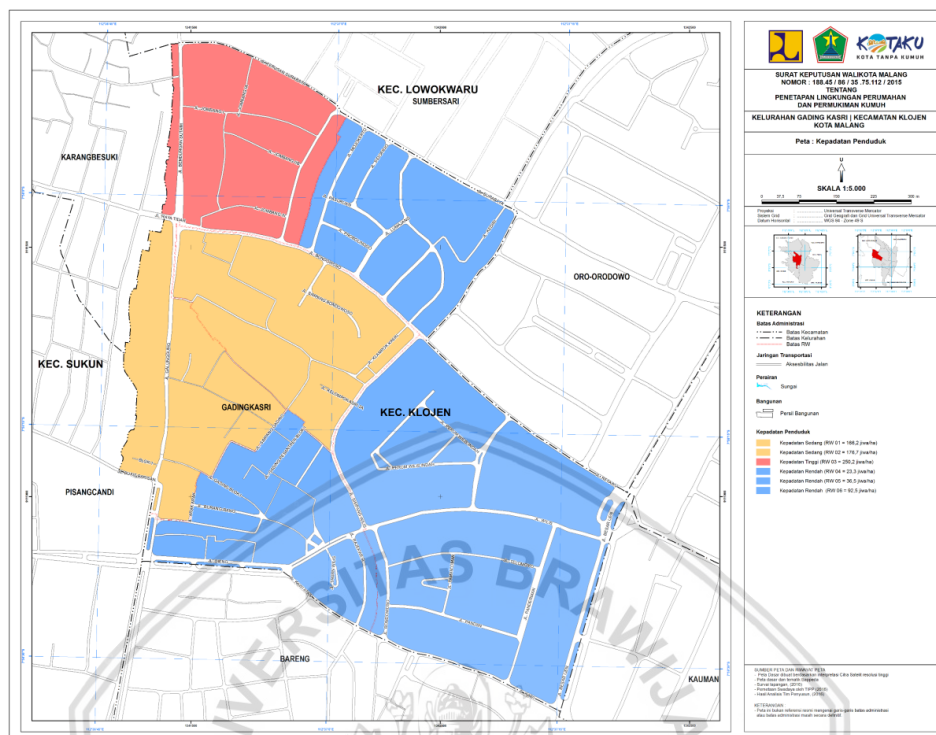
RW	KEPADATAN PENDUDUK		
	KEPADATAN PENDUDUK (Jiwa/Ha)	Σ PENDUDUK (Jiwa)	LUAS WIL. (Ha)
3	250,158	2372	9,482
4	23,345	800	34,269
5	36,542	402	11,001
6	92,554	1110	11,993

Sumber : Data Baseline Kelurahan Gading Kasri, 2016.



**Gambar 7. Grafik Kepadatan Penduduk Kelurahan Gading Kasri Kota Malang**

Sumber: Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Gading Kasri Kota Malang, 2017.



**Gambar 8. Peta Kepadatan Penduduk Kelurahan Gading Kasri Kota Malang**

*Sumber: Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Gading Kasri Kota Malang, 2017.*

## B. Penyajian Data Fokus

### 1. Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh dalam Perspektif Fungsi Administrasi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang dan di Kelurahan Gading Kasri Kota Malang

#### a. Perencanaan (*Planning*) Program Kota Tanpa Kumuh meliputi Aspek Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP)

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan bentuk upaya pemerintah dalam pengentasan kekumuhan dan pencegahan kekumuhan pada tingkat nasional. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Malang



stakeholder yang terlibat memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda, contohnya dalam perumusan perencanaan. Perencanaan merupakan langkah awal sebelum menjalankan suatu program. Dengan adanya perencanaan juga dapat meminimalisir dari permasalahan-permasalahan yang tidak diinginkan. Penjelasan lebih lanjut mengenai perencanaan dalam rangka pelaksanaan program KOTAKU dijelaskan oleh Bapak Mochammad Jusuf selaku Kepala Seksi Perumahan dan Permukiman Bidang Perumahan dan Pertanahan DISPERKIM Kota Malang:

“Perencanaan dalam hal pengentasan kekumuhan DISPERKIM hanya sebagai pelaksana saja. Sudah ada Surat Keputusan yang menyebutkan bahwa kelurahan ini ada kumuhnya berapa persen. Kita hanya melaksanakan program bagaimana nantinya kekumuhan di Kota Malang tahun 2019 sudah tidak ada. Misalnya kalau stakeholder lain dalam perumusan perencanaan ada seperti masyarakat yang lebih tau karena adanya pelaporan secara langsung dan selain itu juga mereka juga membuat proposal mengenai kawasannya yang termasuk kumuh itu. Ada juga BKM yang memang mempunyai perencanaan yang nantinya tahu akan diapakan program itu dan DISPERKIM akan menyesuaikan karena ini merupakan kolaborasi.” *(Hasil wawancara dengan Bapak Mochammad Jusuf selaku Kepala Seksi Perumahan dan Permukiman Bidang Perumahan dan Pertanahan, DISPERKIM Kota Malang pada tanggal 29 Januari 2018 pukul 13.00 WIB di DISPERKIM Kota Malang)*

Melihat hal itu dapat diketahui dalam proses perumusan perencanaan dalam rangka pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Gading Kasri lebih kepada pihak Kelurahan tersebut yang menangani terkait perencanaannya. Pihak Kelurahan merupakan ujung tombak yang mempunyai wilayah sehingga sangat paham apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat di wilayahnya dan seluruhnya dimasukkan pada perencanaan.

Sehubungan program KOTAKU merupakan suatu program kolaborasi, maka suatu perencanaan yang telah dibuat oleh Kelurahan harus disesuaikan dengan SKPD yang menaungi yaitu DISPERKIM.

Kelurahan Gading Kasri memiliki Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang membantu dalam pelaksanaan program KOTAKU. BKM Kelurahan Gading Kasri telah memiliki suatu perencanaan yang akan dijadikan sebagai bahan acuan saat pelaksanaannya. Perencanaan tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen yang disebut dengan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP). Saat penyusunan RPLP tersebut perlu melewati beberapa tahapan. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Dewi Nurjannah selaku Koordinator BKM Kelurahan Gading Kasri Kota Malang dalam wawancara sebagai berikut:

“Pada tahun 2015 ada database line yang harus dibuat. Database line itu menyangkut semua permasalahan yang ada di masing-masing kelurahan termasuk di Gading Kasri. Tiap-tiap RT dan RW itu memberikan laporan permasalahannya apa, baik di bidang infra, sosial maupun fasilitas-fasilitas yang dimiliki termasuk warga yang istilahnya minus. Kemudian di tahun 2016 itu dibenahi, lalu terbentuklah Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) yang berisikan semua permasalahan di Kelurahan Gadingkasri khususnya yang termasuk dalam database line, karena tidak semua RW itu semuanya masuk di dalam baseline SK Kumuh tadi.”  
*(Hasil Wawancara dengan Ibu Dewi Nurjannah selaku Koordinator BKM Kelurahan Gading Kasri, Kota Malang pada tanggal 7 Februari 2018 pukul 09.00 WIB di BKM Kelurahan Gading Kasri)*

Hal ini juga dikemukakan oleh Bapak Winardi selaku Koordinator Kota Program KOTAKU Kota Malang dalam wawancara sebagai berikut:



“Waktu itu ada kegiatan namanya database line yaitu mendatabase terkait dengan permasalahan di permukiman jadi banyak hal selain indikator kekumuhan. Disitu juga ada seperti warga berobat dimana, sekolahnya dimana, pekerjaannya apa, masing-masing kepala keluarga ada disitu. Sehingga dari pendataan itu di setiap kelurahan akan tahu masalahnya yang berkaitan dengan permukiman dan kekumuhan ini hasilnya seberapa. Maka dari hasil data inilah kemudian mimpinya tadi seperti apa kampungnya, kalau ada persoalan seperti ini mau dibawa kemana direncanakan tadi. Perencanaan itu yang kita namakan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP).” (*Hasil Wawancara dengan Bapak Winardi selaku Koordinator Kota Program KOTAKU, Kota Malang pada tanggal 28 Februari 2018 pukul 11.15 WIB di Korkot Kota Malang*)

Saat RPLP telah terbentuk kemudian dijabarkan ke *Detail Engineering Design* (DED), karena RPLP hanya berisikan permasalahan dan penanganan secara umum. DED berisikan perincian dari masing-masing permasalahan dan penanganan tersebut serta gambaran konsep yang ingin diwujudkan. Melalui DED kebutuhan dari wilayah setempat dapat dihitung, misalnya untuk pembangunan jalan agar jalannya dijadikan lebih baik lagi harus ditambahkan sesuatu seperti tanaman-tanaman.

Pada Kelurahan Gading Kasri terdapat 4 RW yang menjadi lokasi sasaran dalam pelaksanaan program KOTAKU. Masing-masing RW tersebut telah memiliki skala prioritas dari beberapa indikator kekumuhan yang harus dikurangi terlebih dahulu. Untuk penetapan RW yang akan dijadikan skala prioritas dilakukan melalui rapat internal BKM yang dapat disebut dengan pemetaan swadaya. Pada rapat internal tersebut BKM juga mengundang seluruh masyarakat dan juga pihak kelurahan seperti Pak

Lurah. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Bapak Joko Santoso selaku Ketua RT 11 RW 03 Kelurahan Gading Kasri:

“Kalau oleh BKM pasti diikutsertakan di pemetaan swadaya, nah di pemetaan swadaya itu kita mengajak seluruh komponen masyarakat untuk mengenali wilayahnya setelah itu baru mereka dituangkan dalam permasalahan yang ada di wilayah. Permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah inilah yang dibawa ke forum pemetaan swadaya yang dilakukan oleh BKM. Dari situ akan timbul wilayah mana yang banyak indikator masalah nah scorenya berarti paling tinggi. Dari situlah akan oh yowes di wilayah ini dikerjakan.” *(Hasil Wawancara dengan Bapak Joko Santoso selaku Ketua RT 11 RW 03 Kelurahan Gading Kasri, Kota Malang pada tanggal 6 Maret 2018 pukul 19.00 di Rumah Bapak Joko Santoso)*



**Gambar 10. Kegiatan Pemetaan Swadaya di Badan Keswadayaan Masyarakat**

*Sumber: Dokumentasi Pribadi Badan Keswadayaan Masyarakat, 2018.*

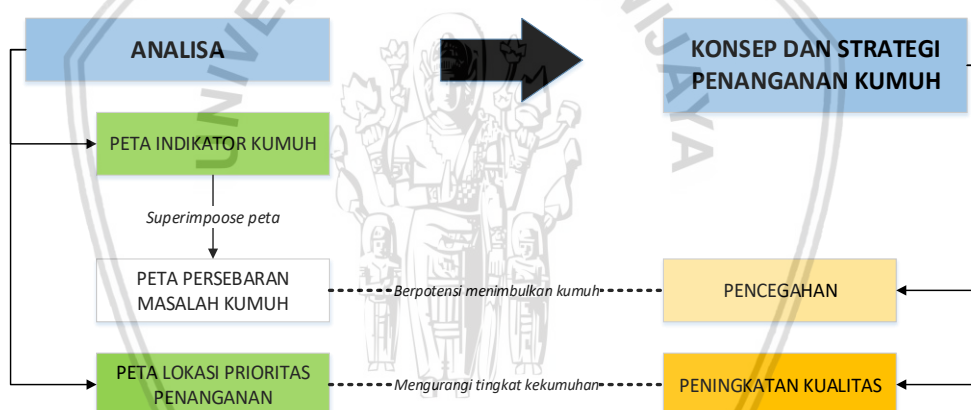
Penentuan kawasan prioritas dilakukan melalui musyawarah oleh seluruh masyarakat kelurahan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan masyarakat mengenai analisis penentuan lokasi prioritas penanganan kumuh, dengan menggunakan 2 metode yaitu:

- 1) Mengkaji tingkat kondisi indikator. Sumber data berupa diagram atau tabel.
- 2) *Overlay* atau *Superimpose* simpul permasalahan. Sumber data berupa peta.

Adapun beberapa kriteria yang digunakan dalam penentuan lokasi prioritas berdasarkan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) yaitu tingkat kepadatan penduduk, tingkat kepadatan bangunan, tingkat kondisi jalan, kondisi drainase, air minum, sanitasi dan persampahan. RPLP juga menyajikan strategi dan konsep dalam kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh kelurahan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman berikut merupakan pola penanganan kawasan kumuh.



dikhawatirkan akan menjadi masalah kumuh baru. Sedangkan, konsep dan strategi peningkatan kualitas kumuh memiliki lingkup wilayah yang lebih spesifik. Wilayah yang menjadi lingkup penerapan konsep dan strategi peningkatan kualitas kumuh adalah lokasi prioritas penanganan yang ditetapkan oleh masyarakat. Lokasi prioritas tersebut merupakan lokasi yang memiliki tingkat kekumuhan paling tinggi sehingga memerlukan penanganan yang harus diprioritaskan. Berikut merupakan alur penyusunan konsep dan strategi.



**Gambar 12. Alur Penyusunan Konsep dan Strategi Penanganan Kawasan Kumuh**

*Sumber: Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Gading Kasri Kota Malang, 2017.*

RPLP juga memuat terkait konsep penanganan lokasi prioritas.

Secara garis besar, konsep prioritasnya adalah sebagai berikut:

- 1) Penataan bangunan, yakni dengan pembongkaran bangunan untuk pelebaran jalan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas aliran sungai;

- 2) Peningkatan pelayanan air minum, yakni penyediaan sambungan rumah tangga PDAM bagi masyarakat yang belum terlayani PDAM;
- 3) Penataan sanitasi, yakni penyediaan biofill fabrikasi komunal untuk mencegah pembuangan limbah masyarakat ke dalam sungai yang dapat mencemari lingkungan;
- 4) Penataan saluran drainase, yakni pembuatan saluran drainase baru di permukiman yang belum dilalui saluran drainase, normalisasi saluran untuk mencegah genangan dan banjir serta pembuatan biopori di kawasan permukiman padat yang tidak dapat dilakukan pembangunan saluran drainase;
- 5) Penataan sistem persampahan, yakni penyediaan komposter untuk meningkatkan pengolahan sampah organik;
- 6) Penataan jalan lingkungan, yakni perbaikan perkerasan jalan lingkungan dengan peningkatan kualitas paving;
- 7) Penyediaan RTH publik, yakni pembuatan taman skala RW yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai area rekreasi.

Setelah keputusan bersama sudah didapat terkait RW yang akan dijadikan lokasi prioritas, masyarakat setempat diminta untuk membuat Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Pembentukan KSM ini dilakukan berdasarkan musyawarah antar seluruh masyarakat. KSM dalam program KOTAKU dapat dikatakan sebagai panitia pelaksana program.

Berdasarkan data di atas, perencanaan dalam rangka pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Gading Kasri melibatkan



beberapa *stakeholder* yang memiliki perannya masing-masing. Pihak kelurahan yang dibantu oleh Badan Keswadayaan Masyarakat dan perwakilan dari masyarakat setempat membuat suatu dokumen perencanaan yang dinamakan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP). Jadi, seluruh pelaksanaan yang terkait dengan program KOTAKU mengacu pada RPLP tersebut dan diambil alih oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk mengatur pelaksanaan saat di lapangan.

b. Pengorganisasian (*Organizing*) Program Kota Tanpa Kumuh meliputi  
Aspek Struktur Organisasi Pegawai

Pengorganisasian merupakan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada setiap orang yang ada di suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kegiatan yang identik dengan pengorganisasian yaitu pembentukan struktur organisasi. Struktur yang dimaksud nantinya diisi oleh sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidangnya. Sumber daya manusia merupakan faktor yang menentukan keberhasilan suatu program, termasuk dalam hal pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Gading Kasri.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagai penanggung jawab serta penyelenggara program KOTAKU di tingkat nasional. Kementerian PUPR mengamanahkan kepada *Project Management Unit* (PMU) yang bertanggung jawab atas kegiatan secara keseluruhan. PMU juga dibantu oleh Satuan Kerja (Satker) yang ada di tingkat pusat, provinsi, dan kota.



Salah satu bentuk fasilitasi untuk program KOTAKU yang merupakan program kolaborasi yaitu dengan membentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP). Pokja PKP terdiri dari berbagai unsur pemerintah kota seperti SKPD terkait, Bappeda, masyarakat (forum BKM), dan kelompok peduli lainnya.

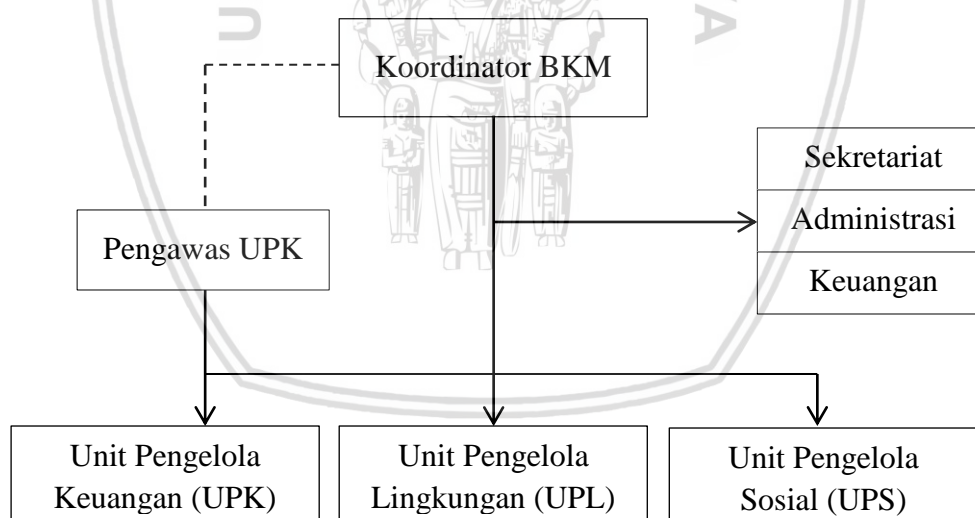
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan salah satu SKPD yang tergabung dalam Pokja PKP Kota Malang. Untuk sistem pengorganisasian di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak ada struktur organisasi yang spesifik untuk program KOTAKU melainkan hanya berbentuk tim-tim pelaksana yang tergabung dalam Pokja PKP. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Mochammad Jusuf selaku Kepala Seksi Perumahan dan Permukiman Bidang Perumahan dan Pertanahan DISPERKIM Kota Malang mengatakan bahwa:

“Kalau pengorganisasian tidak ada organisasi khusus untuk menangani kumuh. Sudah ada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain seperti Disperkim, Kelurahan, Kecamatan, Dpu, Baren memiliki tim masing-masing yang tergabung dalam pokja pkp. Intinya yang menangani berbentuk tim. Tidak ada struktur organisasi, bekerja secara tim saja. Tapi tetap pemegang tanggung jawabnya itu ada walikota, ketuanya yang mengarahkan ada sekda, pelaksananya itu SKPD yang terkait beserta kecamatan dan kelurahan juga sebagai pelaksana.” *(Hasil wawancara dengan Bapak Mochammad Jusuf selaku Kepala Seksi Perumahan dan Permukiman Bidang Perumahan dan Pertanahan, DISPERKIM Kota Malang pada tanggal 29 Januari 2018 pukul 13.00 WIB di DISPERKIM Kota Malang)*

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Malang sebagai pelaksana di dalam program Kota Tanpa Kumuh memiliki fungsi yang

berbeda-beda. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menangani permasalahan terkait bangunan gedung, Dinas Pekerjaan Umum menangani permasalahan terkait jalan lingkungan dan drainase lingkungan, Dinas Kesehatan menangani permasalahan terkait penyediaan air minum sehat dan Dinas Sosial menangani dalam hal kegiatan sosialisasi seperti sosialisasi pengelolaan persampahan dan sebagainya.

Pelaksanaan program pada saat di lapangan dilakukan oleh masing-masing pihak Kelurahan, termasuk Kelurahan Gading Kasri memiliki Badan Keswadayaan Masyarakat yang secara khusus menangani program KOTAKU. Adapun struktur organisasi dari BKM adalah sebagai berikut.



**Gambar 13. Struktur Organisasi Badan Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Gading Kasri**

*Sumber: Olahan Penulis berdasarkan Hasil Wawancara, 2018.*

Sistem kerja di BKM merupakan sistem kontrak tahunan. Keadaan saat ini posisi pada Unit Pengelola Lingkungan sedang kosong, karena

terdapat beberapa kendala. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Dewi Nurjannah selaku Koordinator BKM Kelurahan Gading Kasri Kota Malang:

“posisi yang UPL itu agak sulit karena harus punya keahlian seperti mengerti teknik. Sementara di Gading yang UPL itu lagi kosong, sedang berusaha merekrut calon. Kemarin sudah ada Unit Pengelola Lingkungan, kemudian beliau sudah pindah tidak disini. Untuk tahun ini belum ada penggantinya, tapi sudah ada pandangan yang mau kita minta untuk menjadi UPL. Tahun ini sudah harus ada penggantinya.” *(Hasil Wawancara dengan Ibu Dewi Nurjannah selaku Koordinator BKM Kelurahan Gading Kasri, Kota Malang pada tanggal 7 Februari 2018 pukul 09.00 WIB di BKM Kelurahan Gading Kasri)*

Untuk pelaksana khusus pada saat di lapangan Badan Keswadayaan Masyarakat bekerja sama dengan masyarakat untuk membentuk suatu tim panitia pelaksana kegiatan dari setiap RW yang termasuk dalam SK Kumuh. Hal tersebut didukung dari hasil wawancara dengan Bapak Winardi selaku Koordinator Kota Program KOTAKU Kota Malang:

“Kalau pengorganisasian program di level kelurahan kan ada lurah dan bkm ya sebagai penggeraknya. Mereka kemudian bekerja sama dengan para relawan atau orang-orang peduli di lingkungan ada RT, RW, dan tokoh masyarakat yang mau bersama-sama membantu dalam proses kepanitiaan, pendataan, dan sebagainya juga butuh pendapat masyarakat juga kan.” *(Hasil Wawancara dengan Bapak Winardi selaku Koordinator Kota Program KOTAKU, Kota Malang pada tanggal 28 Februari 2018 pukul 11.15 WIB di Korkot Kota Malang)*

Tim panitia pelaksana yang dibentuk oleh BKM bersama tokoh masyarakat dinamakan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Adapun susunan Kelompok Swadaya Masyarakat adalah sebagai berikut.



kelurahan. Jumlah tim pendamping untuk Kota Malang adalah 8 tim, dengan rincian 6 tim untuk kelurahan kumuh dan 2 tim untuk kelurahan tidak kumuh. Setiap tim pendamping terdapat senior faskel (SF), faskel teknik, faskel sosial, faskel urban planner, dan faskel ekonomi.

Berdasarkan hasil data di atas dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian dalam pelaksanaan program kota tanpa kumuh di Kelurahan Gading Kasri sistemnya dikelola oleh beberapa *stakeholder*, baik itu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun pihak Kelurahan. SKPD di Kota Malang yang menangani program KOTAKU antara lain Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial. Masing-masing SKPD yang terkait tidak memiliki struktur organisasi dalam pelaksanaan program KOTAKU, mereka hanya bekerja secara tim. Untuk pelaksanaan program KOTAKU di lapangan ditangani oleh Pemerintah Kelurahan, BKM, KSM, dan faskel yang telah memiliki sistem pengorganisasian atau struktur organisasi masing-masing.

c. Pengadaan Tenaga Kerja (*Staffing*) Program Kota Tanpa Kumuh meliputi

Aspek Manajemen Kepegawaian

Pengadaan tenaga kerja dalam suatu program berkaitan dengan perekrutan pegawai atau sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaannya. Tujuan dari perekrutan pegawai ini untuk menempatkan sumber daya manusia tersebut secara tepat sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Melalui *staffing* seluruh formasi jabatan akan terisi

sehingga tugas dari masing-masing pegawai akan mudah terselesaikan dan tujuan organisasi juga lebih mudah tercapai.

Dalam sistem pengadaan tenaga kerja untuk program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Gading Kasri *stakeholder* yang berperan adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DISPERKIM), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Gading Kasri, dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Gading Kasri. Pelaksanaan pekerjaan dari masing-masing *stakeholder* telah sesuai dengan tugasnya masing-masing. Artinya penempatan sumber daya manusia sesuai dengan keahliannya sudah diterapkan pada pelaksanaan program KOTAKU.

Pelaksanaan program KOTAKU pada saat di lapangan ditangani oleh BKM sebagai pengawas dan pelaksana. Untuk proses perekrutan pegawai BKM dilakukan secara terbuka untuk masyarakat sekitar dan harus melewati tahap wawancara oleh koordinator BKM. Hal ini didukung dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ibu Dewi Nurjannah selaku Koordinator BKM Kelurahan Gading Kasri Kota Malang:

“Sistem perekrutan di bkm itu ada beberapa pelamar kemudian dites wawancara seperti ditanyakan komitmen, motivasi kerja dan seterusnya. Itu sistemnya tiap tahun harus memperbaharui kontrak, bukan pegawai tetap. Jadi untuk UPK dan Sekretariat ataupun pegawai lainnya adalah sistem kontrak.” (*Hasil Wawancara dengan Ibu Dewi Nurjannah selaku Koordinator BKM Kelurahan Gading Kasri, Kota Malang pada tanggal 7 Februari 2018 pukul 09.00 WIB di BKM Kelurahan Gading Kasri*)



Saat ini kepengurusan BKM Kelurahan Gading Kasri berbentuk pimpinan kolektif beranggotakan 13 orang dengan dibantu unit-unit pelaksana kebijakan BKM, yang terdiri dari 1 orang UPK, 1 orang UPL, dan 1 orang UPS serta 1 orang staf kesekretariatan. Susunan keanggotaan pimpinan kolektif BKM Kelurahan Gading Kasri untuk tahun 2017-2019 dapat dilihat sebagai berikut:

NAMA	ALAMAT	JABATAN
Dra. Dewi Nurjannah, MM. AFP	Jl. Simpang Gading 26-Malang	Koordinator BKM
Drs. Mindarto	Jl. Galunggung-Malang	Pimpinan Kolektif
Bagus R	Jl. Galunggung-Malang	Pimpinan Kolektif
Sisnoto	Jl. Gading Pesantren-Malang	Pimpinan Kolektif
Dra. Hariyani	Jl. Klampok Kasri-Malang	Pimpinan Kolektif
Kariyadi	Jl. Klampok Kasri-Malang	Pimpinan Kolektif
Fathor Rahman, SH. M.Hum	Jl. Gading-Malang	Pimpinan Kolektif
A. Firdiansyah	Jl. Gading-Malang	Pimpinan Kolektif
Imam Bukori, SH	Jl. Gading-Malang	Pimpinan Kolektif
Zaenal Arifin	Jl. Jombang-Malang	Pimpinan Kolektif
Haryadi, SPd	Jl. Jombang-Malang	Pimpinan Kolektif
Mujiono	Jl. Jombang-Malang	Pimpinan Kolektif
Siti Rochmah	Jl. Jombang-Malang	Pimpinan Kolektif
Sekretariat & Unit Pengelola		
Agustin Tri Lestari, Spd	Jl. Gading No.20	Sekretariat
Erna Sudarwati, SE	Jl. Klampok Kasri IID No. 199 Malang	UPK
		UPL
Sumiati	Jl. Jombang-Malang	UPS

**Gambar 15. Susunan Keanggotaan Pimpinan Kolektif BKM Kelurahan Gading Kasri Periode Tahun 2017-2019**

*Sumber: Hasil Dokumentasi Peneliti, 2018.*

Proses rekrutmen juga berlaku untuk mengisi posisi fasilitator kelurahan (faskel) yang berfungsi untuk mendampingi setiap kelurahan yang termasuk kumuh maupun tidak kumuh. Apabila terdapat kekosongan



jabatan untuk faskel, maka akan dicari melalui orang-orang yang telah memiliki pengalaman sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari Bapak Winardi selaku Koordinator Kota Program KOTAKU Kota Malang:

“Kalau misalkan ada anggota faskel yang keluar, misalnya fasilitator ekonomi keluar biasanya kita menggaransi teman-teman yang pernah di program PNPM yang memiliki pengalaman itu dijadikan referensi atau kalau kebutuhannya banyak biasanya teman-teman di manajemen dopc itu buka pengumuman. Pada bulan Januari kemarin ada fasilitator teknik itu sekitar 16 orang, di awal tahun biasanya butuh orang banyak. Kalau yang sifatnya insidental dalam waktu berjalan seperti ini kalau teman-teman di kota punya referensi langsung dikirim ke pusat, mereka yang proses kan ada tim hrdnya, itu untuk personil kotakku sih.” *(Hasil Wawancara dengan Bapak Winardi selaku Koordinator Kota Program KOTAKU, Kota Malang pada tanggal 28 Februari 2018 pukul 11.15 WIB di Korkot Kota Malang)*

Sistem kerja yang digunakan oleh faskel adalah sistem kontrak dengan jangka waktu pertahun. Kontrak dapat diperpanjang sesuai dengan kinerja pegawai tersebut. Untuk kalangan masyarakat yang dapat dikatakan sebagai relawan atau *volunteer* yang tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) ditentukan berdasarkan keahlian yang dimiliki. Hal ini dijelaskan dalam wawancara dengan Bapak Joko Santoso selaku Ketua RT 11 RW 03 Kelurahan Gading Kasri sebagai berikut:

“ya termasuk dalam hal pengadaan tenaga kerja itu. Kita akan mencari prioritas pertama adalah masyarakat sekitar yang ahli atau yang mampu menangani hal itu. Jika tidak dimungkinkan kita akan mencari di tempat lain atau berinformasi ke tempat yang lain. Prioritas pertama adalah warga masyarakat.” *(Hasil Wawancara dengan Bapak Joko Santoso selaku Ketua RT 11 RW 03 Kelurahan*

*Gading Kasri, Kota Malang pada tanggal 6 Maret 2018 pukul 19.00 di Rumah Bapak Joko Santoso)*

Dalam pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Gading Kasri sistem kerja untuk masyarakat disesuaikan dengan waktu luang atau dapat dikatakan fleksibel. Hal tersebut yang menentukan keaktifan masyarakat dalam melakukan suatu pekerjaan. Sistem kerja dalam KSM ini hanya berlaku saat program KOTAKU berlangsung dan berakhir sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

d. Pemberian Bimbingan (*Directing*) Program Kota Tanpa Kumuh meliputi Aspek Aktor Pemberi Bimbingan dan Aktor Penerima Bimbingan

Setiap program yang dilaksanakan perlu adanya pemberian suatu bimbingan. Pemberian bimbingan dapat berupa informasi terkait program yang akan dilaksanakan beserta rincian tugas dari setiap *stakeholder* yang terlibat. Pemberian bimbingan juga dapat berupa sosialisasi mengenai program tersebut mulai dari perencanaan sampai pelaksanaannya. Pemberian bimbingan biasanya berasal dari instansi pemerintah atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait kepada masyarakat yang juga terlibat dalam pelaksanaan program tersebut. Bimbingan yang diberikan harus disampaikan dengan jelas sehingga masyarakat mudah dalam menerima tujuan dari bimbingan yang diberikan.

Dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Gading Kasri terdapat beberapa jenis pemberian bimbingan. Untuk pemberian bimbingan dari Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman yang menaungi program KOTAKU itu tidak ada, melainkan pemberian bimbingan berasal dari Koordinator Kota (Korkot). Hal ini dijelaskan dalam wawancara dengan Bapak Mochammad Jusuf selaku Kepala Seksi Perumahan dan Permukiman Bidang Perumahan dan Pertanahan DISPERKIM Kota Malang sebagai berikut:

“Di Pemerintah ini tidak ada, yang ada di Korkot. Misalnya ada pelatihan terhadap masyarakat, sudah dibangun terpal nah bagaimana cara merawatnya disitu diberi tahu.” *(Hasil Wawancara pada tanggal 29 Januari 2018 pukul 13.00 WIB di DISPERKIM Kota Malang)*

Salah satu pemberian bimbingan yang diberikan oleh Korkot berupa pelatihan kepada masyarakat. Pelatihan tersebut berkaitan dengan pendampingan dalam pembuatan proposal kegiatan dan juga kegiatan yang sedang dilaksanakan dalam rangkaian program KOTAKU. Hal ini juga didukung dari hasil wawancara dengan Ibu Dewi Nurjannah selaku Koordinator BKM Kelurahan Gading Kasri Kota Malang:

“Bimbingan dari korkot sih ada, jadi faskel dari korkot itu kadang datang kesini istilahnya berkunjung dan melihat. Saat ada program juga diingatkan dan didampingi dalam pembuatan proposal. Apa saja didampingi, dari faskel itukan setiap tim ada senior faskelnya. Jadi dari korkot yang selalu berkoordinasi dengan wilayah Jawa Timur misalnya nanti ke SF. Di SF itu ada 1 tim yang kadang ada di Kelurahan Gadingkasri, kadang di Sukun jadi bergantian sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Masing-masing kelurahan ada 5 fasilitator, mereka mendampingi dalam kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan.” *(Hasil Wawancara pada tanggal 7 Februari 2018 pukul 09.00 WIB di BKM Kelurahan Gading Kasri)*



**Gambar 16. Pemberian Bimbingan dari Koordinator Kota kepada Masyarakat Kelurahan Gading Kasri**

*Sumber: Dokumentasi Pribadi Badan Keswadayaan Masyarakat, 2018.*

Bentuk bimbingan lainnya yang berasal dari Korkot adalah On the Job Training (OJT) kepada masyarakat. Kegiatan OJT di Kelurahan Gading Kasri tidak berbeda jauh dengan pelatihan pada biasanya, perbedaannya hanya berada pada praktik langsung di lapangannya. Maka kegiatan OJT merupakan kegiatan pelatihan yang langsung disertakan praktik di lapangan.







program KOTAKU di Kelurahan Gading Kasri yang hasil dari pelaksanaannya dapat dilihat dari gambar berikut.



**Gambar 19. Hasil dari pelaksanaan program KOTAKU yaitu jalan lingkungan dan biofil ipal komunal**

*Sumber: Hasil Dokumentasi Peneliti, 2018.*

Masyarakat di Kelurahan Gading Kasri juga mengadakan kegiatan studi banding ke Kelurahan lainnya. Kegiatan studi banding berfungsi untuk bertukar informasi mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan. Hal ini didukung dari hasil wawancara dengan Bapak Joko Santoso selaku Ketua RT 11 RW 03 Kelurahan Gading Kasri:

“Misalkan kita sharing dulu mau mengadakan ipal, mana ipal yang berhasil kan gitu yo. Nah kita melihat kesana dan mempelajari bisa ga dipraktekkan di tempat kita karena ada lokasi yang tidak mungkin. Oh bisa ternyata pake sistem apa lah itu misalnya baru diterapkan di tempat kita. Misalnya dalam perencanaan sering seperti ini, saya ingin membuat pergola yang tempat tanaman gantung itu dari besi. Nah itu kita pingin belajar darimana ya bisa membuat pergola yang bagus, bentuknya seperti apa ya, bahannya apa ya kira kira yang masuk akal yang kuat dan sesuai dengan pendanaan. Maka kita melakukan ya pengamatan atau studi ke



tempat tempat yang berhasil.” (*Hasil Wawancara pada tanggal 6 Maret 2018 pukul 19.00 di Rumah Bapak Joko Santoso*)

Berdasarkan data yang didapat oleh peneliti, pemberian bimbingan dalam pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Gading Kasri terdiri dari beberapa jenis bimbingan dan melibatkan beberapa *stakeholder*. Pemberian bimbingan di Kelurahan Gading Kasri dapat berupa pelatihan, *on the job training* (ojt), pembelajaran, penyuluhan, dan studi banding. Beberapa *stakeholder* yang terlibat dalam pemberian bimbingan antara lain Koordinator Kota, Badan Keswadayaan Masyarakat, dan inisiatif dari masyarakat itu sendiri. Sedangkan penerima bimbingan adalah masyarakat yang kawasannya termasuk dalam SK Kumuh, termasuk masyarakat Kelurahan Gading Kasri.

e. Pengkoordinasian (*Coordinating*) Program Kota Tanpa Kumuh meliputi Aspek Rapat Koordinasi Antar *Stakeholder* Terkait

Pengkoordinasian merupakan suatu kegiatan dalam membuat *stakeholder* yang terlibat bekerja sama secara harmonis dalam pelaksanaan program. Tujuan dari adanya pengkoordinasian adalah untuk mengumpulkan *stakeholder* yang terlibat dalam bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Jusuf dapat disimpulkan bahwa pengkoordinasian dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DISPERKIM) kepada *stakeholder* lain dilakukan melalui rapat koordinasi dan bersifat kondisional. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Mochammad Jusuf selaku Kepala Seksi

Perumahan dan Permukiman Bidang Perumahan dan Pertanahan

DISPERKIM Kota Malang:

“Pengkoordinasian itu kita membuat rapat koordinasi. Kalau mau rapat koordinasi sistemnya itu disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya ada permasalahan apa kita rapatkan, tidak rutin 1 bulan sekali. Rakoor sudah sering kita laksanakan.” *(Hasil Wawancara pada tanggal 29 Januari 2018 pukul 13.00 WIB di DISPERKIM Kota Malang)*

Hal serupa juga didukung oleh pernyataan dari Bapak Winardi selaku Koordinator Kota Program KOTAKU Kota Malang:

“Pelaksanaan rapat koordinasi untuk program kota tanpa kumuh sendiri sudah beberapa kali dilakukan ya mbak karena kan program kotaku di Kelurahan Gading Kasri sudah sejak 2016. Kemudian kalau koordinasi sih berjalan kalau ada sesuatu yang urgent harus dibicarakan. Misalnya mau menyelesaikan indikator apa yang diprioritaskan itu dikoordinasikan terlebih dahulu melalui rakoor lalu jika ada hambatan-hambatan juga kita selesaikan secepat mungkin melalui rakoor.” *(Hasil Wawancara pada tanggal 28 Februari 2018 pukul 11.15 WIB di Korkot Kota Malang)*



**Gambar 20. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program KOTAKU**

*Sumber: Dokumentasi Pribadi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang, 2018.*

DISPERKIM merupakan *leading sector* yang diamanahkan dalam menangani kawasan kumuh, termasuk program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Peran dan tanggung jawab DISPERKIM dalam hal pengkoordinasian antara *stakeholder* yang terlibat sangat besar. DISPERKIM harus mengkoordinasikan pelaksanaan program KOTAKU yang dilaksanakan oleh BKM dan juga KSM sebagai pelaksana di lapangan. Dalam proses perencanaan sampai pelaksanaan program KOTAKU, BKM selalu diikuti sertakan dalam rapat koordinasi tersebut. Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari Ibu Dewi Nurjannah selaku Koordinator BKM Kelurahan Gading Kasri Kota Malang:

“Setiap kali ada program itu kita selalu diundang, biasanya sih awal tahun itu pasti ada. Lurah, BKM dan KSM diundang menjadi satu. Kegiatannya itu berupa evaluasi dan proyeksi kedepannya apa dan DISPERKIM juga menyampaikan yang sudah dilaksanakan apa saja seperti drainase, pengaspalan yang memang dananya bersumber dari KOTAKU. Kemudian apa saja yang akan diselenggarakan jadi kita tahu. Kemudian kita pada waktu tertentu bertemu dengan faskel, jadi ada hal yang belum kami laksanakan itu diingatkan dari faskel tersebut. Jadi ya kita memang selalu berkoordinasi agar berjalan dengan sesama istilahnya mbak.”  
(Hasil Wawancara pada tanggal 7 Februari 2018 pukul 09.00 WIB di BKM Kelurahan Gading Kasri)

Maka dari itu metode yang digunakan oleh DISPERKIM untuk memudahkan Lurah, BKM, KSM dan juga Fasilitator Kelurahan dalam berkoordinasi yaitu melalui rapat koordinasi yang dikomandani oleh DISPERKIM. Dalam rapat koordinasi tersebut DISPERKIM juga dapat memonitoring terkait dengan proses pelaksanaan program KOTAKU yang dilaksanakan oleh BKM dan KSM Kelurahan Gading Kasri. Perihal pengkoordinasian dalam hal pencairan dana program KOTAKU dilakukan oleh Koordinator Kota (Korkot) dan mengundang seluruh BKM yang kelurahannya termasuk dalam SK Kumuh.

Kelurahan Gading Kasri dalam menangani masalah air bersih berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan filterisasi air dan pemeriksaan kualitas air karena kondisi air di Kelurahan Gading Kasri kurang baik. Pengkoordinasian juga dilakukan dengan UPT Pemadam Kebakaran dalam menangani masalah bahaya kebakaran untuk mengadakan pelatihan terkait cara sederhana memadamkan api. Jadi pengkoordinasian

menyesuaikan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kelurahan Gading Kasri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Joko dapat disimpulkan bahwa pengkoordinasian yang dilakukan oleh beberapa *stakeholder* yang terlibat selama pelaksanaan program KOTAKU berjalan dengan baik. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Joko Santoso selaku Ketua RT 11 RW 03 Kelurahan Gading Kasri:

“Alhamdulillah kalau di Kelurahan Gading Kasri ini *stakeholder* yang dari pemerintahnya sangat mendukung dan sangat antusias juga selalu memberikan arahan di lapangan dengan baik. Jadi mereka akan turun ke lapangan, bukan hanya sebagai formalitas tapi memang sebagai bahasa kami sebagai pengawas itu mereka yang memberikan masukan mungkin ada kekurangan dari masyarakat itu disampaikan pada rapat koordinasi yang masyarakat juga suka ikut disertakan.” (*Hasil Wawancara pada tanggal 6 Maret 2018 pukul 19.00 di Rumah Bapak Joko Santoso*)

Untuk kegiatan rapat koordinasi telah dilakukan secara rutin setiap bulannya oleh seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Gading Kasri. Hasil dari pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi pada tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel berikut:



**Tabel 8. Pelaksanaan Rapat Koordinasi dalam Pelaksanaan Program KOTAKU di Kelurahan Gading Kasri Tahun 2017**

No	Kegiatan	Bulan					
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
1	Rapat Koordinasi dalam Hal Perencanaan	■					
2	Rapat Koordinasi dalam Hal Pelaksanaan		■				
3	Rapat Koordinasi dalam Hal Pelaksanaan			■			
4	Rapat Koordinasi dalam Hal Pelaksanaan				■		
5	Rapat Koordinasi dalam Hal Pelaksanaan					■	
6	Rapat Koordinasi dalam Hal Pemberian Bimbingan					■	
7	Rapat Koordinasi dalam Hal Pelaksanaan						■
8	Rapat Koordinasi dalam Hal Pelaksanaan						

No	Kegiatan	Bulan					
		Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Rapat Koordinasi dalam Hal Pelaksanaan	■					
2	Rapat Koordinasi dalam Hal Pelaksanaan		■				
3	Rapat Koordinasi dalam Hal Pemberian Bimbingan			■			
4	Rapat Koordinasi dalam Hal Pelaksanaan				■		
5	Rapat Koordinasi dalam Hal Pelaksanaan					■	
6	Rapat Koordinasi dalam Hal Pelaksanaan						■
7	Rapat Koordinasi dalam Hal Hasil Pelaksanaan						

*Sumber: Olahan Peneliti berdasarkan Hasil Wawancara, 2018.*

Koordinasi antara *stakeholder* yang terlibat seperti DISPERKIM, BKM, KSM, SKPD terkait lainnya dan juga masyarakat sangat diperlukan dalam pelaksanaan program KOTAKU. Dengan adanya pengkoordinasian maka setiap *stakeholder* dapat melaksanakan pekerjaannya masing-masing secara harmonis. Maka hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program KOTAKU dapat maksimal dan sesuai dengan target waktu.

f. Pelaporan (*Reporting*) Program Kota Tanpa Kumuh meliputi Aspek  
Laporan Pertanggung Jawaban

Seluruh kegiatan yang termasuk dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dipertanggungjawabkan kepada Tim Koordinator Kota (Korkot). Hasil dari seluruh rangkaian kegiatan dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kelurahan Gading Kasri yang dipertanggungjawabkan melalui laporan tahunan berbentuk Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dan diserahkan kepada Tim Korkot. Tim Korkot juga harus menyerahkan laporan pertanggung jawaban tersebut kepada pusat karena program KOTAKU merupakan program tingkat nasional. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Mochammad Jusuf selaku Kepala Seksi Perumahan dan Permukiman Bidang Perumahan dan Pertanahan DISPERKIM Kota Malang:

“Yang menghimpun pelaporan berupa data kelurahan ini sudah tertangani berapa persen itu ada di Korkot. Tiap tahun ada bukunya perkota yang berisikan seluruh kelurahan. Yang kemudian laporan tahunan tersebut diserahkan ke pusat karena memang kan program kotaku itu dari DJCK ya mbak.” (*Hasil Wawancara pada tanggal 29 Januari 2018 pukul 13.00 WIB di DISPERKIM Kota Malang*)

Hal serupa juga didukung dari hasil wawancara dengan Ibu Dewi Nurjannah selaku Koordinator BKM Kelurahan Gading Kasri Kota Malang:

“Laporan pertanggung jawaban itu KSM membuat kemudian kita periksa dan juga kita mempunyai arsip lalu kita laporkan dan dibawa oleh korkot dan lpj tersebut juga dilaporkan ke pusat. Jadi ada pelaporan sampai pusat.” (*Hasil Wawancara pada tanggal 7 Februari 2018 pukul 09.00 WIB di BKM Kelurahan Gading Kasri*)



Sistem pelaporan hasil dari pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Gading Kasri sebelum diserahkan ke karkot terdapat evaluasi yang dilakukan oleh BKM dan juga Faskel Teknik. Apabila laporan pertanggung jawaban masih terdapat kekurangan dapat segera disesuaikan dan apabila telah sesuai akan dilakukan kegiatan sertifikasi. Dinyatakan sesuai apabila format dalam LPJ yang dikerjakan oleh KSM sudah lengkap sesuai dengan format LPJ dari pusat.

Untuk penyusunan LPJ dilakukan pada setiap akhir tahun, sedangkan untuk pelaporan hal pengelolaan keuangan dilakukan pada setiap bulan yang diperiksa oleh Karkot. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Winardi selaku Koordinator Kota Program KOTAKU Kota Malang:

“Kalau dalam pengelolaan keuangan setiap bulan itu mereka selalu update laporan ke kita, tapi sebenarnya kalau setiap kelurahan wajib pelaporannya itu ke masyarakat. Kalau ada stimulan dana mereka melaporkan pembelanjaan dananya ke karkot kemudian ke satker kan mediasinya itu di kita. Kalau kita pelaporannya ke pjnya, mulai dari tim fasilitator yang di kecamatan lalu laporan ke karkot kemudian ke provinsi, lalu provinsi laporan ke pusat.” *(Hasil Wawancara pada tanggal 28 Februari 2018 pukul 11.15 WIB di Karkot Kota Malang)*

Pelaporan secara rutin mengenai pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Gading Kasri kepada masyarakat sangat diperlukan. Keadaan sebaliknya juga pelaporan dari masyarakat khususnya KSM yang telah terbentuk kepada BKM maupun pihak pemerintah Kelurahan bersifat wajib. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan program yang bersifat transparansi dalam segi apapun dan sejauh ini masyarakat

Kelurahan Gading Kasri selalu melaporkan *progress* yang didapat selama pelaksanaannya. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Joko Santoso selaku Ketua RT 11 RW 03 Kelurahan Gading Kasri:

“Yang jelas kita mencoba sebagai masyarakat hanya bisa transparan saja untuk melaporkan njukuk duwek sa'mene metune sa'mene, ya sudah pembeliannya ini. Nanti bagaimana cara melaporkan sesuai format dikerjakan oleh KSM yang juga diberikan arahan oleh BKM. Kita memang meminta bantuan bkm biasanya karena kita ndak paham. Kita taunya wes pokoe njukuk duwek digawe blonjo onok bon'e, itu sudah cukup.” (*Hasil Wawancara pada tanggal 6 Maret 2018 pukul 19.00 di Rumah Bapak Joko Santoso*)

Setiap akhir tahun LPJ yang disusun berisikan *progress* secara keseluruhan selama pelaksanaan program KOTAKU, *progress* mengenai peningkatan kapasitas masyarakat, permasalahan yang berhasil ditangani baik infrastruktur maupun yang lainnya, pengelolaan kelembagaannya, dan dokumentasi dari hasil pelaksanaan program KOTAKU. Contoh dari hasil pelaksanaan program KOTAKU juga dapat dilihat berdasarkan dokumentasi peneliti sendiri sebagai berikut.



**Gambar 21. Hasil dari Pelaksanaan Program KOTAKU**

*Sumber: Hasil Dokumentasi Peneliti, 2018.*

Laporan pengelolaan keuangan yang dilaporkan secara bulanan juga dimasukkan ke LPJ tahunan karena itu menyangkut masuk dan keluarnya anggaran. Inti dari isi LPJ ini secara keseluruhan merupakan pencapaian hasil selama program KOTAKU dilaksanakan.

**B. Pelaporan Kegiatan Infrastruktur**

BKM Gading Kasri juga melaksanakan beberapa kegiatan, salah satunya adalah kegiatan infrastruktur. Adapun kegiatan infrastruktur BKM Gading Kasri selama tahun 2017 adalah sebagai berikut.

1. Adanya kegiatan dengan Dana BDI (Bantuan Dana Nasional) NSUP (Slum Upgrading Program) KOTAKU (PROGRAM KOTA TANPA KUMUH) Tahun Anggaran 2017.

Tabel 2. Kegiatan Program KOTAKU Tahap I

No	KSM	Kegiatan	Lokasi	Volume	Satuan	Total	BDI	Swadaya
1	Ipal RT 6	Ipal Fabrikasi 2m3 + SR	RT 06 RW 01	1	Unit	38.100.000	35.900.000	2.200.000
		Ipal Fabrikasi 3m3 + SR	RT 06 RW 01	1	Unit	46.300.000	43.900.000	2.400.000
		MCK	RT 06 RW 01	1	Unit	9.200.000	9.200.000	
2	Ipal RT 7	Ipal Fabrikasi 4m3 + SR	RT 07 RW 01	2	Unit	38.100.000	124.100.000	4.685.000
3	Ipal RT 9	Ipal Fabrikasi 2m3 + SR	RT 09 RW 01	1	Unit	38.100.000	32.400.000	2.176.000
		Ipal Fabrikasi 3m3 + SR	RT 09 RW 01	1	Unit	38.100.000	44.000.000	2.494.000
4	Drainase	Drainase	RT 02 RW 01	20	Unit	57.342.900	55.500.000	1.842.900
		<b>TOTAL</b>				-	<b>345.000.000</b>	<b>15.797.900</b>

Tabel 3. Kegiatan Program KOTAKU Tahap II

No	KSM	Kegiatan	Lokasi	Volume	Satuan	Total	BDI	Swadaya
1	Drainase II	Drainase beton bertulang	RT 02, 03 & 09 RW 01	125.5	M'	119.060.000	<b>116.000.000</b>	3.060.000
2	Paving	Pembangunan saluran air & Paving	RT 09 RW 01	49	M'	23.560.000	<b>22.000.000</b>	1.560.000
4	Drainase PVC	Pembangunan saluran air 6"	RT 03 RW 01	90	M'	13.125.000	<b>12.000.000</b>	1.125.000
		<b>TOTAL</b>				-	<b>150.000.000</b>	<b>5.745.000</b>

**Gambar 22. Contoh Laporan Keuangan dalam LPJ Program KOTAKU Kelurahan Gading Kasri Tahun 2017**

*Sumber: Hasil Dokumentasi Peneliti, 2018.*

g. Penganggaran (*Budgeting*) Program Kota Tanpa Kumuh meliputi Aspek  
Penyusunan Anggaran Biaya

Penganggaran dalam rangka pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Gading Kasri mengkaji terkait penyusunan anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan dan anggaran pengeluaran. Adapun perlunya penyusunan anggaran biaya agar pendapatan dan pengeluaran sesuai dengan yang telah diperhitungkan. Dalam penyusunan anggaran biaya yang perlu diperhatikan yaitu sumber biaya pendapatan yang diterima oleh Kelurahan Gading Kasri, total biaya pendapatan, alokasi biaya pengeluaran beserta dengan rinciannya dan total biaya pengeluaran dari hasil pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Gading Kasri.

Setiap awal tahun Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam hal penyusunan anggaran membuat suatu dokumen yang dinamakan Rencana Anggaran Pembelanjaan (RAP). RAP merupakan perincian dari rencana anggaran pendapatan dan anggaran pengeluaran. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Dewi Nurjannah selaku Koordinator BKM Kelurahan Gading Kasri Kota Malang:

“Kalau anggaran dari internal BKM sendiri itu setiap awal tahun kita selalu membuat Rencana Anggaran Pembelanjaan (RAP) jadi pendapatan dan pembelanjaan dari internal BKM untuk satu tahun kedepan itu sumber dananya dari mana saja misalnya dari pendapatan UPK, dana operasional, dan BOP. Kemudian pengeluarannya untuk apa saja termasuk dalam pengkajian kemudian untuk rapat. Jadi memang selalu ada penganggaran seperti itu dalam BKM.” (*Hasil Wawancara pada tanggal 7 Februari 2018 pukul 09.00 WIB di BKM Kelurahan Gading Kasri*)

Kegiatan penganggaran yang dilakukan oleh BKM juga didampingi oleh tim faskel dalam penyusunan RAP. Apabila RAP tersebut telah rampung diserahkan kepada DISPERKIM untuk disesuaikan dan diperiksa agar meminimalisir terjadinya kekurangan biaya. Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari Bapak Winardi selaku Koordinator Kota Program KOTAKU Kota Malang:

“SKPD yang lebih intens dalam urusan penganggaran untuk program KOTAKU itu disperkim kan karena disitu kawasan permukiman pokjanya ada disitu. Di beberapa tempat kita melakukan intervensi pendanaan melalui beberapa bidang.” *(Hasil Wawancara pada tanggal 28 Februari 2018 pukul 11.15 WIB di Korkot Kota Malang)*

Penyusunan anggaran biaya untuk program KOTAKU di Kelurahan Gading Kasri disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang yang dilakukan oleh DISPERKIM. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan Bapak Mochammad Jusuf selaku Kepala Seksi Perumahan dan Permukiman Bidang Perumahan dan Pertanahan DISPERKIM Kota Malang:

“Kalau penyusunan anggaran kita tergantung apbd juga, misalnya ada kegiatan seperti ini dipatok anggaran sekian, sekian itu dianggarkan untuk seperti itu nanti kalau tahun berikutnya apbd naik mungkin akan ikut naik.” *(Hasil Wawancara pada tanggal 29 Januari 2018 pukul 13.00 WIB di DISPERKIM Kota Malang)*

Masyarakat Kelurahan Gading Kasri juga diikuti sertakan dalam penyusunan RAP. Fungsi masyarakat dalam keterlibatan mengikuti kegiatan ini adalah memberikan saran-saran dan juga rekomendasi terkait dengan



kebutuhan Kelurahan Gading Kasri dalam pelaksanaan program KOTAKU.

Seperti yang dikemukakan dari hasil wawancara dengan Bapak Joko

Santoso selaku Ketua RT 11 RW 03 Kelurahan Gading Kasri:

“Masyarakat diikutsertakan dalam hal perencanaan anggaran kok mbak, karena misalnya batubata kita bisa memberikan gambaran toko a sekian toko b sekian dan toko c sekian ya monggo karena kan yang bikin secara teknis loh ya yang bikin RAP itu adalah BKM dan faskel dalam artian bentuk-bentuk secara bakunya. Kita hanya memberikan kontribusi dan masukan-masukan kebutuhan kita seperti ini loh, ada toko yang jual harga misalnya batu bata sekian toko ini sekian silahkan monggo. Jadi sistemnya seperti itu. Bukan karena kita tidak mampu dan tidak bisa tapi kita tidak memahami. Masyarakat tidak akan pernah memahami yo opo akuntansine atau perencanaan secara teknis iku gambarannya yo opo. Itu dibantu oleh faskel, bkm, dan tim tim yang lain kalau seperti itu.” *(Hasil Wawancara pada tanggal 6 Maret 2018 pukul 19.00 di Rumah Bapak Joko Santoso)*

Partisipasi dari masyarakat dalam penyusunan RAP sangat penting karena masyarakat sendiri yang nantinya merasakan hasil dari pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Gading Kasri. Fungsi dari melibatkan masyarakat juga mewujudkan transparansi anggaran dalam program KOTAKU di Kelurahan Gading Kasri. Hal itu diharapkan dapat membuat seluruh *stakeholder* melakukan pekerjaannya dalam program KOTAKU secara harmonis.





KOTAKU yang bersifat internal terkait *stakeholder* yang terlibat. Faktor internal meliputi kekuatan dan kelemahan dalam struktur program KOTAKU. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan program KOTAKU di luar *stakeholder* yang terlibat. Faktor eksternal meliputi peluang dan ancaman dari luar struktur program KOTAKU.

Untuk membahas dan memahami lebih lanjut terkait faktor pendukung dan juga faktor penghambat pada pelaksanaan program KOTAKU dalam perspektif fungsi administrasi akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

1) Faktor Internal

- a) Adanya Peraturan Menteri PUPR Nomor 02/PRT/M/2016 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai payung hukum

Adanya payung hukum tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yaitu Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2016 ini bertujuan dapat mengoptimalkan pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh di Kota Malang, termasuk Kelurahan Gading Kasri. Seperti yang telah dijelaskan melalui wawancara dengan Bapak Winardi selaku Koordinator Kota Program KOTAKU Kota Malang sebagai berikut:

“Program KOTAKU itu kan program nasional dari Kementerian PUPR jadi memang ada peraturan menteri yang dijadikan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan nantinya. Acuannya itu ya dari Permen Nomor 2 tahun 2016. Dengan adanya permen tersebut termasuk salah satu faktor

pendukung dalam melaksanakan program KOTAKU dengan lebih baik dalam segi apapun. Agar programnya dapat memberikan hasil yang maksimal juga jadi dari perencanaan sampai ke tahap pelaksanaan menyesuaikan dengan permen tersebut mbak.” (*Hasil Wawancara pada tanggal 28 Februari 2018 pukul 11.15 WIB di Korkot Kota Malang*)

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 dibentuk sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan setiap orang dalam penyelenggaraan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni perumahan kumuh dan permukiman kumuh juga salah tujuan dari dibentuknya Peraturan Menteri ini. Pada peraturan ini juga terdapat aturan mengenai pengelolaan permukiman kumuh yang dilakukan oleh masyarakat secara swadaya dan juga difasilitasi oleh pemerintah daerah. Melalui Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 diharapkan dapat memudahkan dalam pelaksanaan program KOTAKU di seluruh Indonesia, termasuk Kelurahan Gading Kasri yang menjadi salah satu lokasi penanganan di Kota Malang.

#### b) Peran Pemerintah Daerah

Dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh khususnya melalui pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Pemerintah Daerah bekerja keras untuk menyukseskan program tersebut. Pemerintah daerah yaitu Pemerintah Kota Malang dan Pemerintah di tingkat Kelurahan memimpin pelaksanaan program

KOTAKU yang dilakukan secara kolaboratif. Peran pemerintah daerah ini sangat dibutuhkan dalam program KOTAKU di Kelurahan Gading Kasri agar dapat dilaksanakan secara maksimal. Perannya tersebut mencakup antara lain yaitu pengembangan kapasitas dalam perencanaan dan pelaksanaan penanganan permukiman kumuh tingkat kabupaten/kota, penyusunan rencana penanganan permukiman kumuh tingkat kota termasuk rencana investasi dengan pembiayaan dari berbagai sumber (pusat, provinsi, kabupaten/kota, masyarakat, swasta, dll), perbaikan serta pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur tingkat kota (primer atau sekunder) yang terkait langsung dengan penyelesaian permasalahan di permukiman kumuh, dan penyediaan bantuan teknis untuk memperkuat sistem informasi dan *monitoring* penanganan permukiman kumuh, mengkaji pilihan-pilihan untuk penyelesaian masalah tanah/lahan, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mochammad Jusuf selaku Kepala Seksi Perumahan dan Permukiman Bidang Perumahan dan Pertanahan DISPERKIM Kota Malang dapat ditarik kesimpulan bahwa peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan program KOTAKU dijalankan dengan baik, dapat dilihat sebagai berikut:

“Faktor pendukung dalam berlangsungnya program KOTAKU itu berasal dari dinas lain juga. Memang tulang punggungnya kumuh itu disperkim, tapi support dari dinas lain terbilang besar. Diantaranya Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial. Kalau tinjauan ke

lapangan ditemani dengan dinas-dinas itu. Jadi kerjasama antar SKPD yang terlibat sangat baik bisa dibilang mbak.” *(Hasil Wawancara pada tanggal 29 Januari 2018 pukul 13.00 WIB di DISPERKIM Kota Malang)*

Kelurahan Gading Kasri memiliki Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang dapat dikatakan baik. Pengurus dari BKM ini memiliki sifat kepemimpinan dan kesadaran yang tinggi. Sehingga hal tersebut dapat memudahkan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Hal ini dijelaskan dalam wawancara dengan Ibu Dewi Nurjannah selaku Koordinator BKM Kelurahan Gading Kasri Kota Malang sebagai berikut:

“Alhamdulillah pengurus yang ada di dalam BKMnya kepemimpinannya tinggi. Dari yang aktif-aktif itu kepemimpinannya cukup tinggi lah mbak, itu juga sangat mendukung. Kebetulan pengurus disini itu juga artinya karena memang harus ngantor itu juga sangat mendukung, sehingga LPJ bisa dilaksanakan dan diselesaikan tepat waktu. Itukan salah satu pendukung kegiatan organisasi berjalan dengan baik dengan dikumpulkannya laporan tiap bulan selalu ada. Tim faskel juga sangat membantu. Jadi kalau secara internal insyaallah kebetulan apa yang harus kami lakukan kita berusaha melaksanakan. Tutup buku juga tidak lupa sudah kita siapkan dari Desember. Alhamdulillah komitmennya bagus.” *(Hasil Wawancara pada tanggal 7 Februari 2018 pukul 09.00 WIB di BKM Kelurahan Gading Kasri)*

Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Gading Kasri dapat memberikan manfaat secara keseluruhan baik yang dirasakan oleh pihak pemerintah kota, SKPD terkait, BKM, KSM, dan masyarakat. Hal tersebut dapat mewujudkan keadaan yang kondusif dan harmonis khususnya pada





KOTAKU di masing-masing wilayah. Kelurahan Gading Kasri termasuk wilayah yang mendapatkan bantuan dana investasi tersebut.

Kelurahan Gading Kasri melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam menerima bantuan dana investasi akan disampaikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat dapat merasakan transparansi dana yang masuk untuk program KOTAKU. Hal ini sesuai dari hasil wawancara dengan Ibu Dewi Nurjannah selaku Koordinator BKM Kelurahan Gading Kasri Kota Malang sebagai berikut:

“Kalau dari eksternal ya alhamdulillah KSM dapat melaksanakan kegiatan dengan baik menggunakan bantuan dana investasi yang disampaikan ke masyarakat bisa dilaksanakan dengan baik artinya semua sesuai. Dalam penyampaian kepada masyarakat kita berupaya melibatkan perwakilan dari semua RT itu ada, jadi nanti dijelaskan oleh yang datang pada saat itu. Alhamdulillah sampai saat ini cukup banyak masyarakat yang peduli soal pendanaan program KOTAKU.” *(Hasil Wawancara pada tanggal 7 Februari 2018 pukul 09.00 WIB di BKM Kelurahan Gading Kasri)*

Penyampaian terkait bantuan dana investasi kepada masyarakat Kelurahan Gading Kasri diharapkan dapat dilakukan dengan baik, karena masyarakat itu yang nantinya merasakan hasil dari penggunaan dana tersebut. Melalui bantuan dana investasi juga diharapkan program KOTAKU dapat dilaksanakan dengan memperoleh hasil yang maksimal.



## b. Faktor Penghambat

### 1) Faktor Internal

- a) Kurangnya partisipasi dalam kepengurusan badan keswadayaan masyarakat

Keterlibatan dari seluruh *stakeholder* dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Gading Kasri tidak akan dapat berjalan secara efektif apabila kurang adanya partisipasi dari salah satu *stakeholder* ataupun lebih. Salah satu *stakeholder* yang memiliki peran cukup besar dalam program KOTAKU di Kelurahan Gading Kasri adalah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Secara garis besar BKM berperan aktif dalam pelaksanaannya, tetapi masih terdapat beberapa pengurus yang kurang ikut berpartisipasi.

Hal yang membuat beberapa pengurus kurang dalam berpartisipasi dalam pelaksanaan program KOTAKU yaitu terdapatnya urusan dan prioritas yang berbeda dari masing-masing individu tersebut. Ini menjadikan salah satu kelemahan dalam pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Gading Kasri. Seperti telah dijelaskan oleh Ibu Dewi Nurjannah selaku Koordinator BKM Kelurahan Gading Kasri Kota Malang sebagai berikut:

“Internal jujur saja suka ada pengurus BKM yang kurang dapat mengikuti perkembangannya itu apa hanya 1 dan 2 orang karena tidak bisa aktif karena kesibukannya. Kita berharap pimpinan kolektif BKM itu walaupun tidak bisa setiap saat mengikuti rapat tapi harus tetap mengikuti

perkembangannya kegiatan program kotak u yang sedang dilaksanakan.” (*Hasil Wawancara pada tanggal 7 Februari 2018 pukul 09.00 WIB di BKM Kelurahan Gading Kasri*)

b) Tuntutan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan bidangnya

Pelaksanaan suatu pekerjaan agar lebih cepat diselesaikan harus sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Hal ini menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam cepat lambatnya dan berhasil gagalnya pelaksanaan suatu pekerjaan. Pada kenyataannya di Kelurahan Gading Kasri dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) masih terdapat beberapa pembagian pekerjaan yang tidak sesuai dengan bidangnya. Sehingga hal tersebut dapat memicu adanya suatu tuntutan yang terlalu dipaksakan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Joko Santoso selaku Ketua RT 11 RW 03 Kelurahan Gading Kasri sebagai berikut:

“ada suatu kendala atau penghambat lah yo ini namanya. Jadi terlalu kaku dalam hal yang kita tidak paham, contoh administrasi yo masyarakat opo sing paham administrasi. Tapi dari atas seperti bkm atau mungkin atasnya lagi menuntut harus seperti itu nah ini yaopo carane formula’e digalekno laporan sing benar tapi masyarakat iso paham, yang semudah mungkin lah tapi benar. Jadi ya itu, ya opo carane pekerjaan itu tidak terganggu tapi laporan juga jalan pelaporan juga layak dan accountable jarene wong kuliah pokoe iso diboco lah.” (*Hasil Wawancara pada tanggal 6 Maret 2018 pukul 19.00 di Rumah Bapak Joko Santoso*)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat di Kelurahan Gading Kasri merasa dituntut mengerjakan suatu pekerjaan yang sulit dipahami oleh mereka.

Masyarakat berharap BKM ataupun Pemerintah Daerah lainnya dalam memberikan pekerjaan perlu memerhatikan keahlian yang dimiliki atau dengan cara lain seperti format perlu diubah yang sekiranya sesuai dengan kemampuan masyarakat. Sehingga masyarakat tidak akan merasa tertuntut oleh pekerjaan yang harus diselesaikan.

## 2) Faktor Eksternal

### a) Perbedaan pendapat antar masyarakat

Pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) memerlukan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat. Untuk Kelurahan Gading Kasri partisipasi dari masyarakatnya sudah dapat dikatakan baik, walaupun masih ada beberapa masyarakat yang keaktifannya tidak menentu. Salah satu peran masyarakat dalam pelaksanaan program KOTAKU yaitu menyampaikan seluruh pendapat yang masyarakat inginkan terkait dengan jalannya program KOTAKU untuk wilayahnya. Pendapat yang disampaikan oleh masyarakat pasti berbeda-beda.

Dengan adanya kondisi beberapa masyarakat yang keaktifannya tidak menentu dan banyaknya pendapat yang disampaikan berbeda-beda dapat menjadi suatu hambatan dalam pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Gading Kasri. Hal tersebut diperkuat dari hasil wawancara dengan Bapak Mochammad Jusuf selaku Kepala Seksi Perumahan dan Permukiman Bidang Perumahan dan Pertanahan DISPERKIM Kota Malang sebagai berikut:

“Kalau penghambat dari eksternal itu biasanya gini mbak dalam satu kawasan masyarakat itu berbeda-beda, misalnya perencanaan sudah jadi tetapi ada beberapa masyarakat yang tidak ingin dilalui saluran seperti itu. Maka dari itu dibatalkan, karena jika dilanjutkan nanti ada bentrok fisik antara tukang dengan masyarakat akhirnya kita rapatkan lagi dengan tokoh masyarakat dengan rw mintanya bagaimana kita alihkan bagaimana ini dana sudah ada tinggal pelaksanaan seperti apa kan perencanaan berubah lagi. Kebanyakan kita mengalah pada masyarakat walaupun itu sudah ditandatangani oleh rt rw kelurahan, daripada bentrok antara masyarakat dengan tukang di lapangan maka kita mengakomodir permasalahan tersebut.” *(Hasil Wawancara pada tanggal 29 Januari 2018 pukul 13.00 WIB di DISPERKIM Kota Malang)*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu perencanaan yang telah ditetapkan masih dapat berubah apabila di dalam proses berjalannya program KOTAKU terdapat masalah seperti perbedaan pendapat di kalangan masyarakat. Apabila ada beberapa masyarakat yang tidak setuju terhadap kegiatan yang akan dikerjakan itu mau tidak mau pasti dibatalkan, karena masyarakat nantinya yang merasakan hasil di wilayah tempat tinggalnya dari pelaksanaan program KOTAKU. Dalam penyelesaian permasalahan seperti ini, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ikut andil dalam mengumpulkan seluruh masyarakat untuk mencari solusi yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan seluruh masyarakat Kelurahan Gading Kasri. Dengan adanya permasalahan seperti ini diharapkan seluruh masyarakat dapat berpartisipasi aktif sampai program KOTAKU selesai dilaksanakan agar tidak terjadinya penyusunan perencanaan secara berulang-ulang.

b) Peran kelompok swadaya masyarakat

Dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Gading Kasri terdapat semacam panitia pelaksana kegiatan yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). KSM ini yang nantinya melaksanakan dan juga mengatur seluruh kegiatan pada saat di lapangan. Peran KSM dalam program KOTAKU selain sebagai pelaksana juga ikut serta sebagai perumus perencanaan dalam rangka pelaksanaannya.

Suatu perencanaan dalam rangka pelaksanaan program KOTAKU yang telah disusun diharapkan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Akan tetapi, di Kelurahan Gading Kasri terdapat suatu hambatan antara perencanaan yang telah disusun oleh KSM dengan pelaksanaan pada saat di lapangannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dewi Nurjannah selaku Koordinator BKM Kelurahan Gading Kasri Kota Malang sebagai berikut:

“Kalau eksternal ada kalanya KSM yang kadang apa yang dirancang itu kadang di lapangan tidak sesuai artinya sudah diperhitungkan misal ipal biofil kita pasang disini tapi pada saat pelaksanaannya itu ternyata sumber air jadi agak sulit karena harus siap pompa karena tanahnya yang rendah. KSM juga ada kalanya pada saat penyusunan perencanaan itu harus selalu diingatkan seperti pembuatan RAP berapa kemudian dana yang akan diambil berapa. Penerima dan pengeluaran dananya KSM harus dibuat catatan sendiri, itu pasti selalu kita koordinasikan dan kita evaluasi setiap minggu. Itu untuk mengurangi hambatan hambatan kita selalu komunikasi jadi tahu apa kendala yang terdapat di KSM dan kita bisa memberi masukan. Paling tidak seminggu sekali kita harus bertemu agar KSM melaporkan kendalanya dimana dan progressnya sampai dimana.” (*Hasil Wawancara pada*

*tanggal 7 Februari 2018 pukul 09.00 WIB di BKM Kelurahan Gading Kasri)*

Berdasarkan permasalahan yang ada di Kelurahan Gading Kasri dapat ditarik kesimpulan bahwa saat perumusan perencanaan seluruh *stakeholder* yang terlibat khususnya KSM, karena termasuk masyarakat setempat perlu lebih memerhatikan kondisi wilayah yang akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah dibuat sebelumnya. KSM di Kelurahan Gading Kasri juga masih bergantung dengan BKM, misalnya KSM dalam melaksanakan suatu pekerjaan menunggu arahan dari BKM. Dalam menangani permasalahan seperti ini, BKM selalu mengkoordinasikan dan mengadakan evaluasi dengan KSM. Sehingga kendala dan *progress* terkait pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Gading Kasri dapat diketahui oleh seluruh *stakeholder* yang terlibat.

### **C. Analisis Data**

Uraian yang terdapat pada analisis data ini berupaya memaparkan temuan-temuan pokok hasil penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Gading Kasri. Hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis dengan teori-teori yang digunakan pada tinjauan pustaka.



1. Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh dalam Perspektif Fungsi Administrasi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang dan di Kelurahan Gading Kasri Kota Malang
  - a. Perencanaan (*Planning*) Program Kota Tanpa Kumuh meliputi Aspek Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP)

Pada penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam perspektif fungsi administrasi di Kelurahan Gading Kasri. Fungsi administrasi merupakan suatu langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pelaksanaan suatu program agar mempermudah dalam mencapai tujuan dari program tersebut. Menurut Luther M. Gullick dalam karyanya "*Papers on the Science of Administration*" yang dikutip oleh Siagian (2014:84) menyebutkan bahwa fungsi administrasi yang pertama adalah *planning* (perencanaan).

Menurut Siagian (2014:88) menyatakan bahwa *planning* atau perencanaan merupakan keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dimaksudkan agar pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Gading Kasri berjalan dengan lancar, karena sudah ada acuan yang dimuat dalam perencanaan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, Kelurahan Gading Kasri melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) telah memiliki suatu perencanaan yang dijadikan acuan pada saat



pelaksanaan program KOTAKU. Perencanaannya dipaparkan dalam bentuk dokumen yang dinamakan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP).

Saat proses penyusunan RPLP yang terdiri dari beberapa tahapan BKM juga melibatkan partisipasi dari masyarakat. Hal ini sesuai dengan salah satu poin dari empat premis yang dikemukakan oleh Siagian (2014:89) yaitu bahwa suatu organisasi harus selalu memperhatikan kondisi-kondisi serta situasi dalam masyarakat, baik bersifat positif yang berarti mendorong ke arah majunya organisasi, maupun bersifat negatif, dengan kemungkinan akan menghalangi kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan. Tahapan yang pertama yaitu membuat *database line* terkait dengan permasalahan yang ada di Kelurahan Gading Kasri. Maka seluruh masyarakat di Kelurahan Gading Kasri diminta untuk bekerja sama dalam membuat suatu laporan yang berisikan permasalahan di wilayahnya baik di bidang infra, sosial, dan fasilitas-fasilitas publik lainnya. Sehingga dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam melaporkan seluruh permasalahan yang ada di wilayahnya, itu artinya kondisi seluruh masyarakat Kelurahan Gading Kasri telah tertuangkan di dalam laporan tersebut.

Selanjutnya melalui laporan yang berisikan permasalahan di Kelurahan Gading Kasri, BKM dan juga masyarakat dapat merencanakan beberapa kegiatan yang akan dilakukan agar permasalahan tersebut dapat tertangani. Perencanaan untuk pelaksanaan program KOTAKU juga disesuaikan dengan lokasi prioritas yang sebelumnya telah diperhitungkan

sesuai dengan tingkat kekumuhan masing-masing wilayah. Penentuan lokasi prioritas dilakukan dalam kegiatan pemetaan swadaya yang melibatkan BKM, Pak Lurah, dan seluruh masyarakat.

Menurut Siagian (2014:90) fungsi perencanaan dapat dilaksanakan dengan baik salah satunya yaitu harus mengetahui sifat-sifat atau ciri-ciri suatu rencana yang baik. Adapun ciri-ciri itu ialah sebagai berikut:

- 1) Rencana harus mempermudah tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
- 2) Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh memahami tujuan organisasi.
- 3) Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mendalami teknik-teknik perencanaan.
- 4) Rencana harus disertai oleh suatu rincian yang teliti.
- 5) Rencana tidak boleh terlepas sama sekali dari pemikiran pelaksanaan.
- 6) Rencana harus bersifat sederhana.
- 7) Rencana harus luwes.
- 8) Di dalam rencana terdapat tempat pengambilan risiko.
- 9) Rencana harus bersifat praktis (pragmatis).
- 10) Rencana harus merupakan *forecasting*.

Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap perencanaan milik Kelurahan Gading Kasri yaitu RPLP telah berdasarkan kesepuluh ciri-ciri tersebut. Penyusunan RPLP telah sesuai dengan tujuan adanya program KOTAKU yaitu untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan

pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Kemudian RPLP juga dibuat oleh sekelompok orang yang paham dan ahlinya dalam hal perencanaan. Sekelompok orang tersebut ialah BKM dan juga dibantu oleh Faskel Teknik.

RPLP menyajikan strategi dan konsep dalam kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh kelurahan secara rinci dan detail yaitu seperti kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, lokasi prioritas, pembiayaan, target waktu dan hasil yang diharapkan. RPLP juga tidak terlepas dari pemikiran-pemikiran masyarakat ataupun KSM yang dibentuk sebagai pelaksana pada saat di lapangan. Selain itu penyusunan RPLP juga telah berdasarkan pengamatan para *stakeholder* yang terlibat dalam hal perencanaan mengenai kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi pada saat pelaksanaan.

Menurut Pasolong (2011:85) terdapat 2 elemen dalam proses perencanaan yaitu penetapan tujuan dan menentukan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kegiatan-kegiatan tersebut telah dipaparkan dalam RPLP pada bagian konsep prioritas, antara lain kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan sebagai berikut:

- 1) Penataan bangunan, yakni dengan pembongkaran bangunan untuk pelebaran jalan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas aliran sungai;

- 2) Peningkatan pelayanan air minum, yakni penyediaan sambungan rumah tangga PDAM bagi masyarakat yang belum terlayani PDAM;
- 3) Penataan sanitasi, yakni penyediaan biofill fabrikasi komunal untuk mencegah pembuangan limbah masyarakat ke dalam sungai yang dapat mencemari lingkungan;
- 4) Penataan saluran drainase, yakni pembuatan saluran drainase baru di permukiman yang belum dilalui saluran drainase, normalisasi saluran untuk mencegah genangan dan banjir serta pembuatan biopori di kawasan permukiman padat yang tidak dapat dilakukan pembangunan saluran drainase;
- 5) Penataan sistem persampahan, yakni penyediaan komposter untuk meningkatkan pengolahan sampah organik;
- 6) Penataan jalan lingkungan, yakni perbaikan perkerasan jalan lingkungan dengan peningkatan kualitas paving;
- 7) Penyediaan RTH publik, yakni pembuatan taman skala RW yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai area rekreasi.

b. Pengorganisasian (*Organizing*) Program Kota Tanpa Kumuh meliputi  
Aspek Struktur Organisasi Pegawai

Dalam penelitian ini yang dikaji terkait dengan pengorganisasian yaitu struktur organisasi pegawai dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Gading Kasri baik dari penyusunan sampai penetapan bentuk struktur. Program KOTAKU merupakan program

nasional yang memegang tanggung jawab terbesar adalah Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Untuk pelaksanaan program KOTAKU di tingkat kota diserahkan kepada Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) yang terdiri dari berbagai unsur pemerintah kota.

Menurut (Siagian, 2014:95) mengatakan bahwa pengorganisasian merupakan keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Berdasarkan yang telah dipaparkan pada penyajian data, untuk program KOTAKU telah ada pengelompokan orang-orang di tingkat nasional maupun kota dan adanya pembagian tugas yang jelas di tim-tim pelaksana yang tergabung dalam Pokja PKP pada tingkat kota.

Menurut hasil wawancara dengan pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk sistem pengorganisasian program KOTAKU di tingkat kota tidak ada struktur organisasi khusus, melainkan setiap SKPD telah memiliki tim masing-masing yang tergabung dalam Pokja PKP. Meskipun tidak ada struktur organisasi yang spesifik, tetapi pembagian tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing SKPD tetap dilaksanakan sesuai arahan dari pusat yang telah dijelaskan pada penyajian data. Pembagian tugas sesuai dengan tupoksi ini diperlukan agar tidak terjadinya tumpang tindih selama pelaksanaan program KOTAKU.

Untuk pelaksanaan program KOTAKU di tingkat kelurahan, salah satu unsur pelaksana yang perannya paling besar adalah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). BKM dalam sistem pengorganisasiannya tergambarkan dengan struktur organisasi. Menurut Wijayanto (2012:128) menyatakan bahwa pada struktur organisasi terdapat pola hubungan antar anggota organisasi dan dalam struktur organisasi juga akan tergambarkan peta garis kewenangan dan komunikasi. Struktur organisasi BKM Kelurahan Gading Kasri yang telah ditampilkan pada penyajian data merupakan gambaran pola hubungan antar jabatan. Melalui bentuk struktur organisasi yang seperti itu juga dapat menggambarkan alur koordinasi, maka setiap individu dapat mengetahui arah pemberian dan penerima perintah dalam pelaksanaan suatu pekerjaan.

Badan Keswadayaan Masyarakat melakukan kerjasama dengan para relawan atau orang-orang peduli di lingkungan yang berasal dari masyarakat untuk membentuk suatu tim panitia pelaksana kegiatan. Tim panitia pelaksana kegiatan tersebut dinamakan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). KSM ini juga memiliki struktur organisasi yang telah ditampilkan pada penyajian data. Sehingga dengan dibentuknya struktur organisasi untuk KSM, pembagian kerja pada saat di lapangan menjadi lebih jelas. Sistem pengorganisasian pada KSM ini sesuai dengan pernyataan dari Pasolong (2011:85) bahwa pengorganisasian adalah suatu proses pembagian kerja yang disertai dengan pendelegasian wewenang.

Kelompok Swadaya Masyarakat dalam pelaksanaan program KOTAKU juga didampingi oleh Fasilitator Kelurahan (Faskel). Pelaksanaan program KOTAKU ini dilakukan secara swadaya, jadi seluruh *stakeholder* yang terlibat harus berpartisipasi dalam setiap rangkaian kegiatan dalam program KOTAKU. Apabila fungsi pengorganisasian ini berhasil untuk diterapkan, maka dapat menciptakan suatu organisasi yang baik. Menurut Siagian (2014:97) yang dimaksud dengan organisasi yang baik adalah suatu organisasi yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Terdapat tujuan yang jelas.
- 2) Tujuan organisasi harus dipahami oleh setiap orang di dalam organisasi.
- 3) Tujuan organisasi harus diterima oleh setiap orang dalam organisasi.
- 4) Adanya kesatuan arah (*unity of direction*).
- 5) Adanya kesatuan perintah (*unity of command*).
- 6) Adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab seseorang.
- 7) Adanya pembagian tugas (*distribution of work*).
- 8) Struktur organisasi harus disusun sesederhana mungkin.
- 9) Pola dasar organisasi harus relatif permanen.
- 10) Adanya jaminan jabatan (*security of tenure*).
- 11) Imbalan yang diberikan kepada setiap orang harus setimpal dengan jasa yang diberikan.



- 12) Penempatan orang yang sesuai dengan keahliannya (*the right man in the right place*).

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti sistem pengorganisasian yang digunakan pada setiap *stakeholder* yang terlibat dalam program KOTAKU di Kelurahan Gading Kasri telah mewujudkan ciri-ciri organisasi yang baik. Dapat dilihat bahwa setiap organisasi yang dibentuk memiliki tujuan yang jelas yang dipahami oleh seluruh anggota dalam organisasi tersebut, adanya kesatuan tekad untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, adanya pembagian pekerjaan, adanya struktur organisasi, dan adanya penempatan jabatan sesuai dengan keahlian masing-masing.

c. Pengadaan Tenaga Kerja (*Staffing*) Program Kota Tanpa Kumuh meliputi Aspek Manajemen Kepegawaian

Pengadaan tenaga kerja atau *staffing* yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah manajemen kepegawaian mulai dari rekrutmen sampai penempatan pegawai sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Kegiatan pengadaan tenaga kerja untuk program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) pada tingkat kota sesuai dengan arahan dari pusat. Arahan dari pusat ini dimaksudkan dengan telah ada keputusan mengenai tenaga kerja yang akan melaksanakan program KOTAKU pada tingkat kota. Tenaga kerja tersebut ialah seluruh orang yang tergabung dalam Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP). Pokja PKP ini tidak melakukan rekrutmen pegawai, melainkan telah ditunjuk perwakilan-perwakilan dari setiap SKPD sesuai dengan fokusnya masing-masing. Hal ini sesuai dengan

pernyataan dari Pasolong (2011:85) bahwa *staffing* ialah suatu proses untuk memperoleh tenaga yang tepat, baik dalam jumlah maupun kualitas sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dalam organisasi. Dengan sistem yang seperti itu, Pokja PKP Nasional telah merancang dan memilih pegawai di Pokja PKP tingkat kota sesuai dengan jumlah dan kualitas yang dibutuhkan.

Terdapat perbedaan sistem pengadaan tenaga kerja di tingkat kota dan di tingkat kelurahan. Pada tingkat kelurahan program KOTAKU dilaksanakan oleh BKM. BKM dalam pengadaan tenaga kerja melakukan rekrutmen secara terbuka untuk masyarakat sekitar yang harus melewati tahap wawancara. Sistem kerja yang digunakan oleh BKM adalah sistem kontrak pertahun. Keberlanjutan masa kerja sesuai dengan kinerja pegawai tersebut selama masa kerja berlaku. Hal ini ada beberapa yang relevan dengan pernyataan dari Terry (2014:112) bahwa *staffing* merupakan kegiatan merekrut, memilih, mempromosikan, memindahkan dan pengunduran diri dari para anggota manajemen. Kegiatan pengadaan tenaga kerja yang dilaksanakan oleh BKM ada kegiatan merekrut dan memilih pegawai. Untuk kegiatan mempromosikan, memindahkan, dan pengunduran diri itu tidak terdapat di dalam kegiatan pengadaan tenaga kerja untuk BKM, karena dengan adanya sistem kontrak pegawai tersebut tidak bisa pindah dari posisi yang ditempatkan dan tidak bisa mengundurkan diri sebelum masa kerjanya selesai.

Kegiatan rekrutmen juga berlaku untuk mengisi posisi fasilitator kelurahan (faskel). Rekrutmen untuk faskel ini didasarkan sesuai dengan

kebutuhan. Dalam penelitian ini yang dimaksudkan dengan sesuai kebutuhan adalah apabila faskel membutuhkan tambahan pegawai atau posisi faskel mengalami kekosongan. Sebelum adanya pengumuman mengenai rekrutmen untuk posisi faskel, tim korkot lebih mendahului dengan mencari orang-orang yang telah memiliki pengalaman pada bidangnya. Orang-orang tersebut biasanya yang telah tergabung dalam program yang fokusnya tidak jauh berbeda dengan program KOTAKU. Sistem kerja untuk faskel sama dengan sistem kerja BKM yaitu kontrak tahunan. Kegiatan pengadaan tenaga kerja untuk posisi faskel sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Hasibuan (2014:173) bahwa *staffing* terdiri atas pengadaan, penarikan, seleksi, penempatan, dan pemberhentian.

Pada kalangan masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) telah dipilih berdasarkan keahlian yang masing-masing masyarakat miliki. Berdasarkan data wawancara yang diperoleh peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan kegiatan pengadaan tenaga kerja untuk program KOTAKU di Kelurahan Gading Kasri telah sesuai dengan pengadaan tenaga kerja pada umumnya. Dapat dilihat dengan adanya kegiatan rekrutmen dan penempatan sesuai dengan bidangnya telah mencerminkan adanya kegiatan pengadaan tenaga kerja yang baik. Sehingga dengan terisnya seluruh formasi jabatan yang ada, maka kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan optimal.

d. Pemberian Bimbingan (*Directing*) Program Kota Tanpa Kumuh meliputi  
Aspek Aktor Pemberi Bimbingan dan Aktor Penerima Bimbingan

Pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) pada tahap pemberian bimbingan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah kegiatan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Tim Koordinator Kota (Korkot) dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) kepada masyarakat Kelurahan Gading Kasri. Berdasarkan yang telah disampaikan oleh Pasolong (2011:85) bahwa *directing* adalah suatu tugas berkelanjutan dalam pembuatan keputusan dan penyusunannya dalam aturan-aturan dan intruksi-intruksi khusus atau umum agar tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai. Fungsi *directing* atau pemberian bimbingan ini telah dilakukan dalam rangka menyukseskan pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Gading Kasri. Pemberian bimbingan ini diwujudkan pada kegiatan Tim Koordinator Kota (Korkot) dalam memberikan suatu pelatihan kepada masyarakat. Pelatihan yang diberikan dapat berupa pelatihan dalam penyusunan proposal maupun pelatihan mengenai hal-hal teknis dalam pelaksanaan program KOTAKU.

Dalam rangka pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Gading Kasri agar berjalan dengan cepat dan tepat, Tim Korkot juga memberikan pelatihan dalam bentuk *On the Job Training* (OJT) kepada seluruh masyarakat. OJT yang dilaksanakan berupa pelatihan yang diiringi dengan praktik langsung di lapangan. Sehingga dengan adanya OJT, dapat dilihat masyarakat tersebut berhasil atau tidak dalam menerima bimbingan dari rangkaian kegiatan OJT. Hal ini relevan dengan teori yang

dikemukakan oleh Sukarna (1990:76) bahwa dalam pembimbingan ini harus dapat menimbulkan daya cipta (*innovation*) dan inisiatif, sehingga timbul teknik-teknik kerja yang baru dalam mempercepat penyelesaian pekerjaan. Kegiatan OJT yang diberikan oleh Tim Korkot kepada masyarakat diharapkan dapat membantu dalam menyelesaikan program KOTAKU di Kelurahan Gading Kasri dengan cepat dan tepat.

Sebagaimana masih mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Sukarna bahwa dalam pembimbingan harus dapat menimbulkan sikap inisiatif, dalam hal ini masyarakat Kelurahan Gading Kasri telah memiliki sikap inisiatif yang tinggi. Masyarakat Kelurahan Gading Kasri melakukan kegiatan studi banding ke kelurahan lainnya yang juga melaksanakan program KOTAKU. Hal ini berguna agar adanya pertukaran informasi antar masyarakat kelurahan mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada program KOTAKU di masing-masing wilayahnya.

Kegiatan pemberian bimbingan juga dilaksanakan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) kepada Kelompok Pengguna dan Pemanfaat (KPP) Kelurahan Gading Kasri. Pemberian bimbingan ini berupa kegiatan penyuluhan terkait tugasnya dalam pelaksanaan program KOTAKU dan pembelajaran dalam bentuk *forum group discussion*. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak BKM, sejauh ini KPP telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Sukarna (1990:76) bahwa dalam *directing* inipun harus dapat mempengaruhi pegawai untuk bekerja sama satu sama lain, mengingat

hanya suasana kerja samalah tujuan bersama dapat tercapai. Dapat dilihat dalam pemberian bimbingan yang diberikan oleh BKM kepada KPP, pihak BKM dapat mempengaruhi orang-orang yang tergabung dalam KPP untuk melaksanakan tugasnya dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama.

e. Pengkoordinasian (*Coordinating*) Program Kota Tanpa Kumuh meliputi Aspek Rapat Koordinasi Antar *Stakeholder* Terkait

Dalam penelitian ini yang dikaji terkait dengan pengkoordinasian yaitu rapat koordinasi antar *stakeholder* terkait dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Gading Kasri. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang telah dijelaskan pada penyajian data, kegiatan pengkoordinasian antara *stakeholder* yang terlibat dalam pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Gading Kasri dilakukan dengan baik. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara peneliti dengan pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Malang bahwa Disperkim berkoordinasi dengan beberapa *stakeholder* lain yang terlibat dalam pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Gading Kasri. Diantaranya adalah SKPD yang tergabung dalam Pokja PKP, Pihak Kelurahan Gading Kasri, Tim Korkot, Tim Faskel, BKM, KSM, dan unsur masyarakat lainnya. Pengkoordinasian seperti ini sesuai dengan pernyataan dari Awaluddin Djamin yang dikutip oleh Hasibuan (2014:86) menyatakan koordinasi adalah suatu usaha kerjasama antar badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi. Kegiatan



pengkoordinasian yang telah dilaksanakan merupakan kerjasama dari beberapa *stakeholder* yang terlibat, baik itu instansi maupun unit dalam pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Gading Kasri. Pengkoordinasian ini dilakukan juga untuk saling membantu dan saling melengkapi dalam memberikan hasil yang optimal pada pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Gading Kasri.

Kegiatan pengkoordinasian yang dilakukan berupa rapat koordinasi yang diikuti seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam program KOTAKU di Kelurahan Gading Kasri. Melalui rapat koordinasi seluruh proses pelaksanaan program dapat diketahui oleh peserta rapat koordinasi tersebut. Apabila dalam pelaksanaan program terdapat suatu kendala atau hambatan dibicarakan secara bersama agar dapat dicari solusi untuk menyelesaikannya. Tidak kalah pentingnya dalam rapat koordinasi ini juga bertujuan untuk menyelaraskan seluruh kegiatan yang telah direncanakan dengan kebijakan pembangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Pasolong (2011:85) bahwa pengkoordinasian adalah suatu proses pengintegrasian kegiatan-kegiatan dan target atau tujuan dari berbagai unit kerja dari suatu organisasi agar dapat mencapai tujuan secara efisien. Rapat koordinasi seperti ini penting untuk dilakukan agar tidak ada terjadinya kegiatan yang telah ada pada perencanaan berlainan arah dengan sumber kebijakannya. Sistem yang digunakan untuk rapat koordinasi dalam pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Gading Kasri didasarkan pada sesuai kebutuhan atau dapat



dikatakan tidak ada jadwal rapat koordinasi yang sifatnya terjadwal untuk *stakeholder* secara keseluruhan.

Dalam kegiatan pengkoordinasian ini pemegang peran paling besar yaitu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang. Disperkim harus melakukan koordinasi dengan SKPD lain yang tergabung dalam Pokja PKP dan segala unsur dari masyarakat. Menurut Sukarna (1990:78) menyatakan bahwa koordinasi itu dapat dilakukan secara vertikal yaitu dari atasan terhadap bawahan, tetapi juga secara horizontal, yaitu koordinasi yang dilakukan pada tingkat yang sama baik terhadap pekerjaan yang sejenis ataupun tidak, tetapi berada di luar batas wewenangnya sendiri. Pengkoordinasian yang dilakukan oleh Disperkim untuk program KOTAKU di Kelurahan Gading Kasri menggunakan sistem secara vertikal dan horizontal. Vertikal yaitu antara Disperkim dengan seluruh unsur masyarakat, sedangkan horizontal yaitu Disperkim dengan SKPD terkait lainnya.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang dalam mempermudah untuk berkoordinasi langsung dengan pihak kelurahan dan juga seluruh unsur masyarakat, rapat koordinasi juga dilaksanakan di lingkup Kelurahan Gading Kasri. Rapat koordinasi tersebut meliputi Disperkim, Lurah, BKM, KSM, dan Faskel. Rapat koordinasi dalam lingkup kelurahan kegiatannya berupa evaluasi hal-hal teknis pada pelaksanaan program KOTAKU dan proyeksi kegiatan yang akan dilaksanakan. Untuk kegiatan pengorganisasian di Kelurahan Gading Kasri juga disesuaikan

dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan dalam penanganan air bersih berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan filterisasi air dan pemeriksaan kualitas air. Kegiatan dalam mengadakan pelatihan terkait cara sederhana memadamkan api berkoordinasi dengan UPT Pemadam Kebakaran untuk mengadakan sosialisasi. Dengan dijalankannya koordinasi antar *stakeholder* yang terlibat diharapkan pelaksanaan program KOTAKU dapat membuahkan hasil yang optimal dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

f. Pelaporan (*Reporting*) Program Kota Tanpa Kumuh meliputi Aspek Laporan Pertanggung Jawaban

Pelaporan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) atas pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Gading Kasri. Untuk penyusunan LPJ pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Gading Kasri dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) setiap periode satu tahun. LPJ tersebut nantinya diserahkan kepada Tim Korkot sebagai penanggungjawab kegiatan pelaporan di tingkat kota. Kegiatan pelaporan ini juga harus sampai ke pusat, karena program KOTAKU merupakan program milik Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hal ini sesuai dengan fungsi pelaporan menurut Pasolong (2011:85) bahwa pelaporan adalah kegiatan eksekutif menyampaikan informasi tentang apa yang sedang terjadi kepada atasannya, termasuk menjadi agar dirinya dan bawahannya tetap mengetahui informasi lewat laporan-laporan,

penelitian, dan inpeksi. Kegiatan pelaporan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Gading Kasri disampaikan melalui bawah ke atas dan dalam bentuk laporan.

Sebelum diserahkan ke Tim Korkot terdapat pemeriksaan LPJ yang dilakukan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang didampingi oleh Tim Faskel Teknik. Melalui kegiatan pemeriksaan LPJ tersebut, dapat diketahui apabila masih terdapat ketidaksesuaian antara LPJ yang telah dikerjakan oleh KSM dengan format LPJ dari pusat. Apabila LPJ telah sesuai akan dilakukan sertifikasi laporan. LPJ tahunan ini memuat tentang pencapaian hasil Kelurahan Gading Kasri selama pelaksanaan program KOTAKU dan laporan mengenai pemasukan dan pengeluaran dana yang terkait dengan program KOTAKU.

Untuk pelaporan mengenai hal keuangan dilaksanakan pada setiap bulan yang langsung dilaporkan kepada Tim Korkot. Tim korkot dalam hal pelaporan keuangan dijadikan sebagai mediator antara KSM dengan Satuan Kerja (Satker) Kota Malang. Kemudian Satker Kota Malang yang menyampaikan laporan keuangan bulanan tersebut ke tingkat provinsi, lalu dari tingkat provinsi ke tingkat pusat. Laporan keuangan bulanan ini berisikan informasi jumlah pemasukkan dan pengeluaran perbulan dalam pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Gading Kasri. Mengenai pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Gading Kasri, sejauh ini dilakukan secara transparansi oleh seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam program ini. Laporan keuangan bulanan ini

juga dimasukkan pada LPJ tahunan. Contoh dari laporan keuangan dalam LPJ telah peneliti tampilkan pada penyajian data.

g. Penganggaran (*Budgeting*) Program Kota Tanpa Kumuh meliputi Aspek  
Penyusunan Anggaran Biaya

Penganggaran yang dikaji dalam penelitian ini merupakan kegiatan penyusunan anggaran biaya yang meliputi anggaran pendapatan dan anggaran pengeluaran selama pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Gading Kasri berlangsung. Untuk penyusunan anggaran dalam hal perencanaan dituangkan dalam bentuk Rencana Anggaran Pembelanjaan (RAP). Dalam RAP ini disajikan pendapatan dan pembelanjaan untuk satu tahun ke depan. Sedangkan untuk hasil dari penggunaan anggaran dituangkan dalam bentuk laporan keuangan perbulan, yang kemudian dimasukkan pada Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tahunan. Kegiatan penyusunan anggaran yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan program KOTAKU ini sesuai dengan pendapat dari Pasolong (2011:85) bahwa *budgeting* merupakan semua kegiatan dalam bentuk perencanaan, perhitungan dan pengendalian anggaran. Penyusunan anggaran untuk pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Gading Kasri telah mencakup perencanaan, perhitungan, dan pengendalian anggaran yang dituangkan dalam bentuk RAP dengan sistem pertahun.

Dalam penyusunan anggaran yang dilakukan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat juga melibatkan partisipasi dari masyarakat Kelurahan Gading Kasri. Peran masyarakat dalam kegiatan penyusunan

anggaran yaitu memberikan rekomendasi mengenai kebutuhan-kebutuhan yang akan dibelanjakan dalam pelaksanaan program KOTAKU. Dengan melibatkan masyarakat dalam penyusunan anggaran juga bertujuan untuk mengedepankan transparansi dana kepada seluruh masyarakat.

Berdasarkan contoh laporan keuangan yang telah ditampilkan pada penyajian data terkait pemasukan dan pengeluaran dana untuk program KOTAKU memberikan informasi terkait sumber dana yang diperoleh dan penggunaan dari dana tersebut untuk pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Gading Kasri. Sumber dana pemasukan untuk Kelurahan Gading Kasri antara lain berasal dari alokasi laba UPK, pendapatan bunga, penyerahan dana KSM, dana OJT fasilitator, dana percepatan program KOTAKU, dana kegiatan KSM, dana PKM, dan pinjaman BKM pada UPK. Pengeluaran dana yang digunakan untuk pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Gading Kasri antara lain pembelian alat tulis kantor (atk) dan perlengkapan lainnya, transport, dana kegiatan infrastruktur, pembelian komputer, angsuran BKM ke UPK, biaya pembuatan DED, kegiatan OJT Fasilitator, dana PKM, insentif sekretariat dan UP, penyerahan modal UPK, dan dana kegiatan percepatan program KOTAKU. Dapat dilihat pada penyajian data antara pemasukan dan pengeluaran memberikan hasil penggunaan dana yang efisien, karena dalam pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Gading Kasri tidak mengalami defisit atau kekurangan dana. Hal ini tentunya sesuai dengan pernyataan dari Terry (2014:192) bahwa anggaran berfungsi sebagai perencanaan dan

pengendalian kegiatan. Dengan tidak adanya defisit dalam pelaksanaan program KOTAKU, artinya seluruh *stakeholder* yang terlibat berhasil dalam melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan sesuai dengan perencanaan yang ada dan adanya pengendalian anggaran sehingga pemasukan dan pengeluaran dapat seimbang atau surplus pendapatan.

## **2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh dalam Perspektif Fungsi Administrasi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang dan di Kelurahan Gading Kasri Kota Malang**

### **a. Faktor Pendukung**

#### **1) Faktor Internal**

- a) Adanya Peraturan Menteri PUPR Nomor 02/PRT/M/2016 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai payung hukum

Dengan adanya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagai payung hukum dapat menjadi suatu kekuatan dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Gading Kasri. Dalam pelaksanaan program KOTAKU, seluruh *stakeholder* mengacu pada peraturan menteri tersebut agar dapat memberikan hasil yang optimal. Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2016 ini berisikan ketentuan umum terkait permukiman



kumuh, kriteria dan tipologi permukiman kumuh, penetapan lokasi dan perencanaan penanganan, pola-pola penanganan, pengelolaan, pola kemitraan, peran masyarakat, dan kearifan. Dibuatnya Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang dalam penyelenggaraan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Sehubungan dengan program KOTAKU yang merupakan program dalam pencegahan dan juga peningkatan kualitas permukiman kumuh menggunakan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 ini sebagai payung hukumnya. Melalui Peraturan Menteri ini diharapkan dapat mempermudah dalam pelaksanaan program KOTAKU.

b) Peran Pemerintah Daerah

Dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Gading Kasri peran dari seluruh *stakeholder* yang terlibat sangat diperlukan. Peran dari *stakeholder* fungsinya agar program KOTAKU dapat dilaksanakan dengan hasil yang optimal. Salah satu *stakeholder* yang terlibat dalam program KOTAKU yaitu Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah memiliki peran sebagai pelaksana dan juga pengawas dalam pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Gading Kasri.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti peran pemerintah daerah dalam program KOTAKU dapat dijadikan salah satu kekuatan dalam pelaksanaannya. Pemerintah daerah selama pelaksanaan



program KOTAKU selalu berkoordinasi satu sama lain dan selalu memonitoring dalam setiap rangkaian kegiatan agar dapat diketahui pelaksanaan program tersebut berjalan baik atau tidak. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Zauhar (1993:11) bahwa monitoring sebagai perangkat kegiatan yang dilakukan untuk mengikuti, mengamati dan melacak jalannya pelaksanaan program dan proyek pembangunan dengan menggunakan sistem pelaporan dan tujuan langsung ke lokasi. Pada setiap pelaksanaan program perlu adanya kegiatan *monitoring* agar jalannya suatu program dapat diketahui oleh seluruh *stakeholder*. Maka dari itu pemerintah daerah harus melakukan kegiatan *monitoring* secara rutin.

Pemerintah daerah disini bukan hanya SKPD-SKPD yang terkait, melainkan kelembagaan di Kelurahan Gading Kasri seperti BKM dapat menjalankan perannya dengan sangat baik. Sehingga hal tersebut sangat berpengaruh positif terhadap proses pelaksanaan program KOTAKU. Sebagaimana adanya peran dari pemerintah daerah, program KOTAKU dapat dilaksanakan dengan memberikan hasil yang maksimal.

## 2) Faktor Eksternal

### a) Adanya Partisipasi Masyarakat

Dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Gading Kasri tidak hanya peran dari pemerintah daerah

yang diperlukan. Program KOTAKU dalam pelaksanaannya bertujuan untuk meningkatkan peran masyarakat dari masing-masing wilayah. Hal tersebut sesuai dengan misi pertama Kelurahan Gading Kasri yaitu mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat dan ramah lingkungan. Dapat dilihat bahwa Kelurahan Gading Kasri dalam segala rangkaian kegiatan pembangunan selalu mengedepankan partisipasi dari masyarakat.

Berdasarkan yang telah dipaparkan oleh peneliti mengenai hasil wawancara pada penyajian data, tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan Gading Kasri sangat tinggi. Adanya rasa keinginan dari masyarakat untuk menjadikan kawasannya lebih baik lagi merupakan awal dari segalanya. Untuk Kelurahan Gading Kasri, masyarakat diikut sertakan mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan. Hal ini relevan dengan Pasal 44 Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2016 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh bahwa lingkup peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap penetapan lokasi dan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dan pengelolaan perumahan dan permukiman hasil peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Partisipasi dari masyarakat ini dapat menjadi salah satu

kekuatan untuk pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Gading Kasri.

b) Bantuan dana investasi

Dana atau biaya merupakan tonggak dari suatu pelaksanaan program. Program Kota Tanpa Kumuh dalam pelaksanaannya dibantu melalui bantuan dana investasi. Bantuan dana investasi diserahkan ke pihak BKM yang kemudian dananya dikelola oleh KSM untuk pelaksanaan program KOTAKU. Masyarakat juga mengetahui apabila ada dana pemasukan untuk program KOTAKU, karena Kelurahan Gading Kasri menjunjung tinggi terkait transparansi dana. Apabila dikaitkan dengan pernyataan dari United Nation yang dikutip oleh Zauhar (1993:1) bahwa suatu program dapat terlaksana dengan baik apabila memiliki ciri-ciri, salah satunya yaitu berbagai upaya di bidang manajemen termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut. Dengan adanya bantuan dana investasi diharapkan program KOTAKU dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

## b. Faktor Penghambat

### 1) Faktor Internal

- a) Kurangnya partisipasi dalam kepengurusan badan keswadayaan masyarakat

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) merupakan lembaga pimpinan kolektif masyarakat di tingkat kelurahan sebagai wadah sinergi masyarakat untuk menggalang kekuatan dan potensi sumber daya, baik yang dimiliki masyarakat maupun dengan mengakses berbagai peluang sumber daya dari luar, dalam upaya menanggulangi masalah kemiskinan dan pembangunan permukiman di wilayahnya. Dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) peran BKM di tingkat kelurahan cukup besar. Akan tetapi masih terdapat beberapa pengurus BKM yang tingkat partisipasinya kurang.

Kurangnya partisipasi dari kepengurusan BKM ini dapat menjadi salah satu kelemahan dalam pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Gading Kasri. Penyebab dari kurangnya partisipasi ini adalah adanya urusan prioritas dari masing-masing masyarakat. Apabila dikaitkan dengan teori administrasi publik dari Chandler dan Plano yang dikutip oleh Keban (2004:3) yang menyatakan bahwa administrasi publik sebagai suatu disiplin ilmu bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama di bidang organisasi, berkenaan dengan pengaturan struktur dan hirarki yang merupakan pembuatan unit, pembagian tugas dan

penetapan prosedur, aturan untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam menghadapi hambatan seperti ini, perlunya penerapan ilmu administrasi publik untuk mengatur permasalahan yang ada di kepengurusan BKM Kelurahan Gading Kasri. Kemudian diharapkan juga dari pengurus BKM yang dimaksudkan harus tetap mengetahui terkait *progress* dari pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Gading Kasri.

b) Tuntutan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan bidangnya

Suatu pembagian pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dimiliki sangat diperlukan dalam pelaksanaan program. Hal itu menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan jangka waktu dalam mencapai tujuan program tersebut. Apabila dikaitkan dengan pernyataan dari Siagian (2014:97) mengenai organisasi yang baik adalah suatu organisasi yang memiliki ciri-ciri salah satunya adalah penempatan orang yang sesuai dengan keahliannya (*the right man in the right place*), hal ini tidak sesuai dengan keadaan di Kelurahan Gading Kasri. Masih terdapat suatu pembagian pekerjaan yang tidak sesuai dengan bidangnya dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Gading Kasri.

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh peneliti pada penyajian data, masyarakat di Kelurahan Gading Kasri mendapatkan pekerjaan dari pihak BKM yang sulit untuk dipahami. Hal tersebut dikarenakan masyarakat tidak memiliki keahlian dalam hal itu.

Sehingga hal itu dapat menjadikan suatu kelemahan untuk pelaksanaan program KOTAKU. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat, mereka berharap bahwa pihak pemerintah pusat maupun daerah dapat memberikan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dari masyarakat. Dengan cara seperti itu, adanya rasa tuntutan dalam melaksanakan suatu pekerjaan dapat hilang secara perlahan.

## 2) Faktor Eksternal

### a) Perbedaan pendapat antar masyarakat

Dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) salah satu *stakeholder* yang terlibat adalah masyarakat. Partisipasi aktif dari seluruh masyarakat sangat diperlukan agar keberlangsungan program KOTAKU dapat berjalan dengan lancar. Masyarakat Kelurahan Gading Kasri ikut sertakan pada seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan program KOTAKU. Salah satu peran dari masyarakat yaitu menyampaikan pendapat terkait kebutuhan dan keinginan untuk wilayahnya. Dalam kegiatan tersebut pasti memunculkan pendapat yang berbeda-beda. Hal ini dapat menjadi suatu ancaman dalam pelaksanaan program KOTAKU, apabila masih terdapat beberapa masyarakat yang tingkat keaktifannya tidak menentu dan dengan adanya perbedaan pendapat tersebut. Contohnya saat perencanaan sudah dibuat, tetapi ada beberapa masyarakat yang tidak setuju dikarenakan tidak hadir saat penyusunan perencanaan

tersebut. Untuk menyelesaikan masalah seperti ini, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Malang ikut andil dalam menemukan solusi yang tepat. Disperkim berharap nantinya tidak terjadi lagi permasalahan seperti ini, sehingga penyusunan perencanaan tidak dilakukan secara berulang-ulang.

b) Peran kelompok swadaya masyarakat

Dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) terdapat kegiatan untuk pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Sesuai dengan Pasal 37 Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2016 yaitu pembentukan kelompok swadaya masyarakat merupakan upaya untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam mengelola perumahan dan permukiman layak huni dan berkelanjutan. Peran KSM dalam pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Gading Kasri yaitu sebagai pelaksana dan juga yang mengatur pada saat di lapangan. KSM juga terlibat dalam kegiatan penyusunan perencanaan dalam rangka pelaksanaan program KOTAKU.

Suatu perencanaan yang telah disusun masih dapat mengalami perubahan apabila kenyataan pada saat di lapangan tidak sesuai dengan perkiraan-perkiraan yang telah tertuangkan pada perencanaan. Untuk Kelurahan Gading Kasri mengalami suatu hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatannya yaitu kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan perencanaan, sehingga kegiatan tersebut tidak akan bisa untuk dilaksanakan. Hal tersebut dapat terjadi karena



saat penyusunan perencanaan kurang memerhatikan kondisi wilayahnya atau tidak adanya tinjauan ke lapangan terlebih dahulu. Maka dapat dikatakan peran KSM disini kurang dilaksanakan dengan baik dalam hal penyusunan perencanaan, sehingga menimbulkan suatu hambatan untuk pelaksanaan program KOTAKU.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perolehan data di lokasi penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh dalam Perspektif Fungsi Administrasi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang dan di Kelurahan Gading Kasri Kota Malang.
  - a. Perencanaan (*Planning*) Program Kota Tanpa Kumuh meliputi Aspek Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP)

Perencanaan yang dilakukan oleh seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam rangka pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Gading Kasri secara keseluruhan dapat dikatakan baik. Dalam proses penyusunan perencanaan, *stakeholder* yang terlibat ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dengan menjalankan perannya dengan baik. Perencanaan dalam rangka pelaksanaan program KOTAKU dimuat dalam suatu dokumen yang dinamakan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP). Maka dari itu dalam pelaksanaan program KOTAKU, seluruh *stakeholder* mengacu pada RPLP agar dapat melaksanakan programnya dengan lancar. Akan tetapi penyusunan perencanaan ini terkadang dilakukan secara berulang-ulang, karena adanya protes dari masyarakat yang tidak hadir saat penyusunan perencanaan yang pertama.

b. Pengorganisasian (*Organizing*) Program Kota Tanpa Kumuh meliputi  
Aspek Struktur Organisasi Pegawai

Pengorganisasian yang dilakukan dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Gading Kasri dapat dikatakan sudah baik. Telah adanya struktur organisasi yang jelas pada *stakeholder* yang terlibat dalam lingkup kelurahan, yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Hal tersebut baik untuk berjalannya suatu program, agar seluruh *stakeholder* dapat memahami alur komando terkait dengan pemberian tugas atau pekerjaan. Akan tetapi masih belum ada penjabaran tugas dari seluruh *stakeholder* yang terlibat.

c. Pengadaan Tenaga Kerja (*Staffing*) Program Kota Tanpa Kumuh meliputi  
Aspek Manajemen Kepegawaian

Pengadaan tenaga kerja dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Gading Kasri telah dilakukan dengan baik dalam hal pengisian formasi pada kepegawaiannya. Dalam hal manajemen kepegawaian di tingkat kota, dilaksanakan berdasarkan arahan dari pusat yang dimana telah dipilih oleh Pokja Nasional untuk mengisi formasi pada Pokja PKP tingkat kota. Pilihan yang disepakati oleh Pokja Nasional telah memperhatikan segi kualitas dan kuantitas. Kegiatan rekrutmen untuk kepengurusan BKM dan tim fasilitator kelurahan dalam pelaksanaan program KOTAKU juga telah dilakukan dengan melihat segi kualitas dan kuantitas. Segi kualitas disini maksudnya telah berdasarkan keahlian yang

dibutuhkan dan segi kuantitas disini maksudnya telah berdasarkan jumlah yang dibutuhkan. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, dalam kepengurusan BKM terdapat beberapa hambatan seperti beberapa pegawai kurang berpartisipasi dalam pelaksanaan program KOTAKU. Maka dari itu dalam hal pengadaan tenaga kerja di BKM masih kurang selektif.

d. Pemberian Bimbingan (*Directing*) Program Kota Tanpa Kumuh meliputi  
Aspek Aktor Pemberi Bimbingan dan Aktor Penerima Bimbingan

Pemberian bimbingan yang dilakukan dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Gading Kasri telah berjalan dengan baik. Kegiatan pemberian bimbingan dilaksanakan oleh Tim Koordinator Kota (Korkot) dan juga Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Penerima bimbingan tersebut adalah seluruh masyarakat Kelurahan Gading Kasri. Pemberian bimbingan dalam rangka program KOTAKU dapat berupa pelatihan, *on the job training* (ojt), penyuluhan, dan *forum group discussion* (fgd). Dengan adanya kegiatan-kegiatan pemberian bimbingan seperti ini, masyarakat di Kelurahan Gading Kasri dalam melaksanakan program KOTAKU dapat lebih mudah. Hal itu dapat diartikan masyarakat dapat memahami terkait dengan bimbingan yang telah diberikan.

e. Pengkoordinasian (*Coordinating*) Program Kota Tanpa Kumuh meliputi  
Aspek Rapat Koordinasi Antar *Stakeholder* Terkait

Pengkoordinasian yang dilakukan dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Gading Kasri bertujuan agar

pekerjaan-pekerjaan yang dijalankan oleh seluruh *stakeholder* dapat berjalan secara harmonis. Kegiatan yang diadakan untuk melakukan pengkoordinasian antar *stakeholder* terkait agar lebih jelas yaitu melalui rapat koordinasi. Rapat koordinasi ini melibatkan seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam program KOTAKU, baik di tingkat kota maupun kelurahan. Sistem yang digunakan dalam rapat koordinasi untuk program KOTAKU yaitu didasarkan sesuai dengan kebutuhan atau tidak adanya jadwal terstruktur.

f. Pelaporan (*Reporting*) Program Kota Tanpa Kumuh meliputi Aspek Laporan Pertanggung Jawaban

Pelaporan dari hasil pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Gading Kasri telah dijalankan dengan baik. Kegiatan pelaporan dalam hal keuangan dilakukan pada setiap bulan, sedangkan pelaporan secara keseluruhan mengenai pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Gading Kasri dilakukan dalam kurun waktu setahun yang berupa Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ). Laporan keuangan tersebut nantinya dipaparkan pada LPJ tahunan. LPJ pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Gading Kasri juga dilaporkan sampai pusat, karena program KOTAKU merupakan program tingkat nasional. Dengan adanya laporan keuangan perbulan dan LPJ tahunan, program KOTAKU diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal sampai program tersebut selesai dilaksanakan.

g. Penganggaran (*Budgeting*) Program Kota Tanpa Kumuh meliputi Aspek  
Penyusunan Anggaran Biaya

Penyusunan anggaran yang dilakukan untuk pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Gading Kasri bertujuan untuk menghindari terjadinya defisit. Melalui kegiatan penyusunan anggaran, dapat diketahui nominal dan sumber dana pemasukan untuk pelaksanaan program KOTAKU. Serta pengalokasian anggaran selama dilaksanakannya program KOTAKU juga dicantumkan dalam penyusunan anggaran. Dengan adanya kegiatan penyusunan anggaran juga dapat memberikan gambaran untuk seluruh *stakeholder* terkait dalam hal menggunakan dana untuk pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Gading Kasri.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh dalam Perspektif Fungsi Administrasi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang dan di Kelurahan Gading Kasri Kota Malang

a. Faktor Pendukung

1) Faktor Internal

- a) Adanya Peraturan Menteri PUPR Nomor 02/PRT/M/2016 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai payung hukum.

- b) Peran pemerintah daerah.

2) Faktor Eksternal

- a) Adanya partisipasi masyarakat.

b) Bantuan dana investasi.

b. Faktor Penghambat

1) Faktor Internal

a) Kurangnya partisipasi dalam kepengurusan Badan Keswadayaan Masyarakat.

b) Tuntutan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan bidangnya.

2) Faktor Eksternal

a) Perbedaan pendapat antar masyarakat.

b) Peran Kelompok Swadaya Masyarakat.

**B. Saran**

Adapun saran yang diajukan oleh peneliti berdasarkan hasil penyajian dan analisis data pada pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam perspektif fungsi administrasi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang dan di Kelurahan Gading Kasri Kota Malang, maka diperlukan beberapa tindakan sebagai berikut:

1. Dalam rangka memaksimalkan hasil dari pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Gading Kasri, dibutuhkan partisipasi aktif dari seluruh *stakeholder* yang terlibat. Khususnya Badan Keswadayaan Masyarakat yang berperan cukup besar dalam pelaksanaan pada saat di lapangan. Kurangnya partisipasi ini disebabkan karena adanya kegiatan atau urusan prioritas dari masing-masing individu. Hal ini berkenaan dengan pengadaan tenaga kerja untuk program KOTAKU di lingkup kelurahan.

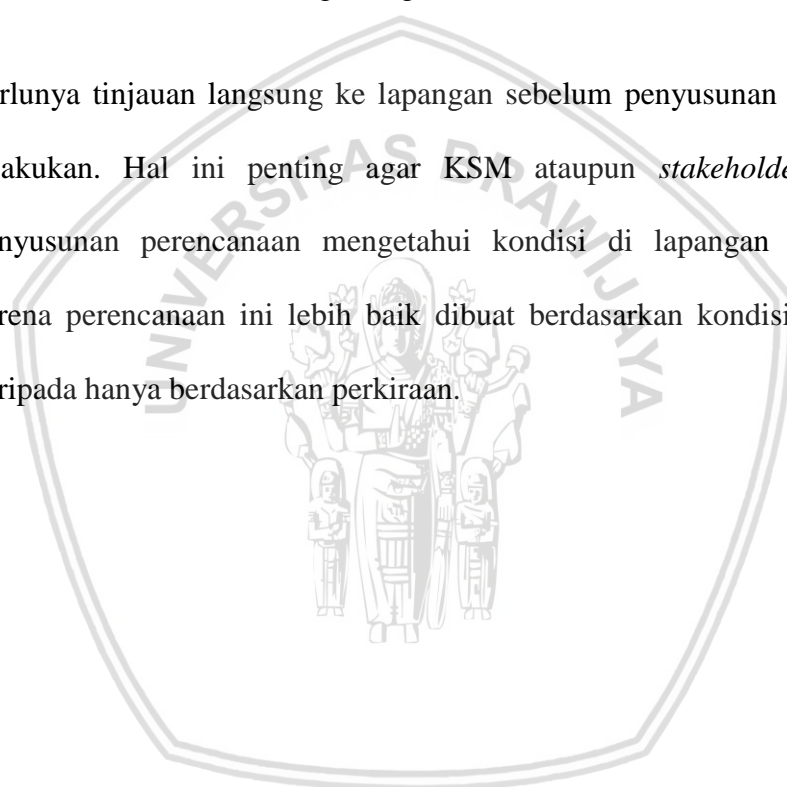


Maka dari itu saat kegiatan rekrutmen pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat berlangsung, perlu lebih selektif dalam pemilihannya. Kemudian BKM perlu membuat suatu aturan mengenai konsekuensi apabila pegawai tersebut tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, misalnya diberhentikan sebelum masa kontrak kerja selesai.

2. Dalam rangka mempercepat dan memaksimalkan hasil dari pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Gading Kasri, pembagian tugas berdasarkan keahlian yang dimiliki sangat penting untuk diterapkan. Pada pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Gading Kasri masih terdapat pemberian tugas yang tidak sesuai dengan keahlian masyarakat. Hal ini berkenaan dengan pengorganisasian dalam hal penjabaran tugas pokok dan fungsi dari seluruh *stakeholder* yang terlibat. Maka dari itu perlu dibuatnya penjabaran tugas pokok dan fungsi dari seluruh *stakeholder* yang terlibat. Hal ini berguna agar tidak adanya pembagian tugas yang tidak sesuai dengan bidangnya. Apabila telah terdapat suatu penjabaran tugas, maka pembagian tugas-tugaspun akan lebih jelas.
3. Dalam rangka memaksimalkan hasil dari pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Gading Kasri, perlunya partisipasi dan konsistensi dari masyarakat setempat. Hal ini berkenaan saat penyusunan perencanaan yang melibatkan partisipasi dari masyarakat. Akan tetapi tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan penyusunan perencanaan ini

tidak menentu. Maka dari itu perlu adanya suatu aturan yang jelas mengenai kehadiran dan keputusan pada proses penyusunan perencanaan. Misalnya, masyarakat yang tidak hadir dalam penyusunan perencanaan berarti setuju dengan keputusan-keputusan yang diambil pada proses penyusunan tersebut. Hal tersebut perlu dilakukan agar tidak adanya penyusunan perencanaan secara berulang-ulang.

4. Perlunya tinjauan langsung ke lapangan sebelum penyusunan perencanaan dilakukan. Hal ini penting agar KSM ataupun *stakeholder* lain saat penyusunan perencanaan mengetahui kondisi di lapangan seperti apa, karena perencanaan ini lebih baik dibuat berdasarkan kondisi sebenarnya daripada hanya berdasarkan perkiraan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2017. “*Proyeksi Penduduk menurut Kecamatan 2011-2020*”, diakses pada tanggal 13 November 2017 dari <https://malangkota.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/433>.
- Direktorat Jenderal Cipta Karya. *Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh*. Jakarta.
- Hasibuan, Malayu. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Indradi, Sjamsiar Syamsuddin. 2006. *Dasar-dasar dan Teori Administrasi Publik*. Malang: Agrotek Yayasan Pembangunan Nasional.
- Keban, Yeremias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gavamedia.
- Kuswanto, Tjuk. 2005. *Perumahan dan Permukiman di Indonesia: Upaya Membuat Perkembangan Kehidupan yang Berkelanjutan*. Bandung: ITB.
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Arizona: SAGE Publication. Inc.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nugroho, Rian. 2009. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Lexy J. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
- Ridho, Muhammad Agung. 2001. *Kemiskinan di Perkotaan*. Semarang: Unissula.
- Rohman, Arif. 2009. *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Siagian, Sondang P. 2014. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukarna. 1990. *Pengantar Ilmu Administrasi*. Bandung: Mandar Maju.
- Surat Keputusan (SK) Kota Malang Nomor 86 Tahun 2015.
- Suryono, Agus. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Terry, George R. 2014. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Widodo, Joko. 2009. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.
- Wijayanto, Dian. 2012. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Yunus, Hadi Sabari. 2005. *Manajemen Kota Perspektif Spasial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Zauhar, Soesilo. 1993. *Administrasi Program dan Proyek Pembangunan*. Malang: IKIP.